



BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

ANALISIS DAMPAK LIBERALISASI PERDAGANGAN BARANG
PADA PERUNDINGAN INDONESIA-EU CEPA TERHADAP
PEREKONOMIAN INDONESIA

Steven Raja Ingot, Ridho Meyrandoyo

KETIDAKEFEKTIFAN KEBIJAKAN ANTI-DUMPING PRODUK
IMPOR BAJA INDONESIA: SEBUAH ANALISIS AWAL

Aditya Paramita Alhayat

PERANAN NEGARA PERANTARA EKSPOR BAGI INDONESIA

Azis Muslim

DETERMINING PRIORITY PRODUCTS OF SMALL MEDIUM
ENTERPRISES FOR EXPORT THROUGH TRADING HOUSES

Fitria Faradila, Hasni

THE IMPACT WORLD CPO PRICE CHANGE TOWARDS PRICES,
ECONOMIC ACTIVITIES, AND INCOME DISTRIBUTION IN INDONESIA

Wisnu Winardi, Hadi Susanto, Kadim Martana

THE LEVEL OF COMPARATIVE ADVANTAGES OF WORLD
MAIN COFFEE PRODUCERS

Nia Rosiana, Rita Nurmalina, Ratna Winandi, Amzul Rifin

TINGKAT INTEGRASI PASAR AYAM BROILER DI SENTRA
PRODUKSI UTAMA: STUDI KASUS JAWA TIMUR DAN JAWA BARAT

Rahayu Ningsih, Dwi Wahyuniarti Prabowo

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan diterbitkan sejak tahun 2007 secara periodik dua kali dalam satu tahun (Juli dan Desember), memuat hasil penelitian terkait dengan isu perdagangan.

EDITOR

KETUA

Dr. Ir. Kasan, MM (*International Trade*, ABFI Perbanas Jakarta)

ANGGOTA:

Ir. Ernawati Munadi, Msi, Ph.D (*Domestic Trade*, AIPEG)

Zamroni Salim, Ph.D (*International Trade and Development*, LIPI)

Dr. Maddaremmeng A. Panennungi, S.E (*International Trade*, UI)

Teguh Dartanto, Ph.D (*Applied General Equilibrium, Microeconometrics*, UI)

Kiki Verico, Ph.D (*International Trade*, UI)

MITRA BESTARI:

Prof. Dr. Abuzar Asra, M.Sc (*Trade and Poverty*, BPS)

Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA (*Trade and Development*, LIPI)

Prof. Dr. Rina Oktaviani (*International Trade – CGE Modelling*, IPB)

Dr. Wayan R. Susila, APU (*Trade and Agricultural Economics*, TCF)

Achmad Shauki, Ph.D (*International Trade*, AIPEG)

Dr. Hartoyo (*Consumers Protection and Trade*, IPB)

Dr. Slamet Sutomo (*Domestic Trade*, STIS)

Prof. Dr. Achmad Suryana, MS (*Agriculture Economics*, Kementerian Pertanian)

Dr. Novia Budi Parwanto (*Macroeconomic, Econometric*, STIS)

REDAKSI PELAKSANA:

Puspita Dewi, SH, MBA (Koordinator penyelenggaraan penyusunan Buletin)

Maulida Lestari, SE, ME (Penyusun layout, pemeriksa dummy)

Reni K. Arianti, SP, MM (Penyelenggara administrasi dan pemeriksa dummy)

Primakrisna Trisnoputri, SIP, MBA (Penyusun layout, pemeriksa dummy)

Dewi Suparwati, S.Si (Penyelenggara administrasi, pencatatan dan korespondensi)

Hilda Cahyani, Ph.D (Translator)

Anggi Permata Dewi, ST (IT Support)

ALAMAT REDAKSI:

Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

Kementerian Perdagangan, RI

Gedung Utama Lantai 3 dan 4

JL.M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 23528681

Fax. (021) 23528691

publikasi-bppkp@kemendag.go.id

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan dapat diakses melalui:
Jurnal.kemendag.go.id

Terakreditasi

Berdasarkan SK. Kepala LIPI No.818/E/2015 tanggal 15 Juli 2015
(Sertifikat No.689/AU3/P2MI-LIPI/07/2015)

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan (BILP) Volume 11 No.2, Desember 2017. BILP merupakan sarana untuk menyebarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP), Kementerian Perdagangan kepada seluruh *stakeholders*. Dalam menerima naskah, BILP bersifat terbuka dengan menerima berbagai naskah dari penulis baik dari dalam maupun dari luar Kementerian Perdagangan sepanjang naskah bertemakan sektor perdagangan maupun sektor terkait perdagangan.

Tulisan dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan cukup beragam, namun tetap memperhatikan aspek perdagangan dalam berbagai dimensi dan pendekatan keilmuan. Dalam Volume 11 No. 2, Desember 2017, BILP mempublikasikan tujuh tulisan ilmiah yang mengkaji berbagai isu di bidang perdagangan. Dari tujuh naskah yang dipublikasikan, dua diantaranya merupakan naskah ilmiah yang tulis oleh penulis dari luar Kementerian Perdagangan.

Tulisan pertama dengan judul “Analisis Dampak Liberalisasi Perdagangan Barang Pada Perundingan Indonesia–EU CEPA Terhadap Perekonomian Indonesia”. Tulisan ini menganalisis dampak liberalisasi perdagangan barang terhadap perekonomian Indonesia dengan dua opsi/simulasi dengan metode analisis yang digunakan adalah model *Computable General Equilibrium* (CGE) yang terdapat pada *Global Trade Analytical Project* (GTAP).

Tulisan kedua berjudul “Ketidakefektifan Kebijakan Anti-Dumping Produk Impor Baja Indonesia: Sebuah Analisis Awal”. Studi ini ditujukan untuk membuktikan bahwa *circumvention* mengakibatkan tindakan anti-dumping atas impor produk baja Indonesia tidak efektif dan untuk memberikan masukan berdasarkan praktik di negara lain supaya kebijakan anti-dumping Indonesia lebih efektif. *Circumvention* dianalisis

dengan membandingkan pola perdagangan antara sebelum dan setelah pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Tulisan ketiga berjudul “Peranan Negara Perantara Ekspor Bagi Indonesia” bertujuan untuk mengidentifikasi peranan negara perantara ekspor bagi Indonesia dengan cara mengidentifikasi negara yang menjadi perantara dan produknya; serta mengetahui alasan pelaku bisnis melakukan ekspor tidak langsung. Penelitian ini menggunakan metode estimasi untuk mengidentifikasi ekspor tidak langsung Indonesia dengan mitra dagang dari tahun 2009 hingga 2013 dengan menggunakan data UN-Comtrade.

Tulisan keempat yang berjudul “*Determining Priority Products of Small Medium Enterprises for Export Through Trading Houses*” bertujuan untuk menyusun kriteria prioritas produk potensial ekspor dan sekaligus menentukan produk prioritas ekspor UKM yang akan dimasukkan dalam *Trading House* dengan menggunakan metode *Analytical Network Process* (ANP).

Dengan judul “*The Impact of World CPO Price Change Towards Prices, Economic Activities, and Income Distribution in Indonesia*”, tulisan kelima bermaksud menganalisis dampak perubahan harga CPO dunia terhadap harga-harga, aktivitas ekonomi, dan distribusi pendapatan rumah tangga di Indonesia dengan pendekatan model CGE.

Tulisan keenam berjudul “*The Level of Comparative Advantages of World Main Coffee Producers*” bermaksud untuk menganalisis tingkat persaingan antar negara produsen utama dalam lima periode waktu dengan menggunakan analisis *Revealed Comparative Advantage* (RCA) dan *Dynamic Revealed Comparative Advantage* (DRCA).

Tulisan yang terakhir dengan judul “Tingkat Integrasi Pasar Ayam Broiler di Sentra Produksi Utama: Studi Kasus Jawa Timur dan Jawa Barat”, bertujuan untuk menganalisis integrasi pasar vertikal ayam broiler di tingkat peternak-pedagang besar dan pedagang besar-pengecer di sentra produksi utama. Tingkat transmisi harga dalam studi ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan model Ravallion.

Tulisan ilmiah yang diterbitkan dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi para pengambil kebijakan baik dalam lingkungan pemerintah maupun non-pemerintah, dan

memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perdagangan. Kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan buletin ini.

Jakarta, Desember 2017

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	iii
ANALISIS DAMPAK LIBERALISASI PERDAGANGAN BARANG PADA PERUNDINGAN INDONESIA-EU CEPA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA	123-142
<i>Steven Raja Ingot, Ridho Meyrandoyo</i>	
KETIDAKEFEKTIFAN KEBIJAKAN ANTI-DUMPING PRODUK IMPOR BAJA INDONESIA: SEBUAH ANALISIS AWAL	143-168
<i>Aditya Paramita Alhayat</i>	
PERANAN NEGARA PERANTARA EKSPOR BAGI INDONESIA	169-186
<i>Azis Muslim</i>	
DETERMINING PRIORITY PRODUCTS OF SMALL MEDIUM ENTERPRISES FOR EXPORT THROUGH TRADING HOUSES	187-206
<i>Fitria Faradila, Hasni</i>	
THE IMPACT OF WORLD CPO PRICE CHANGE TOWARDS PRICES, ECONOMIC ACTIVITIES, AND INCOME DISTRIBUTION IN INDONESIA	207-226
<i>Wisnu Winardi, Hadi Susanto, Kadim Martana</i>	
THE LEVEL OF COMPARATIVE ADVANTAGES OF WORLD MAIN COFFEE PRODUCERS	227-246
<i>Nia Rosiana, Rita Nurmalina, Ratna Winandi, Amzul Rifin</i>	
TINGKAT INTEGRASI PASAR AYAM BROILER DI SENTRA PRODUKSI UTAMA: STUDI KASUS JAWA TIMUR DAN JAWA BARAT	247-270
<i>Rahayu Ningsih, Dwi Wahyuniarti Prabowo</i>	

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Terakreditasi Berdasarkan SK Kepala LIPI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

DDC: 382.6 ARI a

Ari Muliarta Ginting
Pusat Penelitian, Sekretariat Jendral dan
Badan Keahlian DPR-RI, Indonesia

Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11
No.1 Juli 2017, Hal.1-20

Ekspor merupakan salah satu faktor terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, sejalan dengan hipotesis *export-led growth* (ELG). Penelitian ini menganalisis perkembangan ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal I 2001 sampai dengan kuartal IV 2015. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dalam menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi serta ekspor dan analisis kuantitatif metode *Error Correction Model* (ECM) dalam menganalisis efek jangka panjang dan jangka pendek dari ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada periode penelitian, data yang ada menunjukkan bahwa ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sama-sama mengalami peningkatan. Hasil regresi ECM menunjukkan bahwa ekspor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mendukung hipotesis bahwa ELG berlaku untuk Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan kinerja ekspor Indonesia. Peningkatan kinerja ekspor Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan perbaikan sistem administrasi ekspor, peningkatan riset dan pengembangan produk Indonesia, peningkatan sarana dan prasarana

infrastruktur, stabilitas nilai tukar dan perluasan pasar non tradisional, termasuk perbaikan struktur ekspor komoditas.

Kata kunci: Ekspor, Pertumbuhan Ekonomi, ECM

DDC: 382.6 AZI a

Aziz Muslim
Pusat Pengkajian Perdagangan Luar
Negeri, BPPP, Kementerian perdagangan-
RI, Indonesia

Apakah *Sunk Cost Entry* Berpengaruh
Pada Ekspor Indonesia ke Singapura?:
Pendekatan Agregat

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11
No.1 Juli 2017, Hal. 21-42

Bagi Indonesia, Singapura telah lama dikenal sebagai negara perantara (*intermediary*) perdagangan untuk ekspor maupun impor. Secara umum *sunk cost entry to export* merupakan pertimbangan untuk masuk ke pasar ekspor, namun dalam kondisi terdapatnya perantara perdagangan apakah *sunk cost entry to export* tidak menjadi pertimbangan untuk masuk ke pasar ekspor? Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji apakah *sunk cost entry* berpengaruh atau tidak untuk ekspor Indonesia ke Singapura. Model penelitian menggunakan model histerisis Baldwin-Krugman dengan pertimbangan penggunaan data *aggregate* dan lonjakan nilai tukar. Metode yang digunakan adalah perubahan koefisien pada saat *structural break* sedangkan nilainya diestimasi dengan model regresi *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sunk cost entry* tidak memengaruhi ekspor Indonesia ke Singapura atau dengan kata lain tidak menjadi pertimbangan memasuki pasar

BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Terakreditasi Berdasarkan SK Kepala LIPI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

ekspor Singapura. Temuan tersebut bermanfaat bagi eksportir dengan modal terbatas untuk menggunakan Singapura sebagai *intermediary*. Pemerintah sebagai fasilitator dapat menyarankan kepada eksportir pemula terutama eksportir dengan modal terbatas untuk menjadikan Singapura sebagai perantara dalam perdagangan.

Kata kunci: Ekspor, *Sunk Cost Entry*, Histerisis, *Structural Break*, *Autoregressive Distributed Lag*

DDC: 661.4 AHM f

Ahmad Syariful Jamil, Netty Tinaprilla, Suharno
Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan dan Efektivitas Kebijakan Impor Garam Indonesia

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11 No.1 Juli 2017, Hal. 43-68

Garam merupakan komoditas strategis Indonesia yang permintaannya akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan garam dalam negeri dengan produksi garam domestik mendorong pemerintah untuk melakukan impor garam. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi volume permintaan dan efektivitas kebijakan impor garam Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dari tahun 2004-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap volume permintaan impor garam Indonesia yaitu: produksi garam domestik, harga garam impor,

Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia, PDB riil negara sumber impor dan nilai tukar riil. Produksi garam domestik dan harga garam impor memiliki hubungan yang negatif dengan volume impor, sedangkan variabel lainnya memiliki hubungan yang positif. Temuan lain adalah kebijakan impor yang telah dikeluarkan oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif diterapkan pada saat studi ini dilakukan. Rekomendasi kebijakan yang seharusnya dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu sinkronisasi data, penguatan pengawasan kebijakan impor, serta intensifikasi dan ekstensifikasi lahan untuk meningkatkan produksi garam domestik.

Kata Kunci: Produksi Garam, Permintaan Impor Indonesia, Kebijakan Impor Garam Indonesia

DDC: 6633.7 SIT d

Siti Yuliaty Chansa Arfah, Harianto, Suharno
Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Daya Saing dan Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Komoditi Kakao di Sulawesi Tengah

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11 No.1 Juli 2017, Hal.69-96

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji daya saing komoditi kakao di Sulawesi Tengah dan melihat peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing komoditi kakao. Data primer berasal dari observasi, wawancara dan kuesioner, sementara data sekunder berasal dari instansi terkait. Metode analisis menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM) dan analisis sensitivitas. Penelitian ini menemukan bahwa nilai PCR Kabupaten Parigi Moutong 0,589 dan Kabupaten Sigi 0,396.

BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Terakreditasi Berdasarkan SK Kepala LIPI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

Sedangkan nilai DRC Kabupaten Parigi Moutong 0,387 dan Kabupaten Sigi 0,319. Hal tersebut mengindikasikan bahwa usahatani komoditi kakao di Sulawesi Tengah memiliki daya saing, namun tidak menguntungkan secara ekonomi karena Sulawesi Tengah menghasilkan biji kakao yang tidak difermentasi akibatnya petani menerima harga rendah. Berdasarkan hasil analisis, pemerintah belum memberikan proteksi terhadap harga biji kakao dalam negeri melalui harga referensi biji kakao sehingga harga biji kakao didaerah penelitian masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan harga di pasar internasional. Sementara terhadap input, pemerintah telah memberikan kebijakan subsidi kepada petani, namun implementasinya masih perlu perbaikan terutama terkait penyaluran dan pengelolaan bantuan agar merata. Kajian ini merekomendasikan masih diperlukan kebijakan pemerintah baik terhadap input maupun output untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi dan menaikkan harga jual biji kakao, sehingga dapat meningkatkan daya saing biji kakao.

Kata kunci: Daya Saing, Biji Kakao, *Policy Analysis Matrix*

DDC: 338.55 ASR s

Asri Delmayuni, Musa Hubeis, Eko Ruddy Cahyadi
Program Studi Ilmu Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Pangan di Palembang

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11 No.1 Juli 2017, Hal. 97-122

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai potensi sangat besar untuk kemajuan perekonomian Indonesia, karena tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Mensejahterahkan UMKM akan berdampak besar bagi perekonomian negara indonesia. Penelitian mengenai strategi untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pangan di Kota Palembang ini dilakukan dengan menggunakan analisis *Strength, Weaknes, Opportunity, and Threats* (SWOT) dan Analisis Hirarki Proses (AHP). Sampel usaha UMKM Pangan di Palembang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan SWOT dan AHP diperoleh hasil bahwa strategi prioritas yang harus dilakukan oleh UMKM pangan berdaya saing di Kota Palembang adalah penggunaan peralatan yang lebih moderndalam proses produksi agar variasi makanan dapat dibuat secara lebih efisien dan efektif; serta pemanfaatan manajemen modern agar pengolahan UMKM dapat mencakup ekonomi lokal (dalam negeri) dan juga luar negeri. Untuk itu kontribusi dan kerjasama yang baik antar pemerintah dan UMKM akan membuat UMKM bisa melakukan perannya dengan baik dan menciptakan UMKM pangan yang berdaya saing.

Kata kunci: Berdaya Saing, Pangan, Pengembangan UMKM, Strategi

DDC: 382.9 STE a

Steven Raja Ingot, Ridho Meyrandoyo
Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian perdagangan-RI, Indonesia

Analisis Dampak Liberalisasi Perdagangan Barang Pada Perundingan Indonesia-EU CEPA Terhadap Perekonomian Indonesia

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Terakreditasi Berdasarkan SK Kepala LIPI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11 No.2 Desember 2017, Hal. 123-142

Uni Eropa (EU) merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia, namun pangsa pasar Indonesia di Uni Eropa masih di bawah beberapa negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2015, pangsa pasar Indonesia di Uni Eropa baru mencapai 0,37% masih berada di bawah pangsa pasar Thailand (0,48%), Malaysia (0,49%), dan Vietnam (0,74%) (Trademap 2017). Indonesia membutuhkan akses pasar untuk dapat meningkatkan pangsa pasar di Uni Eropa dan salah satunya adalah dengan melakukan liberalisasi perdagangan barang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak liberalisasi perdagangan barang terhadap perekonomian Indonesia dengan dua opsi, yaitu Simulasi 1 (SIM1) yaitu penghapusan tarif 100% untuk 4.945 pos tarif HS 6 digit. Simulasi 2 (SIM2) yaitu penghapusan tarif 100% kecuali untuk Uni Eropa sebanyak 260 pos tarif dan Indonesia sebanyak 235 pos tarif. Simulasi 2 digunakan untuk mempertimbangkan modalitas yang mirip dengan modalitas *Vietnam-EU Partnership and Cooperation Agreement* (Vietnam-EU PCA). Metode analisis yang digunakan adalah model *Computable General Equilibrium* (CGE) yang terdapat pada *Global Trade Analytical Project* (GTAP). Hasil analisis menunjukkan bahwa simulasi 1 memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan simulasi 2, karena tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia pada simulasi 1 lebih besar daripada simulasi 2. Namun demikian, Indonesia tetap dapat menggunakan modalitas sebagaimana dilakukan oleh kerjasama Vietnam-EU PCA sebagai dasar perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-EU CEPA)

karena selisihnya dikategorikan tidak terlalu besar.

Kata Kunci: Indonesia – *European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-EU CEPA), Liberalisasi, Perdagangan Barang

DDC: 382.5 ALH k

Aditya P. Alhayat
Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, BPPP, Kementerian Perdagangan-RI, Indonesia

Ketidakefektifan Kebijakan Anti-Dumping Produk Impor Baja Indonesia: Sebuah Analisis Awal

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11 No. 2 Desember 2017, Hal. 143-168

Meskipun Indonesia telah mengenakan tindakan anti-dumping terhadap beberapa jenis produk baja, namun impor produk tersebut masih meningkat. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah importasi melalui produk yang dimodifikasi secara tidak substansial atau melalui negara ketiga yang tidak dikenakan tindakan anti-dumping, yang dalam perdagangan internasional umum disebut sebagai praktik *circumvention*. Studi ini ditujukan untuk membuktikan bahwa *circumvention* mengakibatkan tindakan anti-dumping atas impor produk baja Indonesia tidak efektif dan untuk memberikan masukan berdasarkan praktik di negara lain supaya kebijakan anti-dumping Indonesia lebih efektif. *Circumvention* dianalisis dengan membandingkan pola perdagangan antara sebelum dan setelah pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD) menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Global Trade Information Services (GTIS). Hasil analisis

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Terakreditasi Berdasarkan SK Kepala LIPI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa *circumvention* mengakibatkan pengenaan tindakan anti-dumping impor produk baja di Indonesia menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah No. 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dengan memasukkan klausul tindakan anti-*circumvention* yang setidaknya mencakup bentuk-bentuk dan prosedur tindakan, sebagaimana yang telah dilakukan beberapa negara seperti: AS, EU, Australia, dan India.

Kata kunci: Anti-Dumping, *Circumvention*, Produk Baja

DDC: 382.6 BAD p

Aziz Muslim

Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, BPPP, Kementerian Perdagangan-RI, Indonesia

Peranan Negara Perantara Ekspor Bagi Indonesia

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11 No.2 Desember 2017, Hal. 169-186

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekspor tidak langsung berperan dalam meningkatkan perdagangan. Terlepas dari fakta tersebut, beberapa pemangku kebijakan berpendapat bahwa proses ekspor tidak langsung perlu didorong menjadi ekspor langsung untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan negara perantara ekspor bagi Indonesia dengan cara mengidentifikasi negara yang menjadi perantara dan produknya; serta mengetahui alasan pelaku bisnis melakukan ekspor tidak langsung.

Penelitian ini menggunakan metode estimasi untuk mengidentifikasi ekspor tidak langsung Indonesia dengan mitra dagang dari tahun 2009 hingga 2013 dengan menggunakan data UN-Comtrade. Hasil kajian menunjukkan bahwa Malaysia, Thailand, dan Vietnam merupakan negara perantara ekspor Indonesia disamping negara perantara perdagangan internasional konvensional (Singapura, Hong Kong, Belanda, dan Jerman). Ekspor tidak langsung adalah optional bagi pelaku ekspor. Negara perantara ekspor memiliki peran positif untuk memfasilitasi ekspor bagi eksportir yang memiliki keterbatasan. Pemerintah perlu mendorong ekspor tidak langsung jika menguntungkan pelaku bisnis, dan perlu meningkatkan efektifitas peranan Atase dan ITPC dalam memberikan informasi pasar ekspor jika ekspor tidak langsung menjadi penghambat.

Kata Kunci: *Indirect Ekspor, Intermediary Country, Re-export, Entrepot Trade*

DDC: 658.022 FIT d

Fitria Faradila, Hasni

Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, BPPP, Kementerian Perdagangan-RI, Indonesia

Penentuan Produk Ekspor UKM Prioritas Melalui *Trading Houses*

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11 No.2 Desember 2017, Hal. 187-206

Upaya mempercepat laju ekspor Indonesia melalui peningkatan ekspor dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM), merupakan pendekatan yang strategis. UKM telah terbukti sebagai sektor yang mampu bertahan dalam situasi krisis ekonomi domestik dan global. Namun demikian, UKM menghadapi beberapa

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Terakreditasi Berdasarkan SK Kepala LIPI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

kendala dalam menembus pasar internasional. *Trading House* dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kriteria prioritas produk potensial ekspor dan sekaligus menentukan produk prioritas ekspor UKM yang akan dimasukkan dalam *Trading House*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari BPS dan data primer yang berasal dari FGD. Metode yang digunakan adalah metode *Analytical Network Process* (ANP). Metode ANP diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih bagus mengingat kemampuannya dalam memperhitungkan interaksi dua arah antar elemen dan kluster dalam kerangka penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria prioritas untuk menentukan produk *Trading House* adalah pangsa ekspor, impor dunia dan ketersediaan bahan baku lokal. Produk prioritas *Trading House* adalah perhiasan dan aksesoris, furnitur, makanan olahan, produk tekstil dan garmen, minyak atsiri (produk spa aromaterapi). Pemerintah perlu segera membangun *Trading House* yang komprehensif dan mensosialisasikan fungsinya kepada pelaku usaha terutama UKM.

Kata kunci: *Trading House*, Ekspor, UKM, Metode ANP

DDC: 664.3 WIS i

Wisnu Winardi, Hadi Susanto, Kadim Martana
BPS-Indonesia, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup-RI, Indonesia

Dampak Perubahan Harga CPO Dunia Terhadap Harga, Aktivitas Ekonomi, dan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11 No.2 Desember 2017, Hal. 207-226

Paper ini menganalisis dampak perubahan harga CPO dunia terhadap harga-harga, aktivitas ekonomi, dan distribusi pendapatan rumah tangga di Indonesia dengan pendekatan model CGE. Model pertama mengasumsikan Indonesia tidak mampu memengaruhi harga, sedangkan model kedua mengasumsikan Indonesia mampu memengaruhi harga. Data utama yang digunakan bersumber dari Tabel Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia tahun 2008. Hasil simulasi menunjukkan bahwa apabila Indonesia berperan sebagai penerima harga, peningkatan harga CPO dunia diperkirakan akan berdampak pada penguatan nilai tukar, penurunan tingkat harga, dan meningkatkan aktivitas ekonomi, namun sedikit mengurangi pemerataan distribusi pendapatan. Di sisi lain, penurunan harga CPO dunia akan memberikan dampak yang sebaliknya. Apabila Indonesia dapat berperan memengaruhi harga, perubahan harga CPO dunia diperkirakan akan berdampak sama dengan bila Indonesia tidak dapat memengaruhi harga, namun dengan nilai perubahan yang relatif lebih kecil. Hasil ini mengindikasikan bahwa Indonesia sebaiknya dapat berperan sebagai penerima harga ketika harga CPO dunia bertendensi meningkat dan berperan memengaruhi harga ketika harga CPO dunia bertendensi turun.

Kata Kunci: Harga CPO dunia, Model CGE, Penerima harga, Penentu harga

DDC: 633.73 NIA I

Nia Rosiana, Rita Nurmalia, Ratna Winandi, Amzul Rifin
Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Terakreditasi Berdasarkan SK Kepala LIPI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

Tingkat Keunggulan Komparatif Produsen Utama Kopi Dunia

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11 No.2 Desember 2017, Hal. 227-246

Tingkat pertumbuhan produksi kopi dunia cenderung menurun dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan konsumsi kopi dunia. Hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi kopi di negara-negara penghasil utama. Hal ini berdampak pada jumlah kopi yang diekspor untuk pemenuhan kebutuhan kopi dunia. Penelitian ini menganalisis tingkat persaingan antar negara produsen utama dalam lima periode waktu dengan menggunakan analisis *Revealed Comparative Advantage* (RCA) dan *Dynamic Revealed Comparative Advantage* (DRCA). Hasil menunjukkan bahwa pada periode 2001-2003, rata-rata pertumbuhan daya saing antar negara paling tinggi dibanding periode lainnya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan ekspor yang cukup signifikan dari negara Honduras yang berdampak pada nilai RCA. Dalam periode 2012-2015, Colombia merupakan negara yang memiliki tingkat pertumbuhan daya saing paling tinggi karena peningkatan jumlah ekspor yang cukup signifikan. Perubahan daya saing dapat mempengaruhi perubahan posisi pasar ekspor suatu negara. Dalam periode 2012-2015, terdapat penurunan pangsa pasar yang terjadi di Vietnam, Ethiopia, India, Honduras, Guatemala dan Peru sedangkan peningkatan pangsa pasar terjadi di Brazil, Colombia, Indonesia, dan Uganda. Posisi Indonesia di pasar kopi dunia tahun 2015 yaitu *failing stars* dimana pangsa kopi Indonesia lebih tinggi dari pangsa kopi dunia. Peningkatan daya saing akan meningkatkan pangsa pasar suatu negara yang didukung oleh peningkatan teknologi, kualitas dan produktivitas kopi.

Kata kunci: Ekspor kopi, Keunggulan Komparatif, Kopi, Pangsa Pasar

DDC: 658.83 BAD t

Rahayu Ningsih, Dwi Wahyuniarti Prabowo
Pusat Pengkajian Kerjasama Internasional,
Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam
Negeri, BPPP, Kementerian Perdagangan-
RI, Indonesia

Tingkat Integrasi Pasar Ayam Broiler di
Sentra Produksi Utama: Studi Kasus Jawa
Timur dan Jawa Barat

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11 No.2 Desember 2017, Hal. 247-270

Ayam broiler merupakan salah satu komoditi pangan yang harganya cenderung meningkat dan mengalami fluktuasi harga cukup tinggi diantara komoditi pangan lainnya. Fluktuasi harga yang tinggi menyebabkan disinsentif bagi pelaku usaha sektor perunggasan karena mengakibatkan ketidakpastian berusaha. Studi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pasar vertikal ayam broiler di tingkat peternak-pedagang besar dan pedagang besar-pengecer di sentra produksi utama yakni Jawa Timur dan Jawa Barat. Tingkat transmisi harga dalam studi ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan model Ravallion. Hasil analisis menyimpulkan bahwa tidak terjadi integrasi pasar di tingkat peternak-pedagang besar baik di Jawa Timur maupun Jawa Barat begitu pula di tingkat pedagang besar-pengecer di Jawa Barat. Namun demikian untuk Jawa Timur, terjadi integrasi pasar di tingkat pedagang besar-pengecer. Dengan tidak terintegrasinya pasar secara vertikal, maka ada kecenderungan bahwa margin keuntungan tidak terdistribusi dengan baik di tiap pelaku dalam rantai distribusi. Hasil studi ini merekomendasikan perlu adanya

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Terakreditasi Berdasarkan SK Kepala LIPI No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

Lembar Abstrak ini Boleh Dikopi Tanpa Izin dan Biaya

peningkatan transmisi harga dari pedagang pengecer ke pedagang besar dan selanjutnya ke peternak melalui peningkatan akses informasi pasar secara transparan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur informasi harga secara online.

Kata kunci: Ayam Broiler, Ravallion, Integrasi Pasar, Transmisi Harga

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Accredited No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

The abstract sheet may reproduced/copied without permission or charge

DDC: 382.6 ARI a

Ari Muliarta Ginting
Research Centre, Secretariat General and
Expertise Agency of the House of
Representatives of the Republic of
Indonesia

*An Analysis of Export Effect on the
Economic Growth of Indonesia*

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11
No.1 July 2017, Page 1-20

Export is one of the factors behind the economic growth which is in line with the export-led growth hypothesis (ELG). This research analyzes the relationship between economic growth and export of Indonesia during first quarter of 2001 until fourth quarter of 2015. It employs descriptive analysis to describe export movement and economic growth during the study period and ECM model to analyze the long run and the short run effects of export on the economic growth. The available information indicated that, during the study period, both export and economic growth showed similar increasing trends. The result of the ECM model revealed that export had a positive and statistically significant relationship with the economic growth, supporting the hypothesis of ELG in Indonesia. Hence, to accelerate economic growth, efforts are required to boost the export performance in Indonesia. The Export performance can be increased by several way, such as improving the export administration system, increasing the research and development of Indonesian products, improving the facilities and infrastructure, exchange rate stability and the non-tradisional markets expansion, and including improvement of the export commodity structure.

Keywords: Export, Economic Growth, ECM

DDC: 382.6 AZI a

Aziz Muslim
The Center for Foreign Trade Policy,
Ministry of Trade of the Republic of
Indonesia

*Does Sunk Cost Entry Affect Indonesian
Export to Singapore?: An Aggregate
Approach*

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11
No.1 July 2017, Page 21-42

Singapore has been known as an intermediary country for Indonesia's export and import trade. Sunk cost entry is one of the exporter considerations to enter an export market. However, if there is an intermediary trade, does sunk cost still become a consideration? The purpose of this study is to examine whether the sunk cost entry affects Indonesian export to Singapore or not. This study uses Baldwin-Krugman's Hysteresis model due to an aggregate data usage and a surge in the exchange rate. This study uses the coefficient changes method since structural break is happening and its value is estimated by the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) regression model. The result shows that sunk cost does not affect Indonesian exports to Singapore, or in another word it does not become a consideration to enter Singapore markets. It is important that the exporters with limited capital use Singapore as an intermediary. The Government should propose beginner exporters to choose Singapore as the intermediary country trade.

Keywords: Export, Sunk Cost, Hysteresis, Structural Break, Autoregressive Distributed Lag

BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Accredited No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

The abstract sheet may reproduced/copied without permission or charge

DDC: 661.4 AHM f

Ahmad Syariful Jamil, Netty Tinaprilla,
Suharno
Institute Pertanian Bogor, Bogor, West
Java, Indonesia

*Determinant Factor of The Demand and
Effectiveness of Indonesia's Salt Import
Policy*

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11
No.1 July 2017, Page 43-68

Salt is a strategic commodity which its demand will continue to increase along with the increasing population. The imbalance between the demand and the supply of salt in Indonesia encourages the government to import salt. This study aimed to analyze: the factors that influence the demand of salt import, the effectiveness of salt import and alternative formulation of domestic salt policies. The panel regression model was conducted to address the problem. The study found that the variables that significantly influenced the import demand of salt in Indonesia were domestic salt production, imported salt price, real GDP of Indonesia, real GDP of importing source country and real exchange rate. Domestic salt production and imported salt price had a negative relationship towards import volume, while other variables had a positive relationship. Another finding is that the government policy of importing salt has not been fully implemented at the time of this study. The policies that should be further improved by the government can be done by synchronizing the data, strenghtening the monitoring import policy, land intensification and extension support in order to produce salt.

Keywords: Salt Production, Indonesia

*Import Demand, Salt Import Policy of
Indonesia*

DDC: 6633.7 SIT d

Siti Yuliaty Chansa Arfah, Harianto,
Suharno
Institute Pertanian Bogor, Bogor, West
Java, Indonesia

*Competitiveness and the Role of
Government to Increase Competitiveness of
Cocoa in Central Sulawesi*

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11
No.1 July 2017, Page 69-96

The purpose of this study is to assess the competitiveness of cocoa in Central Sulawesi and to investigate the role of government in improving the competitiveness of cocoa. The primary data were generated through observation, interviews and some questionnaires. The secondary data were obtained from the agency or the institution related to the research. This study uses the Policy Analysis Matrix (PAM) and sensitivity analysis. The study found that the PCR value for Parigi Moutong district was 0.589 and Sigi district was 0.396. While, the DRC value for Parigi Moutong district was 0.387 and Sigi district was 0.319. This indicates that cocoa beans farming in Central Sulawesi has competitiveness, but not economically beneficial because Central Sulawesi produces unfermented cocoa beans consequently farmers receive low prices. Based on the results of the government's impact on output analysis, the government did not provide protection for domestic cocoa seed prices through the reference price of cocoa beans, consequently the price of domestic cocoa beans, particularly in the research area, was relatively low compared to the price of

BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Accredited No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

The abstract sheet may reproduced/copied without permission or charge

cocoa beans at the international market. Seen from the government policy on inputs, the government have provided subsidies to farmers but they need to improve the distribution and management of aid to be evenly distributed. It is necessary to set up good government policy on inputs and outputs in order to increase cocoa seed productivity, decrease production cost and increase the price which simultan eously can improve its competitiveness in the research location.

Keywords: Competitiveness, Cocoa, Policy Analysis Matrix

DDC: 338.55 ASR s

Asri Delmayuni, Musa Hubeis, Eko Ruddy Cahyadi
Institut Pertanian Bogor, Bogor, West Java, Indonesia

Strategies to Increase the Competitiveness of Food's Small Medium Enterprises (SMEs) in Palembang

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11 No.1 Juli 2017, Page 97-122

Small and Medium Enterprises (SMEs) has a large potential for the economic progress in Indonesia since it has been widespread throughout the country. Prospering the SMEs will bring a major impact for the economy of Indonesia. The research about strategy to improve the competitiveness of Food Micro Small Medium Enterprises (SMEs) in Palembang City was done by using the Strength, Weakness, Opportunity, and Threats (SWOT) analysis and Hierarchy Analysis Process (AHP). The sample of SMEs food business in Palembang was taken by using purposive sampling technique. The result shows that the priority strategy that should be done by the SMEs are using the modern equipment

in production process in order to make the food variation more effective and efficient; and utilizing the modern management for SME's processing can cover the domestic and international economy. Therefore, good cooperation between government and SMEs will lead to a better function of SMEs which creates high competitiveness in SMEs.

Keywords: Competitive, Food, SMEs Development, Strategy

DDC: 382.9 STE a

Steven Raja Ingot, Ridho Meyrandoyo
Center for International Trade Cooperation Policy, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

An Impact Analysis on Trade Liberalization in Goods on Indonesia-EU CEPA on Indonesia's Economy

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11 No.2 December 2017, Page 123-142

European Union (EU) is one of the main destinations of Indonesian export; however, the Indonesia's market share has been left behind compared to some other ASEAN countries. In 2015, Indonesia's market share in the EU has reached only 0.37%, which was still left behind from the market share of Thailand (0.48%), Malaysia (0.49%) and Vietnam (0.74%) (Trademap, 2017). Indonesia requires a market access to increase market share in the EU, for instance by liberalizing trade in goods. This study aims to analyze the impact of liberalization of trade in goods on the Indonesian economy with two options: Simulation 1(SIM 1) by reducing tariff 100% for 4,945 tariff lines based on HS 6 digits, and Simulation 2 (SIM 2) by reducing 100% tariffs except 260 tariffs lines of EU and 235 tariff lines of Indonesia. Simulation 2 was

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Accredited No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

The abstract sheet may reproduced/copied without permission or charge

conducted to consider the similar modalities undertaken by Vietnam-EU Partnership and Cooperation Agreement (Vietnam-EU PCA). The analytical methods used Computable General Equilibrium (CGE) model in the Global Trade Analytical Project (GTAP). The result shows that simulation 1 gives a better impact compared to simulation 2, as the level of economic growth and the welfare of Indonesia. Simulation 1 is larger than Simulation 2. However, Indonesia can use the modalities similar with Vietnam-EU PCA modalities as the basis of the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) negotiations because the difference is not significant.

Keywords: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), Liberalization, Trade in Goods

DDC: 382.5 ALH k

Aditya P.Alhayat
The Center for Foreign Trade Policy,
Ministry of Trade of the Republic of
Indonesia

*The Ineffectiveness of Anti-Dumping Policy
in Indonesian Steel Import: A Preliminary
Study*

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11
No.2 Desember 2017, Page 143-168

Although Indonesia has imposed anti-dumping measures on several types of steel products, the import of steel products is still increasing. One possible cause is that imports are made by non-substantial modification of product or through a third country which is not subject to anti-dumping measures, which is generally referred as circumvention practice. This study is aimed to prove that circumvention made

Indonesian anti-dumping actions on the steel products ineffective. This also study provides recommendation for a best practice for other countries so that Indonesia's anti-dumping policy can be more effective. Circumvention was analyzed by comparing trade patterns between before and after the imposition of anti-dumping duty using secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Global Trade Information Services (GTIS). The results of the analysis indicate that circumvention became the reason why Indonesian anti-dumping measures on imported steel products are ineffective. Therefore, it is very important for the Government of Indonesia to immediately make amendments to the Government Regulation No. 34/2011 on Antidumping, Countervailing, and Safeguard Measures by adopting clauses of anti-circumvention. This can be done by covering the forms/types and procedures of action, as has been implemented by several countries such as the US, EU, Australia, and India.

Keywords: Anti-Dumping, Circumvention, Steel Product

DDC: 382.6 BAD p

Aziz Muslim
The Center for Foreign Trade Policy,
Ministry of Trade of the Republic of
Indonesia

*Determinant and Tariff Equivalent of Import
in Finance and Insurance Service in RCEP
Countries*

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11
No.2 Desember 2017, Page 169-186

Some researchers found that indirect export could contribute to increase trade. Likewise, Indonesian policy maker believes that changes of indirect export to direct export

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Accredited No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

The abstract sheet may reproduced/copied without permission or charge

will contribute to increase Indonesian export. The purpose of this study is to identify the importance of indirect export for Indonesia especially to indentify Indonesian indirect export countries and products, and also to find out the reason of exporters in doing indirect export. This study used indirect export identified process method of Indonesian trade data with trading partners from 2009 to 2013 from UN-Comtrade. The result shows that Malaysia, Thailand, Vietnam as intermediary country for Indonesia besides the conventional intermediary countries (Singapore, Hong Kong, Netherlands, and Germany). Indirect export process is optional for exporters. Indirect export countries have a positive role to facilitate exports for exporters with some limitations. The Government need to push the indirect export if it is profitable for business. On the other hand, If indirect export is an obstacle, it can be reduced by increasing the effectiveness of the role of the Attache and ITPC to give import market information.

Keywords: Indirect Export, Intermediary Country, Re-export, Entrepot Trade

DDC: 658.022 FIT d

Fitria Faradila, Hasni
The Center for Foreign Trade Policy,
Ministry of Trade of the Republic of
Indonesia

*Determining Priority Products of Small
Medium Enterprises for Export Through
Trading Houses*

**Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11
No.2 Desember 2017, Page 187-206**

*One of the efforts to accelerate Indonesian
exports can be done through increasing
small and medium enterprises (SMEs)
which is a strategic approach. SMEs are*

*able to survive in the domestic and global
economic crisis even though they
experienced some obstacles in getting an
access to international market. Trading
House could be a solution in overcoming
the SMEs difficulties. This study aims to
establish priority criteria of potential export
products as well as priority of export
products of SMEs through Trading House.
This study utilized both secondary data
coming from BPS and primary data from
Focus Group Discussion (FGD), and used
Analytical Network Process (ANP) method.
The ANP is aimed to give the best solution
of the problem since it considers two way
interactions between elements or clusters
(feedback). The results show that the
priority criteria for determining Trading
House products include the share of
exports, world imports and the availability of
local raw materials. Trading House priority
products are jewelry and accessories,
furniture, processed foods, textile and
garment products, essential oils
(aromatherapy spa products). The
government must immediately build a
comprehensive Trading House and
socialize its functions to business players,
especially SMEs.*

*Keywords: Trading House, export, SMEs,
ANP Methods*

DDC: 664.3 WIS i

**Wisnu Winardi, Hadi Susanto, Kadim
Martana**
Statistics Indonesia, Ministry of
Environment and Forestry of the Republic of
Indonesia

*The Impact of World CPO Price Change
Towards Prices, Economic Activities, and
Income Distribution in Indonesia*

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Accredited No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

The abstract sheet may reproduced/copied without permission or charge

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11
No.2 Desember 2017, Page 207-226

This paper analyzes the impact of world CPO change price towards prices, economic activities, and household income distribution using CGE Models. The first model assumes that Indonesia is a price taker, while the second model assumes that Indonesia could influence the price. The main data were taken from Indonesian Social Accounting Matrix 2008. The simulation results suggest that if Indonesia takes the role as a price taker, an increase in world CPO price will affect exchange rate, decrease prices, and improve economic activities, but it slightly worsened household income distribution. On the other hand, a decrease in world CPO price will bring about the opposite impacts respectively. Conversely, if Indonesia takes the role as a main price influencer, world CPO price change will lead to a similar result with less magnitude impacts. These findings suggest that Indonesia should be able to take the role as a price taker when world CPO price is increasing and as a main price influencer when world CPO price is decreasing.

Keywords: CPO world price, CGE models, Price taker, Price influencer

DDC: 633.73 NIA I

Nia Rosiana, Rita Nurmalina, Ratna Winandi, Amzul Rifin
Bogor Agricultural University, West Java, Indonesia

The Level of Comparative Advantages of World Main Coffee Producers

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.11
No.2 Desember 2017, Page 227-246

The rate of world coffee production growth tends to decrease compared to the growth rate of world coffee consumption. This is due to the decline of coffee production in some major producing countries. This has an impact on the quantity of exported coffee to meet the demand of world's coffee. This paper analyzed the level of competition among major producing countries in five periods of time using the analysis of RCA and DRCA. The results showed that during the period 2001-2003, the average growth of competitiveness among countries was found to be the highest compared to other periods. This was due to a significant increase in export from Honduras which affected the value of RCA. During the period 2012-2015, Colombia became a country that achieved the highest growth rate of competitiveness due to the significant increase in the number of export. Change in competitiveness can affect the export market position of a country. During the period 2012-2015, the decline in market share occurred in Vietnam, Ethiopia, India, Honduras, Guatemala, and Peru, while the increasing market share occurred in Brazil, Colombia, Indonesia, and Uganda. Indonesia's position in the world coffee in 2015 was at falling stars in which the coffee share in that country was higher than in the world market. Increased competitiveness will enhance the market share of a country that is supported by improvement of the technology, quality and productivity of coffee.

Keywords: Export of Coffee, Comparative Advantage, Coffee, Market Share

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Accredited No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

The abstract sheet may reproduced/copied without permission or charge

DDC: 658.83 BAD t

Rahayu Ningsih, Dwi Wahyuniarti
Prabowo
Center for International Trade Cooperation
Policy,
Center for Domestic Trade Policy,
Ministry of Trade of the Republic of
Indonesia

*The Level of Market Integration of Chicken
Broiler at Main Production Center: Case
Study East Java and West Java*

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan,
Vol.11 No.2 Desember 2017, Page 247-
270

*As one of the staple foods in Indonesia,
chicken broiler prices tend to increase and
experience price fluctuation. This high
price fluctuation generates disincentive for
the poultry sector that leads to business
uncertainty. This study analyzed vertical
market integration of chicken broiler at the
level of farmers-wholesalers and
wholesalers-retailers in the main*

*production centers (East Java and West
Java Province). The Ravallion model
approach was used to analyze price
transmission. The results of the analysis
concluded that there was no vertical
market integration at the farmers-
wholesalers level in both East Java and
West Java as well as at the level of
wholesalers-retailers in West Java.
However, for East Java there was a
vertical market integration in the
wholesalers-retailers level. Vertical price
disintegration reflects a tendency that
profit margins werenot well distributed in
the distribution chain. This study
recommended that increasing the
transmission of prices from retailers to
wholesalers and subsequently to the
farmers can be done through increasing
the access of market information by
providing facilities and infrastructure in the
form of online price information.*

*Keyword: Chicken Broiler, Ravallion,
Market Integration, Price Transmission*

ANALISIS DAMPAK LIBERALISASI PERDAGANGAN BARANG PADA PERUNDINGAN INDONESIA–EU CEPA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

An Impact Analysis on Trade Liberalization in Goods on Indonesia–EU CEPA on Indonesia's Economy

Steven Raja Ingot, Ridho Meyrandoyo

Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional, BPPP, Kementerian Perdagangan,
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat, 10110, Indonesia.
e-mail: sri.bako@gmail.com

Naskah diterima: 08/07/2017; Naskah direvisi: 21/10/2017; Disetujui diterbitkan: 28/12/2017
Dipublikasikan online: 31/12/2017

Abstrak

Uni Eropa (EU) merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia, namun pangsa pasar Indonesia di Uni Eropa masih di bawah beberapa negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2015, pangsa pasar Indonesia di Uni Eropa baru mencapai 0,37% masih berada di bawah pangsa pasar Thailand (0,48%), Malaysia (0,49%), dan Vietnam (0,74%) (Trademap 2017). Indonesia membutuhkan akses pasar untuk dapat meningkatkan pangsa pasar di Uni Eropa dan salah satunya adalah dengan melakukan liberalisasi perdagangan barang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak liberalisasi perdagangan barang terhadap perekonomian Indonesia dengan dua opsi, yaitu Simulasi 1 (SIM1) yaitu penghapusan tarif 100% untuk 4.945 pos tarif HS 6 digit. Simulasi 2 (SIM2) yaitu penghapusan tarif 100% kecuali untuk Uni Eropa sebanyak 260 pos tarif dan Indonesia sebanyak 235 pos tarif. Simulasi 2 digunakan untuk mempertimbangkan modalitas yang mirip dengan modalitas Vietnam-EU *Partnership and Cooperation Agreement* (Vietnam-EU PCA). Metode analisis yang digunakan adalah model *Computable General Equilibrium* (CGE) yang terdapat pada *Global Trade Analytical Project* (GTAP). Hasil analisis menunjukkan bahwa simulasi 1 memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan simulasi 2, karena tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia pada simulasi 1 lebih besar daripada simulasi 2. Namun demikian, Indonesia tetap dapat menggunakan modalitas sebagaimana dilakukan oleh kerjasama Vietnam-EU PCA sebagai dasar perundingan *Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-EU CEPA) karena selisihnya dikategorikan tidak terlalu besar.

Kata Kunci: *Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-EU CEPA), Liberalisasi, Perdagangan Barang

Abstract

European Union (EU) is one of the main destinations of Indonesian export; however, the Indonesia's market share has been left behind compared to some other ASEAN countries. In 2015, Indonesia's market share in the EU has reached only 0.37%, which was still left behind from the market share of Thailand (0.48%), Malaysia (0.49%) and Vietnam (0.74%) (Trademap, 2017). Indonesia requires a market access to increase market share in the EU, for instance by liberalizing trade in goods. This study aims to analyze the impact of liberalization of trade in goods on the Indonesian economy with two options: Simulation 1 (SIM 1) by reducing tariff 100% for 4,945 tariff lines based on HS 6 digits, and Simulation 2 (SIM 2) by reducing 100% tariffs except 260 tariffs lines of EU and 235 tariff lines of Indonesia. Simulation 2 was conducted to consider the similiar modalities undertaken by Vietnam-EU Partnership and Cooperation Agreement (Vietnam-EU PCA). The analytical methods used Computable General Equilibrium (CGE) model in the Global Trade Analytical

Project (GTAP). The result shows that simulation 1 gives a better impact compared to simulation 2, as the level of economic growth and the welfare of Indonesia. Simulation 1 is larger than Simulation 2. However, Indonesia can use the modalities similar with Vietnam-EU PCA modalities as the basis of the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) negotiations because the difference is not significant.

Keywords: *Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), Liberalization, Trade in Goods*

JEL Classification: F12, F13, F15

PENDAHULUAN

Uni Eropa merupakan salah satu negara tujuan utama dan menjadi pasar tradisional Indonesia. Pada tahun 2014, 28 negara anggota EU menghasilkan Pendapatan Domestik Bruto sebesar USD 18,5 Triliun dan merupakan importir produk barang terbesar kedua di dunia dengan nilai impor sebesar USD 2.235 Miliar (Gosper, 2017). Namun, pangsa pasar Indonesia di Uni Eropa masih sangat kecil dibandingkan dengan seluruh negara yang melakukan ekspor ke Uni Eropa. Pangsa pasar Indonesia di Uni Eropa baru berkisar 0.37% pada tahun 2015, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya pangsa pasar Thailand dan Malaysia sekitar 0.48% dan 0.49% bahkan Vietnam sudah mencapai 0.74% (Trademap, 2017). Secara keseluruhan pemasok utama Uni Eropa adalah Tiongkok, Jepang, Korea dan India masih jauh lebih besar ke Uni Eropa dibandingkan dengan ASEAN.

Berdasarkan teori perdagangan bebas disebutkan bahwa perdagangan bebas dapat memberikan kontribusi positif bagi perkenomian suatu negara, diantaranya membuat harga barang dan jasa lebih murah; meningkatkan daya saing dan mendorong inovasi suatu negara. Menurut Itakura (2014), pengurangan hambatan perdagangan akan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi suatu negara.

Pada tahun 1947 *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang pada tahun 1993 berubah menjadi *World Trade Organization* (WTO) dibentuk dengan tujuan mengurangi hambatan perdagangan dan membuat sistem perdagangan internasional yang saling menguntungkan antara mitra dagang. WTO berhasil membuat sistem perdagangan yang diterima seluruh anggotanya namun semenjak putaran Doha tahun 2001 WTO kurang dapat bergerak maju (Baldwin, 2016) sehingga negara-negara banyak

melakukan perjanjian bilateral seperti halnya beberapa negara ASEAN yaitu Singapura dan Vietnam yang telah menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Saat ini, produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa masih belum terdiversifikasi ke dalam industri manufaktur. Produk ekspor utama masih didominasi oleh produk hasil alam yang belum banyak melalui proses produksi misalnya *palm oil* (HS 1511.90), *palm oil crude* (HS 1511.10), dan *palm kernel* (HS 1513.29), produk migas dan gas alam, produk karet alam (HS 4001.22) dan ban (HS 4011.10), udang (HS 0306.11), beberapa produk kimia dan beberapa produk olahan hasil tambang (*copper* dan *tin*). Produk hasil industri Indonesia yang memiliki nilai ekspor tinggi ke Uni Eropa masih terbatas pada produk sepatu (Trademap, 2017). Sementara menurut Vanhnalat et.al (2015) apabila suatu negara ingin memaksimalkan manfaat dari perjanjian perdagangan bebas maka negara tersebut sebaiknya mendiversifikasikan produk ekspor mereka.

Data tahun 2015 menunjukkan bahwa dua puluh produk ekspor utama Indonesia ke Uni Eropa dalam HS 6

digit sebesar USD 86,5 miliar sudah mewakili 55,8% total ekspor Indonesia ke Uni Eropa (Trademap, 2017). Oleh karena itu, Indonesia saat ini tengah melakukan proses perundingan dalam kerangka *Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Indonesia-EU CEPA) untuk dapat meningkatkan pangsa pasar, transfer teknologi dan menciptakan perdagangan yang lebih stabil antara Indonesia dan Uni Eropa (Manurung, 2016).

Proses persiapan perundingan berlangsung semenjak 2011. Pertemuan terakhir yang ke 12 dilaksanakan pada Maret 2017 di Jenewa yang membahas isu-isu seperti akses pasar perdagangan barang dan jasa, investasi, *cooperation* dan *capacity building*, *intellectual property rights*, kepabeanan dan fasilitasi perdagangan dan perundingan.

Kemungkinan Modalitas

Negosiasi di perdagangan barang akan berkisar pada 235 pos tarif untuk pihak Indonesia dan 260 pos tarif untuk pihak Uni Eropa. Uni Eropa tidak memiliki pola yang sama untuk meng-*exclude* suatu produk dari suatu perjanjian perdagangan bebas.

Uni Eropa akan sulit untuk memberikan produk-produk yang menjadi *request* Kementerian Pertanian Indonesia. Dasar utama penolakan atas potensi *request* Indonesia adalah perlindungan konsumen. Uni Eropa akan mengacu pada Perjanjian WTO yang tercantum pada *Agreement on SPS*. Tetapi Uni Eropa lebih fleksibel untuk bergerak.

Modalitas yang kemungkinan akan menjembatani perbedaan Indonesia dan Uni Eropa adalah modalitas Vietnam EU PCA. Modalitas ini dapat dijadikan *benchmark* bagi Indonesia karena selain perjanjian ini terbilang masih baru, *entry into force* pada tahun 2016, dan Vietnam merupakan sesama negara anggota ASEAN yang memiliki komposisi produk ekspor utama yang relatif sama dengan Indonesia antara lain tekstil, sepatu dan kopi (*European External Action Service*). Vietnam-EU PCA memberikan fleksibilitas berupa beberapa pos tarif dapat diliberalisasi 10 tahun setelah *take entry into force*. Produk-produk tersebut akan menjadi 0% setelah 10 tahun perjanjian itu dijalankan. Apabila modalitas ini digunakan maka Uni Eropa dapat melakukan reservasi hingga 10 tahun

untuk 235 pos tarif *request* Indonesia dan Indonesia dapat melakukan hal yang sama untuk 260 pos tarif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Indonesia perlu segera membuka perdagangannya dengan Uni Eropa untuk meningkatkan pangsa pasar. Selain itu, negara pesaing Indonesia, seperti Vietnam sudah terlebih dahulu memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, maka dari itu Indonesia perlu mengamankan pangsa pasar produk ekspornya ke Uni Eropa mengingat produk ekspor Vietnam relatif sama dengan Indonesia. Selain itu penurunan tarif secara bertahap juga harus diimbangi dengan kebijakan yang mampu mendukung peningkatan daya saing bagi sektor yang berdaya saing rendah (Laksani & Salam, 2016).

Pertanyaan pada analisis ini adalah bagaimana dampak liberalisasi perdagangan barang terhadap perekonomian Indonesia secara makro dan sektoral saat Indonesia dan Uni Eropa akan melakukan liberalisasi untuk 4.945 pos tarif HS 6 digit maupun saat Indonesia dan Uni Eropa akan meliberalisasi semua pos tarif menjadi 0% kecuali untuk 260 pos tarif

untuk Uni Eropa dan 235 pos tarif untuk Indonesia yang akan direservasi selama 10 tahun dengan *benchmark Vietnam European Union Partnership and Cooperation Agreement* (EU PCA). Analisis ini bertujuan mempelajari dampak liberalisasi perdagangan barang terhadap perekonomian dengan dua opsi, yaitu (i) liberalisasi 100% dari 4.945 pos tarif menjadi 0%; (ii) liberalisasi pos tarif menjadi 0% kecuali 260 pos tarif untuk Uni Eropa dan 235 pos tarif untuk Indonesia yang akan direservasi selama 10 tahun.

Pembahasan akan dibatasi pada perjanjian WTO dan Komitmen Indonesia dengan Uni Eropa; perjanjian perdagangan barang (*trade in goods*) meliputi *Rules of Origin* (ROO), *custom procedure*, *Sanitary and Phytosanitary* (SPS), *Technical Barriers to Trade* (TBT), dan *trade remedies* untuk *Free Trade Agreement* (FTA) Indonesia dengan mitra dagang berikut komitmennya; serta kinerja perdagangan barang Indonesia dan Uni Eropa.

METODE

Saat ini keterkaitan perdagangan yang terjadi sangat tinggi

antara satu negara dengan yang lain sehingga perubahan kebijakan perdagangan suatu negara berpeluang besar berdampak pada ekonomi dunia keseluruhan sehingga *Global Trade Analytical Project* (GTAP) merupakan alat analisis yang sesuai untuk digunakan (Roy & Mathur, 2016). Model GTAP adalah model ekonomi keseimbangan umum (*Computable General Equilibrium* (CGE)) dengan banyak negara dan banyak komoditas (Oktaviani & Puspitawati, 2017). Seperti model CGE lainnya, di dalam model GTAP dijelaskan keterkaitan antar agen-agen ekonomi dan komponen-komponen permintaan akhir di suatu negara dan antar negara. Penekanan GTAP terletak pada keterkaitan perekonomian secara keseluruhan, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan suatu negara terhadap perekonomian sektoral maupun makro di negara tersebut dan negara lainnya.

Pada model GTAP secara eksplisit dilakukan permodelan dalam margin transportasi internasional. Suatu global bank juga dibentuk dalam model sebagai intermediasi dari investasi dan tabungan dunia. Sistem

permintaan konsumen diduga dengan menggunakan *Constant Difference of elasticities* (CDE) untuk menangkap kepekaan terhadap perbedaan harga dan pendapatan antar negara (Hertel, 1994). Selain itu, aliran barang dalam perdagangan internasional mengikuti model Armington (1969) dimana setiap produk dibedakan berdasarkan asal negara. Setiap komoditas impor diasumsikan bersubstitusi tidak sempurna satu sama lainnya dengan komoditas yang diproduksi di dalam negeri. Dengan asumsi ini, model dapat menangkap aliran perdagangan antar dua negara.

Kelemahan model ini adalah mengasumsikan sistem pasar

persaingan sempurna dan skala usaha yang konstan pada aktivitas produksi. Hertel (1994) mengakui bahwa pada konteks negara kecil dan terbuka, asumsi pasar persaingan sempurna mengakibatkan simulasi dampak penurunan tarif menjadi lebih besar dari yang sesungguhnya. Model GTAP standar diolah dengan menggunakan software RunGTAP. Proses agregasi sektor dan negara/ wilayah dilakukan dengan menggunakan GTAPAgg. Proses pengolahan data dengan RunGTAP akan dilakukan dengan melakukan penyesuaian *closure* dan *shock* sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 1. Agregasi Negara Indonesia- EU CEPA pada GTAP Versi 9

No	New region code	Comprising	New region description
1	Oceania	Aus nzl xoc	Australia, New Zealand
2	EastAsia	Chn hkg jpn kor mng twt xea bm	East Asia
3	SEAsia	Khm idn lao mys phl sgp tha vnm xse	Southeast Asia
4	SouthAsia	Bgd ind npl pak ika xsa	South Asia
5	NAmerica	Can usa mex xna	North America
6	LatinAmer	Arg bol bra chl col ecu pry per ury ven xsm cri gtm hnd ric pan slv xca dom jam pri tto xcb	Latin America
7	EU_28	Aut bel cyp cze dnc est fin fra deu grc hun irl ita lva ltu lux mlt nld pol prt svk svn esp swe gbr bgr hrv rou	European Union 28
8	MENA	Bhr irn isr jor kwt omn qat sau tur are xws egy mar tun xrf	Middle East and North Africa
9	SSA	Ben bfa cmr civ gha gin nga sen tgo xwf xcf xac eth ken mdg mwi mus moz rwa tza uga zmb zwe xec bwa nam zaf xsc	Sub-Saharan Africa
10	RestofWorld	Che nor xef alb blr rus ukr xee xer kaz kgz xsu arm aze geo xtw	Rest of World

Sumber: GTAP Versi 9 Output (diolah)

Penyelesaian bagian ini meliputi file solusi (*solution file*), perubahan volume (*volume changes*) dan dekomposisi (*decomposition*). Untuk penelitian ini agregasi negara

dilakukan menjadi 11 kelompok dan berdasarkan 57 sektor dalam GTAP versi 9 sebagaimana tersaji pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 2. Agregasi Sektor untuk Negara Indonesia- EU CEPA pada GTAP Versi 9

No	Kode	Deskripsi	No	Kode	Deskripsi
1	pdrr	Paddy rice	30	Lum	Wood products
2	wht	Wheat	31	Ppp	Paper products, publishing
3	gro	Cereal grains nec	32	P_c	Petroleum, coal, products
4	V_f	Vegetables, fruits, nuts	33	Crp	Chemical, rubber, plastic prods
5	Osd	Oil sedds	34	Nmm	Mineral products nec
6	C_b	Sugar cane, sugar beet	35	i-s	Ferrous metals
7	pfb	Plant-based fibers	36	Nfm	Metal products
8	Ocr	Crops nec	37	Fmp	Motor vehicles and parts
9	Ctl	Cattle, sheep, goats, horses	38	Mvh	Transport equipment
10	Oap	Animal products nec	39	Otn	Transport equipment nec
11	Rmk	Raw milk	40	Ele	Electronic equipment
12	Wol	Wool, silk worn cocoons	41	Ome	Machinery and equipment nec
13	Frs	Forestry	42	Omf	Manufactures nec
14	Fsh	Fishing	43	Ely	Electricity
15	Coa	Coal	44	Gdt	Gas manufacture, distribution
16	Oil	Oil	45	Wtr	Water
17	Gas	Gas	46	Cns	Construction
18	Omn	Minerals nec	47	Trd	Trade
19	Cmt	Meat:cattle, goats, sheep, horse	48	Otp	Transport nec
20	Omt	Meat products nec	49	Wtp	Sea transport
21	Vol	Vegetables oils and fats	50	Atp	Air transport
22	Mil	Dairy productsofi	51	cmn	Communication
23	Pcr	Processed rice	52	Ofi	Financial service nec
24	Sgr	Sugar	53	Isr	Insurance
25	Ofd	Food products nec	54	Obs	Bussiness service nec
26	B_t	Beverages and tobacco products	55	Ros	Recreation and other services
27	Tex	Textiles	56	Osg	pubAdmin/Defence/Health/educat
28	Wap	Wearing apparel	57	Dwe	Dwellings
29	Lea	Leather product			

Sumber: GTAP Versi 9 Output (diolah)

Penelitian ini menggunakan GTAP versi 9 yang dirilis pada tahun 2015 dikarenakan versi ini sudah disempurnakan dari versi sebelumnya dengan pembagian region menjadi 140 region, 57 sektor dan tahun referensi

2004, 2007 dan 2011 (Aguiar, Narayanan & McDougall, 2016)

Studi ini belum mengakomodasi Brexit atau keluarnya United Kingdom dari Uni Eropa. Studi ini akan mengagregasikan 57 sektor untuk

mengakomodasi semua detail yang ada. Agregasi sektor yang lebih detail diharapkan dapat mengakomodasi interaksi sektor lebih mendalam dan komprehensif.

Simulasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- Simulasi 1 (SIM1) yaitu penghapusan tarif 100% untuk 4.945 pos tarif HS 6 digit.
- Simulasi 2 (SIM2) yaitu penghapusan tarif 100% kecuali untuk Uni Eropa sebanyak 260 pos tarif dan Indonesia sebanyak 235 pos tarif yang akan direservasi selama 10 tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dampak Skema Indonesia-EU CEPA terhadap ekonomi makro dan sektoral Indonesia

Komponen makroekonomi dapat dilihat dari kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi (GDP riil), neraca perdagangan dan Investasi sedangkan sektoral Indonesia dapat dilihat dari produksi, dan pendapatan faktor produksi.

Dampak terhadap Kesejahteraan

Dilihat dari makroekonomi global, liberalisasi I-EU CEPA ini akan mensejahterakan sebagian besar kawasan di dunia khususnya

kesejahteraan Indonesia dan EU meningkat. Kesejahteraan dalam GTAP sebenarnya disusun dari kemampuan suatu perekonomian kawasan menyajikan akses terhadap konsumsi dan meningkatkan pendapatan.

Kesejahteraan Indonesia akan mengalami kenaikan sebesar USD 824.56 juta dengan SIM1. Kenaikan kesejahteraan sebesar USD 824 juta berarti konsumen mendapatkan akses terhadap barang dan jasa lebih besar dan pendapatan konsumen jauh lebih besar dengan adanya liberalisasi.

Tabel 3. Dampak Indonesia-EU CEPA Terhadap Kesejahteraan (USD Juta)

No	Negara	Sim 1	Sim 2
1	Oceania	10.54	19.96
2	Indonesia	824.56	734.76
3	EastAsia	(578.08)	(575.14)
4	SEAsia	(211.08)	(204.38)
5	SouthAsia	(199.78)	(176.54)
6	Namerica	(66.96)	(60.80)
7	LatinAmer	(3.57)	18.32
8	EU_28	481.19	478.57
9	MENA	7.16	7.65
10	SSA	6.33	8.10
11	<i>RestofWorld</i>	17.14	17.11

Sumber: GTAP versi 9 Output (diolah)

Hasil simulasi menunjukkan bahwa mekanisme reservasi (SIM2) menghasilkan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan kesejahteraan ketika tidak ada reservasi (SIM1). Reservasi mengakibatkan konsumen dan produsen harus menanggung tingkat harga yang relatif

lebih mahal pada jangka waktu tertentu sehingga konsumen akan mengalami penderitaan selama reservasi diterapkan.

Kesejahteraan Uni Eropa ternyata juga menunjukkan arah yang sama. Kenaikan kesejahteraan juga dialami sebagai akibat adanya liberalisasi I-EU CEPA. Kesejahteraan pada modalitas tanpa reservasi (SIM1) lebih besar dibandingkan dengan kesejahteraan dengan reservasi (SIM2). Uni Eropa dan Indonesia akan mendorong untuk menggunakan modalitas tanpa reservasi (SIM1) karena tingkat kesejahteraan yang akan dialami akan lebih tinggi dibandingkan dengan reservasi (SIM2).

Namun, kesejahteraan Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kesejahteraan Uni Eropa. Kesejahteraan yang didapatkan Indonesia sebesar dua kali lipat kesejahteraan yang didapatkan oleh Uni Eropa. Kesejahteraan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan Uni Eropa karena hambatan perdagangan Indonesia di Uni Eropa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hambatan perdagangan Uni Eropa di Indonesia. Liberalisasi terhadap hambatan perdagangan Indonesia yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Uni Eropa akan berakibat meningkatkan surplus

konsumen Indonesia jauh lebih besar dibandingkan surplus konsumen Uni Eropa.

Dalam negosiasi peran kompromi akan sangat besar sehingga mencapai *first best condition* akan sangat sulit. Berdasarkan estimasi CGE tersebut, *first best solution* bagi kedua belah pihak adalah tanpa reservasi. Tetapi dorongan lobby politik dan fobia liberalisasi pasti akan besar sehingga kecenderungan untuk memilih pilihan dengan reservasi akan sangat besar terjadi. Bagi Indonesia, pilihan dengan reservasi masih memberikan kesejahteraan yang positif sehingga apabila pilihan diambil maka Indonesia masih mendapatkan keuntungan.

Suatu mekanisme liberalisasi secara regional atau bilateral melalui pemberian preferensi akan mengakibatkan munculnya *trade diversion* dan *trade creation* (Viner, 1950). Urata (2008) menjelaskan bahwa mekanisme *Regional Trade Agreement* (RTA) akan mendorong multilateralisme selama dilakukan dengan konsep WTO plus karena suatu negara akan berupaya menyelamatkan akses pasar dan kesejahteraan konsumennya. Maraknya RTA di Asia Timur karena didorong oleh *competitive regionalism*.

SIM1 dan SIM2 menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu apabila baik

Indonesia maupun Uni Eropa mengadopsi modalitas tanpa reservasi maupun dengan reservasi, maka kesejahteraan konsumen di East Asia, South East Asia, South Asia, North America, dan Latin America akan cenderung menurun. Kemungkinan besar negara-negara di kawasan tersebut akan menjalin kerjasama dengan Uni Eropa dan Indonesia setelah adanya I-EU CEPA untuk menyelamatkan pangsa pasarnya di Uni Eropa dan Indonesia.

Berdasarkan simulasi tersebut, I-EU CEPA sangat berarti untuk mendorong liberalisasi di dunia. Indonesia merupakan sentral di Asia Tenggara dan Uni Eropa memiliki posisi strategis dalam perdagangan dunia. Perjanjian I-EU CEPA ini akan mendorong berjalannya *Regional Cooperation Economic Partnership* (RCEP) agar negara-negara di Asia Timur untuk menyelamatkan pangsa pasarnya di Indonesia yang mulai terancam oleh Uni Eropa. Selain itu, dorongan untuk mensukseskan dan menyelesaikan *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP) akan sangat besar dengan adanya I-EU CEPA. Amerika Serikat akan berusaha

menyelamatkan pangsa pasarnya dengan mempercepat TTIP agar pangsa pasarnya di Uni Eropa terselamatkan.

Apabila *competitive regionalism* memang terjadi, maka liberalisasi di Asia Pasifik dan kawasan dunia lainnya secara keseluruhan akan terjadi. Daya saing dan peningkatan produktivitas menjadi sangat penting karena tren liberalisasi sudah tidak dapat dihindari lagi untuk dapat berperan penting dalam perdagangan internasional dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari perdagangan internasional.

Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur sebuah kebijakan ekonomi yang diambil. Kekhawatiran bahwa Indonesia akan hancur dengan serbuan impor dan membuka diri akan menurunkan kemampuan Indonesia untuk meningkatkan diri tidak sepenuhnya benar. Dampak kerjasama perdagangan internasional dengan mengikatkan diri pada perjanjian perdagangan bebas belum tentu menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4. Dampak Indonesia-EU CEPA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

No	Negara	SIM1 (%)	SIM1 (USD Juta)	SIM2 (%)	SIM2 (USD Juta)
1	Oceania	(0.00)	(2.63)	(0.00)	(1.13)
2	Indonesia	0.04	302.56	0.03	278.13
3	EastAsia	(0.00)	(120.00)	(0.00)	(121.00)
4	SEAsia	(0.00)	(30.25)	(0.00)	(30.38)
5	SouthAsia	(0.00)	(78.00)	(0.00)	(62.25)
6	Namerica	-	(8.00)	-	(8.00)
7	LatinAmer	(0.00)	(6.00)	-	(1.50)
8	EU_28	0.0013	222.00	0.0012	206.00
9	MENA	-	-	-	(0.25)
10	SSA	-	(0.13)	-	0.25
11	RestofWorld	0.00	9.00	0.00	7.50

Sumber: GTAP versi 9 output (diolah)

Tabel 4 menunjukkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi baik dengan skenario SIM1 (tanpa reservasi) maupun SIM2 (dengan reservasi). Secara persentase pertumbuhan ekonomi maupun absolut, Indonesia dan Uni Eropa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Indonesia dan Uni Eropa akan mengalami realokasi sumber daya dari sektor yang tidak efisien ke sektor yang efisien. Produksi untuk sektor efisien dan memiliki produktivitas tinggi otomatis akan meningkatkan Produk Domestik Bruto suatu negara sehingga pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tanpa liberalisasi (Obsfeld & Krugman, 2003).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat sebesar 0,04 butir persentase dengan SIM1 dan sebesar 0,03 butir persentase dengan SIM2. Secara absolut, Indonesia akan menciptakan tambahan PDB sebesar USD 302 juta dengan modalitas tanpa reservasi dan hanya menciptakan tambahan PDB sebesar USD 278 juta dengan reservasi. Reservasi memberikan dampak jauh lebih buruk bagi Indonesia. Realokasi yang terjadi tidak seluruhnya mencerminkan sektor yang efisien karena masih ada beberapa sektor yang direservasi. Produktivitas sektor tersebut akan mengalami proses peningkatan yang tertunda dan realokasi menuju sektor yang efisiensi tidak akan sempurna apabila tanpa reservasi.

Pertumbuhan ekonomi Uni Eropa akan meningkat sebesar 0,0013 butir persentase dengan SIM1 dan sebesar 0.0012 butir persentase dengan SIM2. Pertumbuhan Uni Eropa juga mengalami proses yang lebih buruk dengan adanya reservasi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih buruk ini disebabkan oleh kurang sempurnanya proses realokasi sumber daya yang tertunda karena adanya reservasi. Reservasi akan mengakibatkan produktivitas dan efisiensi tidak meningkat secara sempurna.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat jauh lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi Uni Eropa baik dengan skenario SIM1 (tanpa reservasi) maupun skenario SIM2 (dengan reservasi). Pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih besar karena hambatan perdagangan di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan Uni Eropa. Eliminasi terhadap hambatan perdagangan di Indonesia akan jauh berdampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dibandingkan hal yang sama dilakukan di Uni Eropa.

Indonesia diuntungkan secara ekonomi dengan menjalin I-EU CEPA. Tingkat pertumbuhan ekonomi kedua negara dengan tanpa reservasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan reservasi. Tetapi keuntungan secara ekonomi terkadang menjadi pilihan kedua sehingga negosiasi lebih mengarah pada pentingnya reservasi dalam modalitas untuk memberikan perlindungan sesaat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di kedua negara harus didukung oleh peningkatan riset dan pengembangan produk, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan stabilitas nilai tukar (Ginting, 2017).

Dampak Terhadap Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan menjadi indikator yang sangat penting. Banyak pandangan yang menyatakan bahwa ekspor dipandang baik dan impor dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Namun implikasi yang lebih luas perlu diperhatikan seperti dampak pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Tabel 5. Dampak Indonesia - EU CEPA Terhadap Neraca Perdagangan (USD Juta)

No.	Negara	SIM1	SIM2
1	Oceania	18,41	14,28
2	Indonesia	(743,31)	(755,98)
3	East Asia	435,26	443,94
4	South East Asia	172,16	165,13
5	South Asia	88,78	88,99
6	North America	187,97	188,68
7	Latin America	34,56	24,27
8	European Union	(288,01)	(271,49)
9	Middle East and North Africa	36,27	40,49
10	Sub-Saharan Africa	10,18	10,88
11	Rest of the World	47,75	50,82

Sumber: GTAP versi 9 output (diolah)

Indonesia diekspektasikan akan mengalami tambahan defisit neraca perdagangan dengan dunia sebesar USD 743 juta dengan SIM1 (tanpa reservasi) dan sebesar USD 755 (dengan reservasi). Indonesia akan sangat diuntungkan apabila pelaksanaan liberalisasi oleh Uni Eropa dilakukan tanpa reservasi. Reservasi justru menghasilkan defisit yang lebih besar karena sektor yang diliberalisasi untuk impor tidak terkompensasi oleh ekspor Indonesia dengan sempurna.

Uni Eropa diekspektasikan akan mengalami tambahan defisit neraca perdagangan dengan dunia sebesar USD 288 juta dengan SIM1 (tanpa reservasi) dan sebesar USD 271 juta dengan SIM2 (dengan reservasi). Uni

Eropa mengalami defisit neraca perdagangan yang lebih kecil dengan reservasi dibandingkan dengan defisit neraca perdagangan tanpa reservasi.

Uni Eropa akan mendorong adanya reservasi dan Indonesia akan mendorong terjadinya tanpa reservasi. Kompromi akan terjadi dengan mengadopsi reservasi. Apabila reservasi (SIM2) yang disepakati, dampak kerugian Indonesia tidak begitu besar karena tingkat penambahan defisit akan menjadi sebesar USD 12 juta.

Dampak Terhadap Investasi

I-EU CEPA akan dilengkapi dengan negosiasi untuk investasi. Skenario SIM1 (tanpa reservasi) dan SIM2 (dengan reservasi) memberikan angka yang positif untuk dampak terhadap investasi baik untuk Indonesia maupun Uni Eropa. Indonesia akan mengalami peningkatan investasi sebesar 0,42 butir persentase dengan SIM1 dan 0,41 butir persentase dengan SIM2. Reservasi ternyata menurunkan peningkatan investasi dibandingkan dengan tanpa reservasi bagi Indonesia. Investor yang tertarik terhadap beberapa sektor yang direservasi oleh Uni Eropa maka akan menunda investasi di Indonesia hingga

saat reservasi itu jatuh tempo sehingga investasi akan jauh lebih kecil dibandingkan tanpa reservasi.

Tabel 6. Dampak Indonesia-EU CEPA Terhadap Investasi (%)

No.	Negara	SIM1	SIM2
1	Oceania	-0.0043	-0,0026
2	Indonesia	0,4211	0,414
3	East Asia	-0,0133	-0,0134
4	South East Asia	-0,0661	-0,0636
5	South Asia	-0.0039	-0,0123
6	North America	-0,0037	-0,004
7	Latin America	-0,0039	-0,0023
8	European Union	0,0087	0,0083
9	Middle East and North Africa	-0,0052	-0,0055
10	Sub-Saharan Africa	-0,0026	-0,0027
11	Rest of the World	-0,0064	-0,0064

Sumber: GTAP versi 9 output (diolah)

I-EU CEPA akan memberikan kepada Uni Eropa dampak yang positif untuk mendatangkan investasi ke Uni Eropa. Investasi di Uni Eropa meningkat sebesar 0,0087 butir persentase dengan SIM1 (tanpa reservasi) dan sebesar 0,0083 butir persentase dengan SIM 2 (dengan reservasi). Reservasi ternyata menurunkan peningkatan investasi dibandingkan dengan tanpa reservasi bagi Uni Eropa juga. Investor yang tertarik terhadap beberapa sektor yang direservasi oleh Indonesia maka akan menunda investasi di Uni Eropa hingga saat reservasi itu jatuh tempo sehingga investasi akan jauh lebih

kecil dibandingkan tanpa reservasi. Apabila reservasi menjadi hasil kompromi negosiasi maka kedua negara masih diuntungkan dengan peningkatan investasi di kedua negara. Dengan adanya peningkatan investasi di Indonesia dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif terhadap perdagangan (Safitriani, 2014)

Dampak Terhadap Sektoral Indonesia

Dampak sektoral akan difokuskan pada pendapatan faktor produksi, dan alokasi faktor produksi. Dampak terhadap produksi pendapatan faktor produksi, dan alokasi faktor produksi digunakan untuk melihat sektor-sektor yang diuntungkan (*winner*) dan sektor-sektor yang dirugikan (*losers*).

Dampak Terhadap Produksi Indonesia

Proses liberalisasi akan berdampak pada produksi suatu kawasan yang terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas. Berdasarkan pertumbuhan produksi, sektor-sektor Indonesia yang akan dirugikan oleh adanya Indonesia EU CEPA baik menggunakan SIM1 (tanpa reservasi) dan SIM2 (dengan reservasi) adalah

sektor pertanian seperti padi (*paddy rice*); gandum (*wheat*); sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan (*vegetables, fruits, and nuts*), susu (*raw milk*), produk turunan susu (*dairy product*), dan gula (*sugar*). Penurunan produksi ini tidak disebabkan oleh serbuan impor tetapi lebih karena realokasi sumber daya dari sektor-sektor ini ke sektor-sektor yang dapat melakukan ekspor ke Uni Eropa. Sektor pertanian yang konsisten diuntungkan dengan I-EU CEPA baik dengan skenario SIM1 (tanpa reservasi) dan SIM2 (dengan reservasi) adalah sektor sereal (*Cereal grains nec*); tanaman berserat (*Plant-based fibers*); daging (Meat: *cattle, sheep, goats, horse*); wol dan sutra (*Wool, silk-worm cocoons*); produk turunan daging (*Meat products nec*); dan beras (*Processed rice*).

Sedangkan sektor pertanian yang diuntungkan dengan adanya I-EU CEPA dengan skenario SIM1 (tanpa reservasi) dan cenderung akan dirugikan dengan SIM2 (dengan reservasi) adalah minyak nabati (*vegetable oils and fats*). Uni Eropa akan menaruh sektor ini dalam daftar reservasi sehingga sektor ini akan dirugikan apabila I-EU CEPA

mengadopsi modalitas dengan mekanisme reservasi. Minyak nabati berupa *crude palm oil* (CPO) atau turunannya merupakan sektor yang berkontribusi paling besar di struktur ekspor Indonesia.

Reservasi akan memberikan manfaat lebih untuk sektor peternakan (*Cattle, sheep, goats, horses*) dan sektor produk logam (*metal product*). Kedua sektor ini akan dirugikan apabila Indonesia menyetujui modalitas tanpa reservasi. Sumber daya pada sektor ini akan berpindah ke sektor yang memiliki akses pasar lebih. Indonesia akan mereservasi sektor logam dan peternakan sehingga produksi sektor ini masih tetap akan tumbuh.

Sektor yang secara konsisten diuntungkan dengan SIM1 dan SIM2 adalah sektor kehutanan dan sektor perikanan. Kedua sektor tersebut tidak masuk dalam reservasi oleh kedua negara sehingga adanya reservasi tidak akan mengubah apakah sektor tersebut jadi yang diuntungkan atau dirugikan. Kedua sektor ini berpotensi akan diliberalisasi ketika perjanjian *entry into force*. Di lain sisi, sektor yang konsisten dirugikan oleh SIM1 dan SIM2 adalah sektor pertambangan

seperti batu bara (*coal*), minyak bumi (*oil*), gas, bensin (*Petroleum*), produk turunan batu bara (*coal products*). Sektor ini akan diliberalisasi oleh kedua negara karena tidak akan masuk dalam daftar reservasi sehingga tidak akan juga mengubah posisi sektor ini apa ada reservasi atau tidak.

Sektor manufaktur atau perindustrian yang konsisten dirugikan oleh I-EU CEPA baik dengan mekanisme SIM1 ataupun SIM2 adalah produk kayu (*Wood products*), produk kertas (*Paper products, publishing*), produk kimia, karet, dan plastik (*Chemical, rubber, plastic prods*), besi dan baja (*Ferrous metals*), logam lainnya (*Metals nec*), kendaraan bermotor dan komponennya (*Motor vehicles and parts*), alat-alat transportasi (*transport equipment nec*), peralatan dan mesin (*Machinery and equipment nec*), dan barang manufaktur lainnya (*Manufactures nec*).

Sektor manufaktur atau perindustrian yang konsisten diuntungkan oleh I-EU CEPA baik dengan mekanisme SIM1 ataupun SIM2 adalah produk makanan olahan (*Food products nec*), minuman dan

tembakau (*Beverages and tobacco products*), tekstil (*Textiles*), pakaian jadi (*Wearing apparel*), produk kulit (*Leather products*), produk tambang turunan (*mineral products nec*), alat-alat elektronik (*Electronic equipment*).

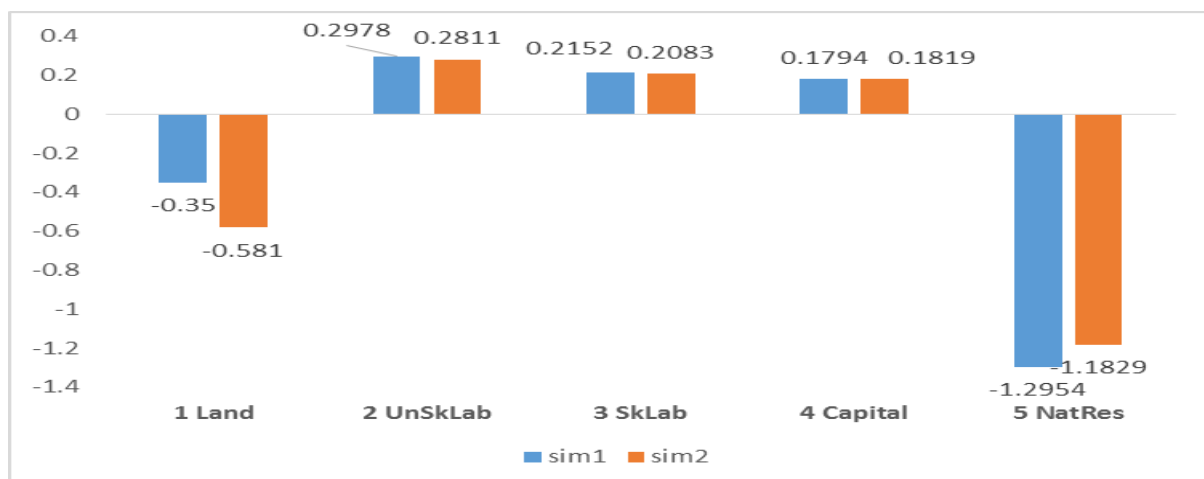
Produk-produk yang direservasi oleh Uni Eropa akan berakibat pada pola produksi Indonesia. Reservasi akan mengubah pola produksi Indonesia. Diversifikasi produksi akan terjadi dengan tergeraknya sector manufaktur di Indonesia. Sektor yang padat karya akan diuntungkan sangat besar dengan mekanisme I-EU CEPA baik dengan reservasi ataupun tidak. Komplementaritas produksi antara Uni Eropa dan Indonesia mendasari adanya realokasi sumber daya yang menggali efisiensi di kedua negara. Kedua negara akan berspesialisasi pada keunggulan komparatifnya dan akan cenderung tumbuh berkembang secara efisien.

Dampak Terhadap Pendapatan Pemilik Faktor Produksi Indonesia

Indonesia dan Uni Eropa memiliki tingkat komplementaritas yang sangat tinggi. Uni Eropa memiliki keahlian dan daya saing yang tinggi untuk manufaktur padat modal, padat teknologi tinggi dan jasa. Indonesia

memiliki daya saing yang tinggi untuk produk padat karya. Realokasi di Indonesia akan terjadi dari sektor yang padat sumber daya alam ke sektor manufaktur. Peningkatan pendapatan terlihat terjadi pada upah riil untuk tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*). Upah riil tenaga kerja tidak terampil ini akan meningkat baik dengan skenario tanpa reservasi (SIM1) maupun dengan reservasi (SIM2). Produk yang diuntungkan secara konsisten baik dengan SIM1 atau SIM2 adalah produk padat karya sehingga permintaan untuk tenaga kerja terampil juga akan meningkat

yang berujung pada peningkatan upah riil untuk tenaga kerja tidak terampil. Tenaga kerja tidak terampil dan terampil serta modal akan berjalan seiring sesuai dengan asumsi *constant return to scale* dalam fungsi produksi yang dipakai sebagai asumsi awal oleh Model CGE GTAP. Kenaikan permintaan akan tenaga kerja juga akan mendorong peningkatan permintaan pada modal. Harga modal akan meningkat 0,17 butir persentase dengan SIM1 dan 0,18 butir persentase dengan SIM2. Peningkatan permintaan modal juga akan berakibat pada kenaikan harga barang modal.



Gambar 1. Dampak Indonesia-EU CEPA Terhadap Pendapatan Pemilik Faktor Produksi

Sumber: GTAP Versi 9 output. (diolah)

Diversifikasi akan terjadi apabila I-EU CEPA diterapkan. Indonesia yang mengandalkan pada pertambangan

yang sangat padat tanah (*land-intensive*) dan padat sumber daya alam (*natural resources-intensive*).

Realokasi ini tentunya akan menurunkan permintaan pada tanah dan sumber daya alam sehingga pendapatan pemilik faktor produksi ini akan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan estimasi CGE-GTAP maka didapatkan bahwa, bagi Indonesia, simulasi 1 memberikan dampak kesejahteraan (USD 824,56 juta), pertumbuhan ekonomi 0.04 butir persentase, dan neraca perdagangan (USD -743.31 juta) yang jauh lebih baik dibandingkan dengan simulasi 2. Sebaliknya bagi Uni Eropa, simulasi 2 memberikan hasil yang lebih baik pada neraca perdagangan (USD -271.89 juta) daripada simulasi 1 (USD -288.01 juta).

Walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia pada simulasi 2 lebih kecil daripada simulasi 1, selisih penurunannya sangat kecil, yaitu untuk pertumbuhan ekonomi memiliki selisih sebesar USD 24 juta, sementara untuk kesejahteraan memiliki selisih sebesar USD 90 juta, sehingga apabila Uni Eropa meminta kepada Indonesia

untuk menggunakan modalitas dengan simulasi 2 tidak akan banyak berpengaruh bagi makroekonomi Indonesia.

Skenario simulasi 1 (tanpa reservasi) dan simulasi 2 (dengan reservasi) juga memberikan angka yang positif untuk dampak terhadap investasi baik untuk Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia akan mengalami peningkatan investasi sebesar 0,42% dengan simulasi 1 dan 0,41% dengan simulasi 2. Reservasi ternyata menurunkan peningkatan investasi dibandingkan dengan tanpa reservasi bagi Indonesia.

Berdasarkan simulasi menggunakan CGE GTAP, modalitas penghapusan tarif 100% untuk 4.945 pos tarif HS 6 digit (tanpa reservasi) dari pos tarif ketika *entry into force* tidak menguntungkan Uni Eropa karena defisit neraca perdagangannya lebih besar daripada menggunakan modalitas Vietnam-EU PCA. Sebaliknya bagi Indonesia, perbedaan dampak makroekonomi antara penggunaan modalitas penghapusan tarif 100% untuk 4.945 pos tarif HS 6 digit (tanpa reservasi) ketika *entry into force* dibandingkan dengan modalitas liberalisasi Vietnam EU PCA tidak

besar, sehingga Indonesia dapat menerima penggunaan modalitas Vietnam-EU PCA sebagai dasar perundingan I-EU CEPA.

Oleh karena itu, dari hasil simulasi GTAP dapat direkomendasikan bahwa Simulasi 1 lebih menguntungkan bagi Indonesia. Namun, opsi Simulasi 2 masih tetap dapat diterima oleh Indonesia, mengingat selisih yang diterima tidak jauh berbeda. Perlu adanya analisis lebih lanjut mengingat analisis ini belum mencakup dampak dari *trade facilitation*, *Non-Tariff Measures* (NTM), dan perdagangan jasa (*services*) dari perjanjian Indonesia – EU CEPA.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nur Rakhman Setyoko dan rekan-rekan pada Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional atas arahan dan buah pikiran yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian analisis ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aguiar, A., B. Narayanan, & R. McDougall. (2016). An Overview of the GTAP 9 Data Base. *Journal of Global*

Economic Analysis, Vol 1 (1), pp. 181-208

Armington, P.S. (1969). *A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production*. IMF Staff Papers, 16, pp. 159-178.

Baldwin, R (2016). The World Trade Organization and The Future of Multilateralism. *Journal of Economic Perspectives*, Vol.30 (1), pp. 95-116.

Ginting, A, M. (2017). Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 11 (1), pp.1-20.

Global Trade Analysis Project (GTAP) Versi 9. (2015). Purdue University.

Gosper, B (2017). *Australia, the European Union and the New Trade Agenda*. Canberra ANU Press. pp.233-254

Hertel, T.W. (1994). *Taking IMPACT Abroad: The Global Trade Analysis Project*. Paper presented at the IFAC Workshop on Computing in Economics and Finance, Amsterdam, June 8-10.

Itakura, K. (2014). "Impact of Liberalization and Improved Connectivity and Facilitation in ASEAN. *Journal of Asian Economics*. Volume 35, pp 1-106.

Krugman, P dan M. Obstfeld. (2003). *International Economic; Theory and Policy*, 6th Edition, New York: Addison Wesley

Laksani, D.D dan A. R. Salam. (2016). Perkiraan dampak ASEAN dan Hong Kong Free Trade Area (AHKFTA) Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 10 (2), pp.167-186.

Manurung, H. (2016). Improving Free Trade Agreement (FTA): A Study on the European Union (EU) – Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement

- (CEPA), 2012 – 2016. Working Paper Series School of International Relations President University.
- Oktaviani, R, dan E. Puspitawati (2017). *Teori, Model dan Aplikasi GTAP (Global Trade Analysis Project) di Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Institut Pertanian Bogor.
- Roy, M, dan S. K. Mathur (2016). Brexit and India-EU Free Trade Agreement. *Journal of Economic Integration*, Vol.31 (4) pp 740-773.
- Safitriani, S. (2014). Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment di Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 8 (1), pp.93-116.
- TradeMap. (2017). Diunduh pada 2017 i <http://www.trademap.com>.
- Urata, S. (2008). *Competitive Regionalism in East Asia*. Presented at the Symposium on “Competitive Regionalism: Strategic Dynamics of FTA negotiations in East Asia and Beyond” at Waseda University, Tokyo, Japan, May 30-31, 2008.
- Vanhnalat, B, P. Kyophilavong, A. Phonvisay, D. Sengsourivong. (2015). Assesment the Effect of Free Trade Agreements on Exports of Lao PDR. *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol.5 (2) pp 365-376.
- Viner, J. (1950). *The Custom Union Issue*, Oxford: Oxford University Press.

KETIDAKEFEKTIFAN KEBIJAKAN ANTI-DUMPING PRODUK IMPOR BAJA INDONESIA: SEBUAH ANALISIS AWAL

The Ineffectiveness of Anti-Dumping Policy in Indonesian Steel Import: A Preliminary Study

Aditya P. Alhayat

Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, BPPP, Kementerian Perdagangan-RI, Jl. M.I. Ridwan
Rais No.5 Jakarta Pusat 10110, Indonesia,
email: aditya.alhayat@kemendag.go.id

Naskah diterima: 08/07/2017; Naskah direvisi: 03/11/2017; Disetujui diterbitkan: 28/12/2017
Dipublikasikan online: 31/12/2017

Abstrak

Meskipun Indonesia telah mengenakan tindakan anti-dumping terhadap beberapa jenis produk baja, namun impor produk tersebut masih meningkat. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah importasi melalui produk yang dimodifikasi secara tidak substansial atau melalui negara ketiga yang tidak dikenakan tindakan anti-dumping, yang dalam perdagangan internasional umum disebut sebagai praktik *circumvention*. Studi ini ditujukan untuk membuktikan bahwa *circumvention* mengakibatkan tindakan anti-dumping atas impor produk baja Indonesia tidak efektif dan untuk memberikan masukan berdasarkan praktik di negara lain supaya kebijakan anti-dumping Indonesia lebih efektif. *Circumvention* dianalisis dengan membandingkan pola perdagangan antara sebelum dan setelah pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD) menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Global Trade Information Services (GTIS). Hasil analisis menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa *circumvention* mengakibatkan pengenaan tindakan anti-dumping impor produk baja di Indonesia menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah No. 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dengan memasukkan klausul tindakan anti-*circumvention* yang setidaknya mencakup bentuk-bentuk dan prosedur tindakan, sebagaimana yang telah dilakukan beberapa negara seperti: AS, EU, Australia, dan India.

Kata Kunci: Anti-Dumping, *Circumvention*, Produk Baja

Abstract

Although Indonesia has imposed anti-dumping measures on several types of steel products, the import of steel products is still increasing. One possible cause is that imports are made by non-substantial modification of product or through a third country which is not subject to anti-dumping measures, which is generally referred as circumvention practice. This study is aimed to prove that circumvention made Indonesian anti-dumping actions on the steel products ineffective. This also study provides recommendation for a best practice for other countries so that Indonesia's anti-dumping policy can be more effective. Circumvention was analyzed by comparing trade patterns between before and after the imposition of anti-dumping duty using secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Global Trade Information Services (GTIS). The results of the analysis indicate that circumvention became the reason why Indonesian anti-dumping measures on imported steel products are ineffective. Therefore, it is very important for the Government of Indonesia to immediately make amendments to the Government Regulation No. 34/2011 on Antidumping, Countervailing, and Safeguard Measures by adopting clauses of anti-circumvention. This can be done by covering the forms/types and procedures of action, as has been implemented by several countries such as the US, EU, Australia, and India.

Keywords: *Anti-Dumping, Circumvention, Steel Product*

JEL Classification: F13, F14, L61

PENDAHULUAN

Selama periode 2010-2013, Pemerintah Indonesia telah mengenakan tindakan anti-dumping terhadap empat jenis produk baja karbon, yaitu: Baja berbentuk H dan I (*H & I Section*), *Hot Rolled Coil* (HRC), *Hot Rolled Plate* (HRP), dan *Cold Rolled Coil/Sheet* (CRC). Namun demikian, masih banyak keluhan dari produsen baja di dalam negeri terkait dengan membanjirnya baja impor, terutama baja paduan (*alloy*) yang mengandung boron. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah pengalihan kode *Harmonized System* (HS) dari baja karbon yang dikenakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) menjadi HS baja paduan yang tarif bea masuknya lebih rendah. Dalam perdagangan internasional, praktik tersebut lazim disebut dengan istilah *circumvention*. Selain modifikasi secara tidak substansial suatu produk, *circumvention* juga mungkin dilakukan dengan melibatkan negara ketiga yang tidak dikenakan tindakan anti-dumping.

Sinyalemen kuat praktik *circumvention* sebagai penyebab mengapa tindakan anti-dumping Indonesia tidak sepenuhnya efektif juga terepresentasikan pada penelitian Alhayat (2014). Berdasarkan penelitian tersebut, tindakan anti-dumping Indonesia selama periode 1996-2010 secara agregat berpengaruh negatif terhadap kinerja keseluruhan impor produk pada saat investigasi, namun tidak mampu membendung peningkatan impor pada periode proteksi (masa tindakan anti-dumping diberlakukan). Terlebih lagi, kuantitas impor dari negara yang tidak dikenakan anti-dumping (*non-named country*) mengalami peningkatan setelah dikenakan BMAD. Hal tersebut setidaknya mengindikasikan adanya permintaan impor yang tinggi serta adanya efek pengalihan asal impor dari negara yang dikenakan anti-dumping (*named country*) ke negara yang tidak dikenakan anti-dumping.

Menurut Yu (2008), *circumvention* merupakan upaya penghindaran terhadap pengenaan bea masuk anti-dumping atau bea

masuk imbalan dengan memodifikasi atau merubah secara marginal bentuk fisik, produksi, atau jalur pengiriman produk yang terkena tindakan anti-dumping dan anti-subsidi dalam rangka memperlemah tujuan maupun efektifitas kompensasi (*remedies*) dalam kerangka WTO *Anti-dumping Agreement* dan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)*, dimana peraturan tersebut telah diundangkan (diratifikasi) dalam hukum nasionalnya. Secara umum, Vermulst (2012) mendefinisikan empat bentuk praktik *circumvention*, yaitu: (1) *Product alternation* atau *slightly modification*: ekspor produk dengan sedikit modifikasi; (2) *Importing country circumvention*: impor bagian-bagian untuk dirakit; (3) *Third-country circumvention*: *transshipment* atau ekspor produk dengan sedikit modifikasi melalui negara ketiga atau dirakit di negara ketiga; dan (4) *Lower duty rate company circumvention*: memanfaatkan perusahaan yang dikenakan bea masuk anti-dumping/anti-subsidi terendah sebagai sarana ekspor.

Meskipun tidak ada ketentuan khusus terkait anti-*circumvention* yang disepakati di *World Trade Organization*

(Bael & Bellis, 2011), namun beberapa negara anggota WTO seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (EU), Australia, dan India telah memiliki peraturan anti-*circumvention*. Sementara itu, landasan hukum tindakan anti-*circumvention* di Indonesiabelum terakomodasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini ditujukan untuk memperoleh bukti permulaan bahwa praktik *circumvention* memang terjadi dan mengakibatkan tindakan anti-dumping Indonesia atas produk baja impor menjadi tidak efektif. Dalam hal ini, difokuskan pada bentuk praktik *third-country circumvention* dan *slightly modification circumvention*. Selain itu, studi dimaksudkan untuk memberikan masukan agar kebijakan anti-dumping Indonesia lebih efektif berdasarkan praktik-praktik yang telah diimplementasikan di negara anggota WTO lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki payung hukum yang dapat digunakan untuk menindak praktik-praktik *circumvention* atas pengenaan tindakan anti-dumping. Peraturan Pemerintah (PP)

No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Aturan anti-*circumvention* sangat penting untuk memastikan efektivitas tindakan anti-dumping (Puccio & Erbahar, 2016).

Studi ini berkontribusi dalam memperkaya literatur empiris terkait anti-dumping. Studi-studi sebelumnya, seperti Prusa (2001), Brenton (2001), Konings, Vandenbussche, & Springael (2001), Ganguli (2008), Alhayat (2014), Tjahjasari (2015), dan Baran (2015) hanya fokus pada bagaimana dampak perubahan aliran perdagangan (impor) atas suatu pengenaan tindakan anti-dumping. Studi-studi tersebut berhenti pada temuan bahwa tindakan anti dumping mengakibatkan adanya pengalihan perdagangan (*trade diversion*) dimana impor dari negara yang menjadi target anti-dumping (*named country*) menurun, namun impor dari negara yang tidak dikenakan anti-dumping (*non-named country*) mengalami kenaikan. Studi ini melanjutkan hasil dari studi-studi sebelumnya dengan secara eksplisit mengulas isu *circumvention* sebagai kemungkinan mengapa pengalihan perdagangan tersebut terjadi.

METODE

Penelitian tentang *circumvention* maupun anti-*circumvention* yang berdasarkan pada analisis ilmu ekonomi sedikit sekali disinggung dalam literatur. Kebanyakan literatur membahas anti-*circumvention* dalam aspek ilmu hukum. Hampir semua studi dampak atau efektifitas tindakan anti-dumping, seperti Staiger & Wolak (1994), Malhotra, Kassam, & Rus (2008), Konings, Vandenbussche & Springael (2001), dan Lee, Park & Cui (2013) menggunakan metode ekonometri untuk mengetahui dampak volume dan harga impor setelah pengenaan BMAD untuk produk-produk yang bersangkutan, namun tidak mengeksplorasi lebih jauh isu *circumvention*.

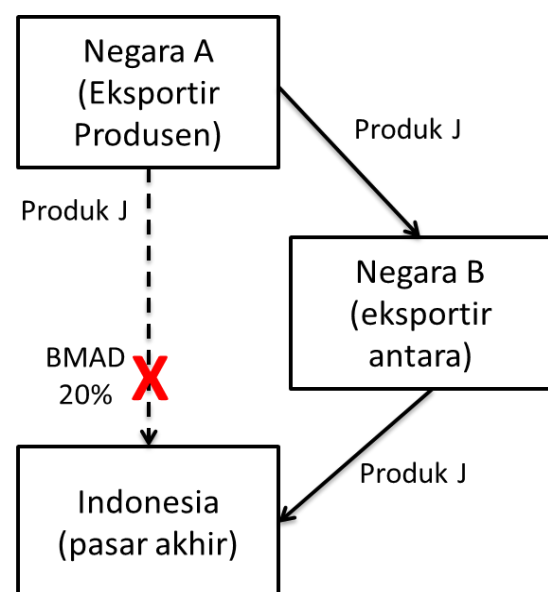
Studi ini menggunakan pendekatan lain yang didasarkan pada proses dan hasil penyelidikan *circumvention* di negara lain, khususnya AS dan EU. Salah satu hal yang dipertimbangkan dalam penyelidikan tersebut adalah perubahan pola perdagangan, termasuk pola-pola sumber/asal barang (Bagian 781 *Tariff Act* 1930 dan 19 CFR 351.225 mengenai *scope rulings*). Bahkan dalam laporan penyelidikan *circumvention* di EU

terdapat bagian khusus mengenai perubahan dalam pola perdagangan.

Oleh karena itu, praktik *circumvention* sebagai penyebab tidak efektifnya tindakan anti-dumping dianalisis dengan membandingkan pola perdagangan antara sebelum dan setelah pengenaan tindakan anti-dumping (BMAD) menggunakan data volume impor Indonesia atas barang yang dikenakan dumping pada level HS 10 digit yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun volume ekspor negara yang dikenakan tindakan anti-dumping oleh Indonesia dengan menggunakan klasifikasi digit HS terkecil yang tersedia di Global Trade Information Services (GTIS) (<https://www.gtis.com/gta>).

Secara khusus, praktik *circumvention* yang dianalisis fokus pada *third-country circumvention* dan *slightly modification circumvention* karena relatif lebih mudah dideteksi dengan menggunakan data perdagangan yang tersedia pada tingkat nasional. Dalam hal ini, *third-country circumvention* didefinisikan sebagai pengalihan jalur ekspor oleh negara yang dikenakan tindakan anti-dumping dengan memanfaatkan negara lain (negara ketiga yang tidak dikenakan tindakan anti-dumping)

sehingga terhindar dari pengenaan bea masuk anti-dumping di pasar ekspor. Sebagai contoh, mula-mula negara A ekspor langsung produk J ke Indonesia (Gambar 1). Karena terbukti dumping, maka Indonesia mengenakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk impor J dari negara A. Untuk menghindari pengenaan BMAD, negara A merubah jalur ekspor produk J melalui negara B karena negara B tidak dikenakan BMAD oleh Indonesia. Ketika masuk pasar Indonesia, produk J yang sebenarnya diproduksi negara A diklaim sebagai produk ekspor negara B (perubahan Surat Keterangan Asal atau *certificate of origin*) sehingga terhindar dari pengenaan BMAD.



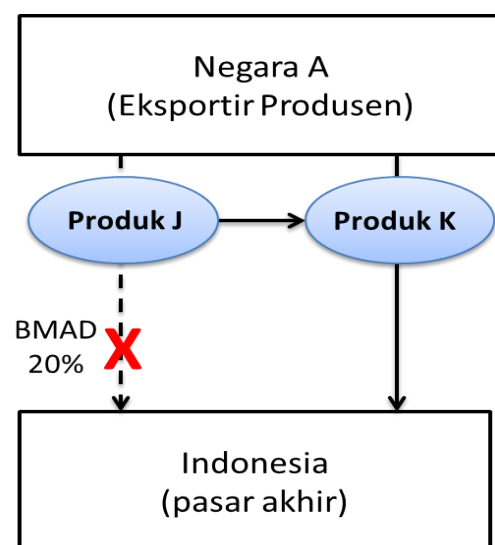
Gambar 1. Ilustrasi *Third-Country Circumvention*

Oleh karena itu, indikasi *third-country circumvention* muncul apabila volume impor Indonesia dari negara yang tidak dikenakan BMAD (negara ketiga) mengalami kenaikan setelah pengenaan BMAD. Sementara impor dari negara yang menjadi target BMAD mengalami penurunan dan pada periode yang sama negara ketiga tersebut mengalami lonjakan impor dari negara yang dikenakan BMAD oleh Indonesia.

Sementara itu, *slightly modification circumvention* didefinisikan sebagai tindakan penghindaran tindakan anti-dumping yang dilakukan oleh negara eksportir produsen dengan melakukan sedikit perubahan terhadap produk yang dikenakan anti-dumping sehingga tidak masuk dalam klasifikasi produk (kode HS) yang menjadi cakupan pengenaan bea masuk anti-dumping. Sebagai ilustrasi pada Gambar 2, terlihat bahwa negara A melakukan modifikasi produk J menjadi produk K untuk menghindari pengenaan BMAD terhadap produk impor J asal negara A di pasar Indonesia. Dengan sedikit modifikasi atau penambahan sedikit elemen produk, klasifikasi pos tarif (HS) produk tersebut ikut berubah padahal sebenarnya produk J dan produk K

tidak memiliki perbedaan yang substansial dari segi karakteristik fisik maupun kegunaannya.

Oleh karena itu, indikasi *slightly modification circumvention* muncul apabila terjadi kenaikan volume impor produk sejenis atas barang dumping setelah pengenaan BMAD, sedangkan barang dumping yang dikenakan BMAD mengalami penurunan. Parameter indikasi *circumvention* dilihat secara visual menggunakan bantuan grafik untuk mengetahui apakah terdapat perubahan pola perdagangan antara sebelum dan setelah pengenaan BMAD.



Gambar 2. Ilustrasi *Slightly Modification Circumvention*

Penelitian ini menggunakan data tahunan periode 2007-2015 dimana dampak pengenaan BMAD yang

dianalisis disesuaikan dengan tanggal pengenaan BMAD maupun negara yang dikenakan BMAD oleh Indonesia sebagaimana terlihat pada Tabel 2. Apabila implementasi pengenaan BMAD dimulai pada bulan Januari hingga Juni pada tahun tertentu, maka tahun yang bersangkutan menjadi periode awal dampak BMAD. Sedangkan apabila implementasi pengenaan BMAD dimulai pada bulan Juli hingga Desember pada suatu tahun, maka tahun berikutnya menjadi periode awal dampak BMAD.

Informasi produk sejenis (HS) sebagai bahan untuk menganalisis *slightly modification circumvention* terkait produk baja yang dikenakan BMAD oleh Indonesia diperoleh dari industri dalam negeri, terutama pemohon petisi anti-dumping (Tabel 1). Meskipun berbeda kode HS, namun bentuk atau wujud fisik dan karakteristik teknisnya tidak berbeda secara substansial sehingga dapat digunakan untuk mengalihkan importasi baja karbon yang menjadi objek pengenaan BMAD menjadi importasi baja paduan.

Untuk melengkapi analisis, studi ini juga mengumpulkan informasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang para

pelaku usaha terkait, baik perusahaan yang mengajukan permohonan anti-dumping (petisioner) maupun asosiasi industri dari barang yang dikenakan dumping.

Tabel 1. Kode HS Baja Karbon dan Baja Paduan yang Bersesuaian

Produk	HS Baja Karbon	HS Baja Paduan
HRC	7208.10; 7208.25; 7208.26; 7208.27; 7208.36; 7208.37; 7208.38; 7208.39; 7208.90	7225.30
HRP	7208.51; 7208.52	7225.40
CRC	7209.16; 7209.17; 7209.18; 7209.26; 7209.27; 7209.28; 7209.90; 7211.23; 7211.29; 7211.90	7225.50
H & I Section	7216.32; 7216.33	7228.70

Sumber: Hasil diskusi dengan pelaku usaha, (2016)

Informasi dari pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk mengklarifikasi serta memperkuat temuan/indikasi awal praktik *circumvention* yang dilakukan berdasarkan analisis data sekunder dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Anti Dumping Besi Baja di Indonesia

Selama periode 2010 hingga awal 2015, terdapat sebelas tindakan anti-dumping yang dikenakan Indonesia terhadap berbagai produk impor dari negara mitra. Dari kesebelas produk yang dikenakan BMAD, produk-produk baja yang mencakup HRC, HRP, CRC, dan H&I *Section* memiliki proporsi impor terbesar. Pada tahun 2015, nilai impor keempat produk tersebut mencapai 78,3% dari keseluruhan nilai impor produk yang dikenakan BMAD.

Sebagaimana dilihat pada Tabel 2, petisioner (pemohon) penyelidikan

anti-dumping atas produk besi baja yang menjadi fokus studi ini mayoritas diajukan oleh PT. Krakatau Steel dan dikenakan terhadap impor baja asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pada umumnya, penyelidikan anti-dumping oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memakan waktu satu tahun sebelum diputuskan untuk dikenakan BMAD. Atas dasar rekomendasi KADI, Menteri Perdagangan memutuskan untuk mengenakan tindakan anti-dumping yang kemudian akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) karena instrumen tindakan anti-dumping berupa tambahan bea masuk impor (BMAD).

Tabel 2. Tindakan Anti-Dumping Indonesia terhadap Produk Baja Impor

Produk	Petisioner Anti-Dumping	Inisiasi Penyelidikan Anti-Dumping	Tanggal Pengenaan Anti-Dumping/PMK	Negara yang Dikenakan dan Besaran BMAD
HRC	PT Krakatau Steel	05-11-2008	07-02-2011 23/PMK.011/2011	Korea: 3,8%
HRP	PT Krakatau Steel	31-03-2010	10-01-2012 150/PMK.011/2012	Malaysia: 48,4% RRT: 10,47% Singapura: 12,33% Ukraina: 12,50%
CRC	PT Krakatau Steel	24-06-2011	19-03-2013 65/PMK.011/2013	RRT: 13,6-43,5% Taiwan: 5,9-20,6% Korea: 10,1-11,0% Jepang: 18,6-55,6% Vietnam: 12,3-27,8%
H & I <i>Section</i>	PT Gunung Garuda	30-06-2009	23-11-2010 195/PMK.011/2010	RRT: 6,63-11,93%

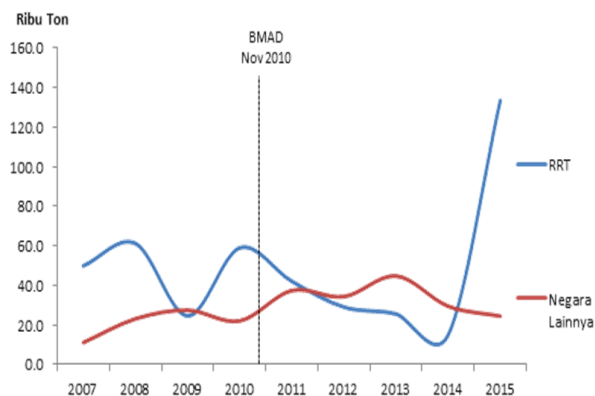
Sumber: KADI(2016)

Third-Country Circumvention

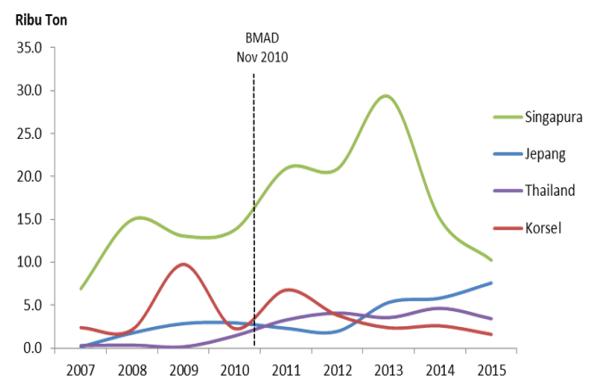
Setelah pengenalan BMAD, volume impor H & I Section dari RRT pada periode 2010-2013 mengalami penurunan, sebaliknya volume impor dari negara yang tidak dikenakan

BMAD (negara lainnya), khususnya Singapura, justru meningkat (Gambar 3). Pada saat yang sama, terjadi peningkatan impor H & I Section di Singapura yang berasal dari RRT.

A. Negara Asal Impor yang Dikenakan BMAD



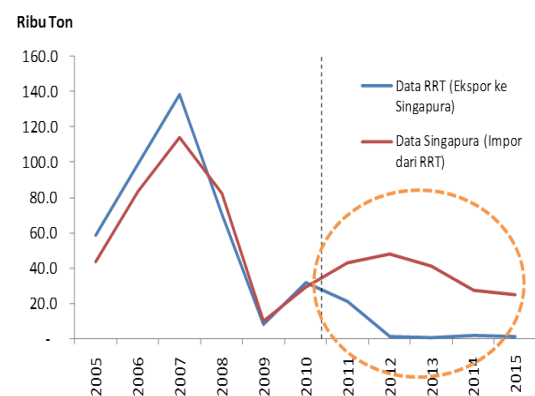
B. Negara Asal Impor Utama "Negara Lainnya"



Gambar 3. Pola Impor H & I Section Indonesia

Sumber: BPS (2016), diolah

Selain terlihat adanya indikasi *third-country circumvention*, adanya perbedaan pola perdagangan dengan basis data yang berbeda setelah pengenalan BMAD oleh Indonesia (Gambar 4) juga mengindikasikan bahwa RRT melakukan *commercial fraud*¹ dalam melakukan ekspor H & I Section.



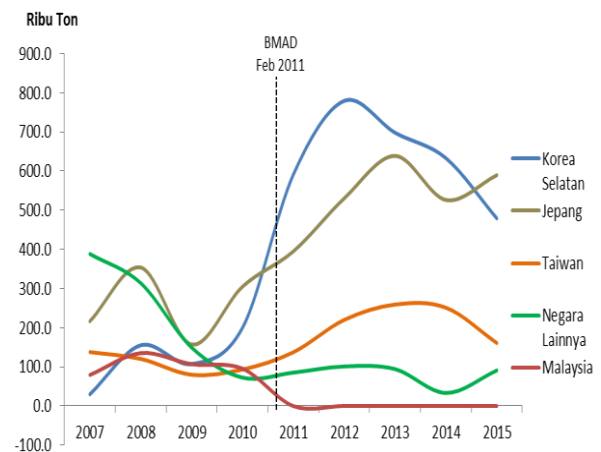
Gambar 4. Pola Ekspor H & I Section RRT ke Singapura

Sumber: GTIS (2016), diolah

preferensi, serta melakukan klasifikasi barang yang tidak benar.

¹ Berdasarkan World Customs Organization (2013a dan 2013b), *commercial fraud* merupakan setiap pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan diantaranya dengan melaporkan nilai barang yang lebih rendah dari seharusnya (*undervaluation*), penyalahgunaan asal barang dan bea masuk

Setelah pengenaan BMAD, volume impor HRC asal Korea tetap mengalami peningkatan bahkan dalam jumlah yang signifikan selama tiga tahun pertama implementasi, sedangkan volume impor asal Malaysia turun. Sebelum pengenaan BMAD, rata-rata impor HRC asal Korea periode 2007-2010 hanya sebesar 123,1 ribu ton per tahun. Setelah pengenaan BMAD, rata-rata impor asal Korea periode 2011-2015 menjadi 636,2 ribu ton per tahun. Sementara itu, impor dari negara yang tidak dikenakan BMAD, khususnya Jepang dan Taiwan, menunjukkan peningkatan yang cukup besar (Gambar 5).



Gambar 5. Pola Impor HRC

Indonesia

Sumber: BPS (2016), diolah

Keterangan: Jepang dan Taiwan tidak termasuk negara yang dikenakan BMAD

Kemungkinan Jepang dan Taiwan menjadi negara peralihan bagi Malaysia untuk menghindari pengenaan BMAD HRC di Indonesia cukup kecil. Hal ini dikarenakan

Tabel 3. Volume Ekspor HRC Malaysia (Ton)

Tujuan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dunia	448.631	276.001	212.585	95.534	35.125	10.244	13.876	12.630
Jepang	37	-	32	9	-	-	-	6
Taiwan	1.837	3.622	5.679	31	56	-	108	-

Sumber: GTIS (2016), diolah

Keterangan: Data perdagangan HRC Malaysia didekati menggunakan HS 7208

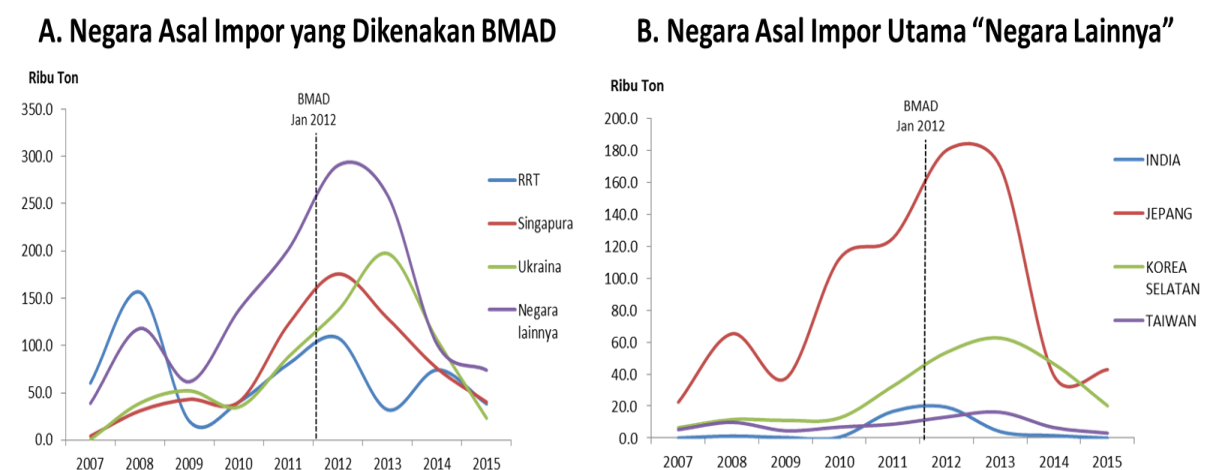
ekspor HRC Malaysia ke dunia selama pengenaan BMAD oleh Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan dari rata-rata sebesar 312,4 ribu ton per tahun pada periode 2008-2010 menjadi sebesar 33,5 ribu ton

per tahun pada periode 2011-2015. Secara spesifik, volume ekspor HRC Malaysia ke Taiwan maupun ke Jepang periode 2011-2015 relatif kecil dan bahkan tidak ada ekspornya pada tahun-tahun tertentu (Tabel 3).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi *third-country circumvention* dalam impor HRC mengingat impor HRC asal Korea tetap meningkat setelah pengenaan BMAD dan tidak ada perubahan pola ekspor HRC Malaysia dengan memanfaatkan Jepang maupun Taiwan sebagai negara ketiga.

Tidak ditemukan indikasi *third-country circumvention* atas pengenaan BMAD produk impor HRP. Setelah pengenaan BMAD, volume impor HRP

dari negara yang dikenakan BMAD maupun negara lainnya cenderung turun (Gambar 6). Kecil kemungkinan RRT memanfaatkan Ukraina untuk ekspor ke Indonesia pada tahun 2013 karena tarif BMAD Ukraina (12,5%) lebih besar dari BMAD RRT (10,47%). Ditambah lagi, ekspor RRT untuk produk HRP periode 2011-2013 mengalami penurunan, baik untuk tujuan dunia (total), Korea Selatan, maupun Jepang (Tabel 4).



Gambar 6. Pola Impor HRP Indonesia

Sumber: BPS (2016), diolah

Tabel 4. Volume Ekspor HRP RRT (Ton)

Negara Tujuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dunia	2.673,4	596,2	229,2	172,7	148,4	334,9
Korea Selatan	1.235,7	246,8	21,4	4,4	4,0	0,8
Jepang	48,9	14,2	6,2	0,1	0,2	0,5

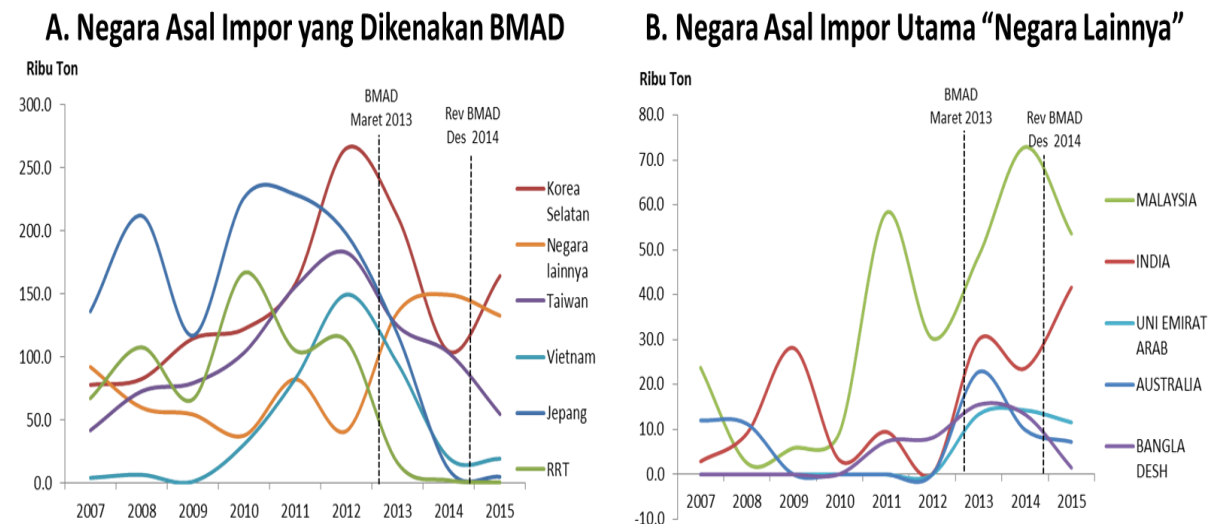
Sumber: GTIS (2016), diolah

Setelah penerapan BMAD CRC di tahun 2013, terjadi penurunan impor

CRC dari negara-negara yang menjadi target tindakan anti-dumping, namun

diiringi dengan peningkatan impor asal negara lainnya yang tidak dikenakan BMAD (Gambar 7). Negara lain (tidak dikenakan BMAD) namun ekspor CRC ke Indonesia meningkat pesat adalah Malaysia. Apabila dilihat lebih lanjut pada data impor Malaysia, maka

terlihat bahwa impor CRC Malaysia dari negara yang dikenakan BMAD oleh Indonesia, seperti Jepang, Taiwan, dan RRT mengalami peningkatan pada periode 2014-2015 (Tabel 5).



Gambar 7. Pola Impor CRC Indonesia

Sumber: BPS (2016), diolah

Secara kumulatif rata-rata impor CRC Malaysia dari Jepang, Taiwan, dan RRT periode 2012-2013 sebesar 377,5 ribu ton per tahun dan rata-rata impor periode 2014-2015 sebesar 492,2 ribu ton per tahun. Dengan kata lain, impor kumulatif CRC Malaysia dari Jepang, Taiwan, dan RRT meningkat sebesar 114,7 ribu ton setelah Indonesia mengenakan BMAD. Sementara itu, impor CRC Indonesia dari Malaysia yang semula hanya sebesar 21,7 ribu ton per tahun

(2007-2013) naik menjadi 58,4 ribu ton per tahun (2013-2015). Ada kemungkinan bahwa peningkatan ekspor CRC Malaysia ke Indonesia berasal dari CRC yang diimpor Malaysia dari negara yang dikenakan BMAD oleh Indonesia, khususnya dari Jepang, Taiwan, dan RRT. Pola perdagangan tersebut mengindikasikan bahwa Malaysia berperan dalam *third-country circumvention* atas pengenaan BMAD CRC di Indonesia.

**Tabel 5. Volume Impor CRC Malaysia
(Ribu Ton)**

Negara Asal	2012	2013	2014	2015
Dunia	771,9	859,3	818,7	849,0
Korea Selatan	286,3	236,9	225,5	140,4
Jepang	161,6	191,7	202,4	252,6
Vietnam	108,6	142,8	142,3	115,6
Taiwan	98,3	78,7	117,1	129,2
RRT	82,3	142,4	100,2	182,8

Sumber: GTA (2016)

Slightly Modification Circumvention

Analisis dari Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Puska Daglu) (2013) telah terlebih dahulu mengindikasikan adanya importasi baja paduan lainnya dari negara tertentu yang dilakukan dengan merubah spesifikasi teknis baja sehingga terjadi pengalihan dari kategori besi dan baja bukan paduan (baja karbon) ke kategori baja paduan dengan tujuan untuk mendapatkan keringanan tarif bea masuk, terhindar dari BMAD dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, baja paduan lainnya didefinisikan sebagai baja yang tidak memenuhi definisi baja *stainless* dan menurut beratnya mengandung satu atau lebih unsur dalam perbandingan 16 unsur

material kimia atau elemen paduan (*alloying elements*) dalam Tabel 6 yang dapat ditambahkan dalam baja karbon (*carbon steel*) untuk merubahnya menjadi baja paduan (*alloy steel*). Kasus dugaan *circumvention* yang marak terjadi di Indonesia adalah penambahan unsur Boron sebesar 0,0008% dalam baja karbon sehingga berubah menjadi baja paduan. Namun demikian,

Tabel 6. Unsur dalam Baja Paduan

UNSUR		UNSUR	
Al	0,3% atau lebih aluminium	Ni	0,3% atau lebih nikel
B	0,0008% atau lebih boron	Nb	0,06% atau lebih niobium
Cr	0,3% atau lebih kromium	Si	0,6% atau lebih silikon
Co	0,3% atau lebih kobalt	Ti	0,05% atau lebih titanium
Cu	0,4% atau lebih tembaga	W	0,3% atau lebih tungsten (wolfram)
Pb	0,4% atau lebih timbal	V	0,1% atau lebih vanadium
Mn	1,65% atau lebih mangan	Zr	0,05% atau lebih zirkonium
Mo	0,08% atau lebih molibdenum	Lainnya	0,1% atau lebih unsur lainnya (kecuali belerang, fosfor, karbon dan nitrogen), diambil terpisah.

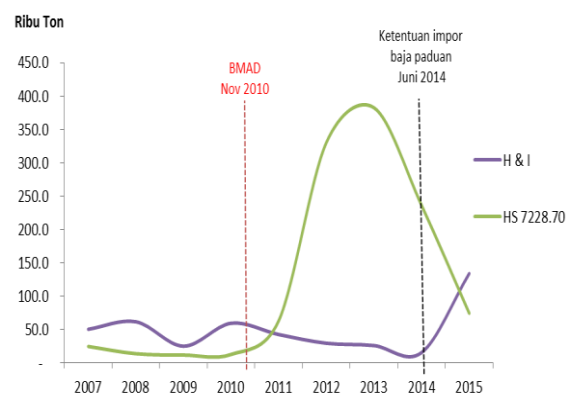
Sumber: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan dalam Puska Daglu (2013)

penambahan elemen paduan berupa Boron dengan kadar yang sedikit tersebut tidak memberikan efek perubahan yang signifikan pada sifat mekanik dan performa apabila tanpa diikuti penambahan elemen-elemen paduan lainnya yang secara teknis diperlukan.

Dalam studi ini, indikasi *slightly modification circumvention* untuk H & I Section terlihat jelas pada periode 2012-2013. Pengenaan BMAD mengakibatkan penurunan secara gradual volume impor H & I Section asal RRT sejak tahun 2011 hingga 2014. Sementara itu, terjadi lonjakan signifikan impor baja paduannya (HS 7228.70) pada tahun 2011-2013 (Gambar 8).

Dengan adanya kebijakan impor baja paduan, impor H & I Section berupa baja paduan mengalami penurunan, ditambah lagi dengan tindakan safeguard produk H & I Section dari baja paduan lainnya (HS ex 7228.70.10 dan ex 7228.70.90) yang berlaku 21 Januari 2015 sesuai PMK No. 12/PMK.010/2015.

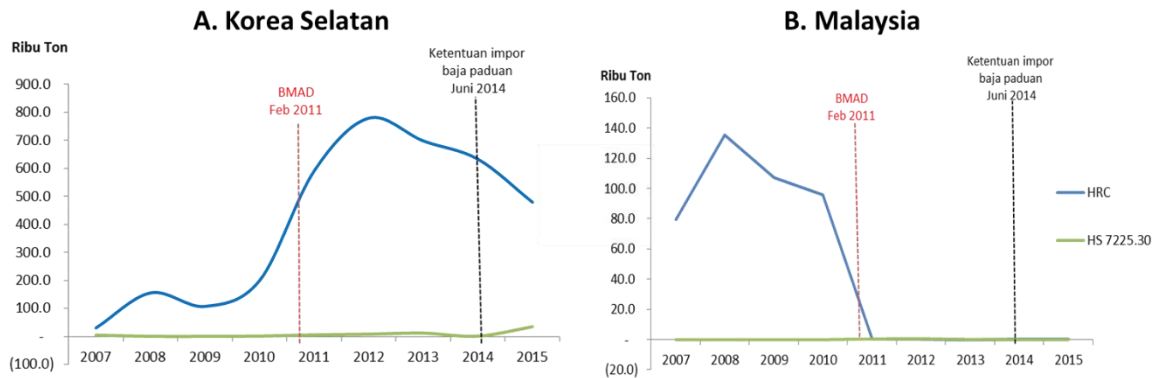
Pada impor HRC, pengenaan BMAD tidak terlihat adanya indikasi *slightly modification circumvention* yang dilakukan oleh negara-negara



Gambar 8. Pola Impor H & I Section dan Baja Paduannya asal RRT

Sumber: BPS (2016), diolah

yang dikenakan BMAD. Setelah pengenaan BMAD di tahun 2011, volume impor HRC asal Korea Selatan tahun 2012 tetap mengalami peningkatan (Gambar 9). Meskipun impor HRC asal Korea Selatan cenderung menurun pada periode 2013-2015, namun secara rata-rata importasi HRC setelah pengenaan BMAD masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pengenaan BMAD serta tidak diikuti dengan peningkatan impor baja paduannya (HS 7225.30) secara substansial. Sementara itu, impor HRC dari Malaysia turun drastis setelah pengenaan BMAD, namun tidak diiringi oleh peningkatan baja paduannya (HS 7225.30) sehingga tidak terindikasi adanya *slightly modification circumvention*.

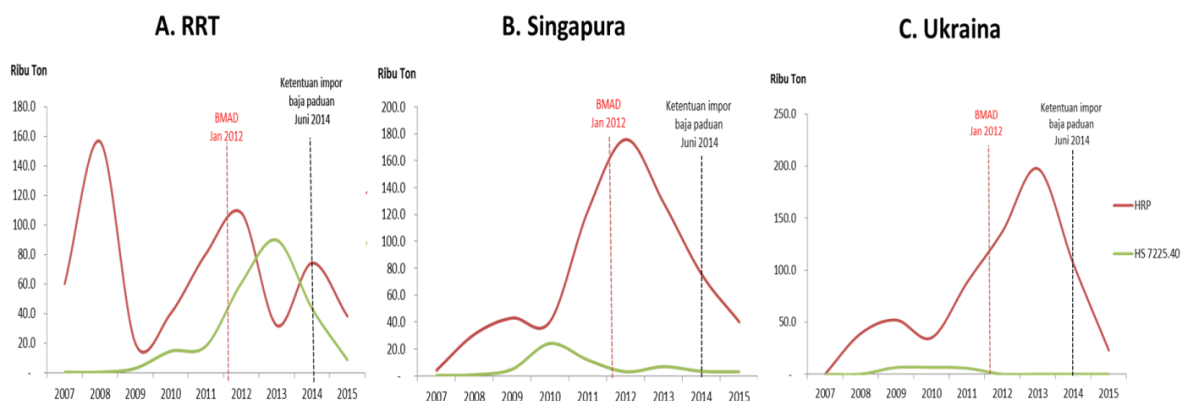


Gambar 9. Pola Impor HRC dan Baja Paduannya berdasarkan Negara yang Dikenakan BMAD

Sumber: BPS (2016), diolah

Indikasi *slightly modification circumvention* atas pengenaan BMAD HRP hanya terlihat pada impor HRP asal RRT di tahun 2013. Setelah pengenaan BMAD tahun 2012, volume

impor HRP asal RRT tahun 2013 menurun dan diikuti dengan lonjakan impor baja paduannya (HS 7225.40) asal RRT di tahun yang sama (Gambar 10.A).

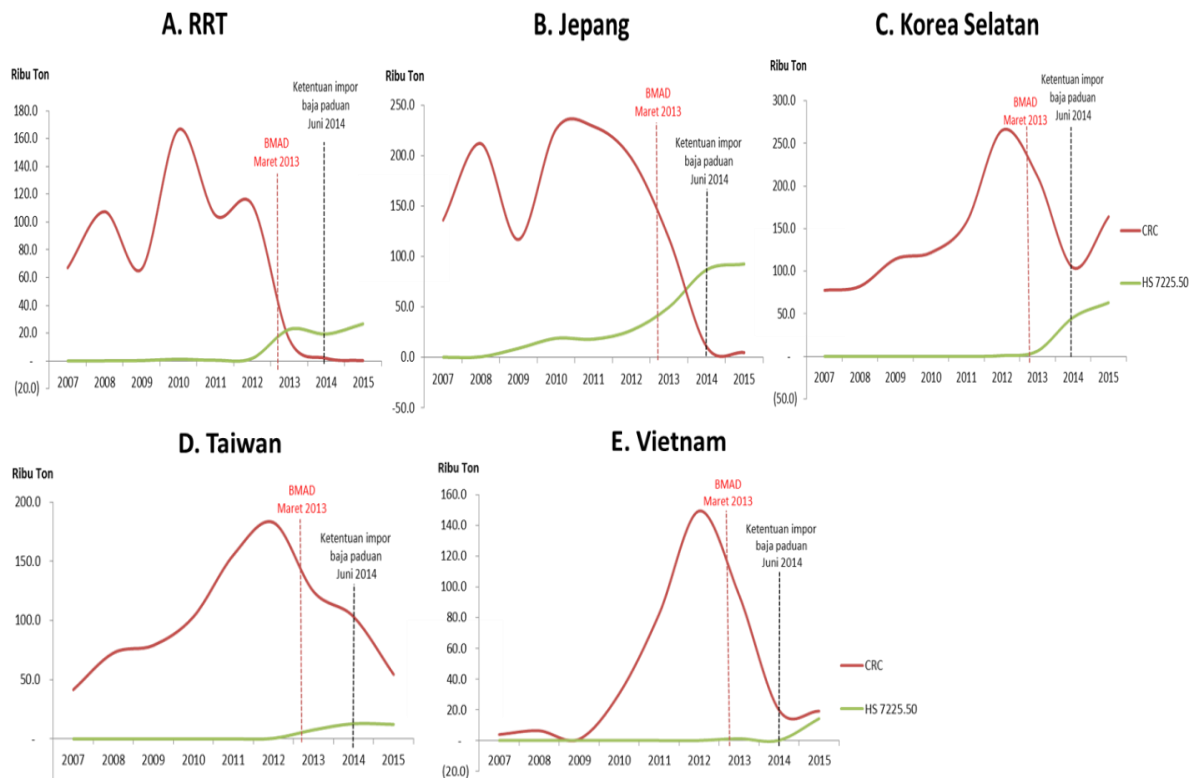


Gambar 10. Pola Impor HRP dan Baja Paduannya berdasarkan Negara yang Dikenakan BMAD

Sumber: BPS (2016), diolah

Perubahan pola impor yang mengindikasikan *slightly modification circumvention* (pengalihan impor baja karbon menjadi baja paduan) terlihat pada impor CRC yang berasal dari hampir seluruh negara yang dikenakan

BMAD (Gambar 11). Dalam hal ini, indikasi *slightly modification circumvention* dilakukan oleh RRT pada periode 2013-2015, Korea Selatan (2013-2015), Taiwan (2013-2015), dan Jepang (2013-2015).



Gambar 11. Pola Impor CRC dan Baja Paduannya berdasarkan Negara yang Dikenakan BMAD

Sumber: BPS (2016), diolah

Berdasarkan hasil klarifikasi dengan industri dalam negeri (pelaku usaha) yang dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD)² maupun kunjungan lapangan, diperoleh informasi bahwa kecil kemungkinan terjadinya *third-country circumvention* untuk produk baja karena harga transportasi/logistik yang mahal (berat) dan adanya persyaratan *mill certificate* dari produsen. Sebaliknya, *slightly modification circumvention* lebih besar

kemungkinan terjadi untuk produk baja. Selain itu, RRT menjadi negara asal impor yang diduga paling sering melakukan praktik *circumvention* dikarenakan pengenaan BMAD terhadap produk RRT oleh Indonesia, serta adanya kebijakan (insentif) Pemerintah RRT berupa *tax rebate* untuk ekspor produk baja paduan. Indikasi RRT melakukan *circumvention* sejalan dengan studi Liu dan Shi (2016) bahwa eksportir RRT melakukan perubahan jalur perdagangan (*trade rerouting*) melalui negara ketiga untuk

²Diselenggarakan di Jakarta, tanggal 1 Maret 2016

menghindari pengenaan bea masuk anti-dumping oleh Amerika Serikat.

Analisis Dampak Ketentuan Impor Baja Paduan

Pada tanggal 2 Juni 2014, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 28/M-DAG/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan yang merupakan respon terkait banyaknya impor baja paduan (*alloy*) yang masuk dengan menggunakan boron dengan kadar yang rendah hanya untuk mengalihkan tarif bea masuk serta menghindari pengenaan BMAD ataupun *safeguard*.

Beberapa pokok pengaturan dalam Permendag No. 28/M-DAG/PER/6/2014 antara lain (Kemendag, 2014):

1. Baja paduan hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) baja paduan atau penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) baja paduan dari Menteri Perdagangan.
2. Persyaratan untuk memperoleh IP-baja paduan antara lain surat pernyataan bahwa baja yang diimpor adalah jenis baja paduan yang dibuktikan melalui *mill*

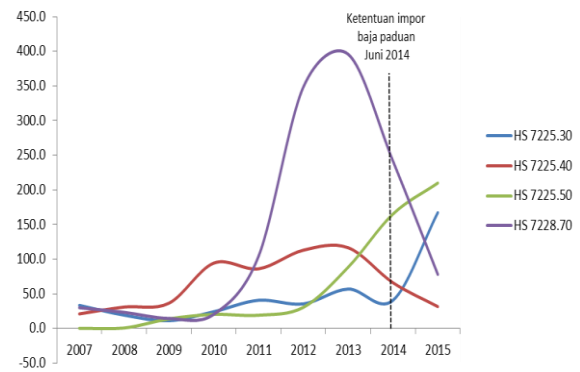
certificate pada saat dilakukan verifikasi oleh surveyor serta pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian yang memuat informasi mengenai jenis barang, klasifikasi barang/pos tarif/HS 10 digit, dan jumlah per pelabuhan tujuan.

3. IT-baja paduan yang akan melakukan impor baja paduan harus mendapatkan persetujuan impor dari Kemendag dengan memperhatikan kontrak penjualan baja paduan antara pemilik IT-baja paduan dengan perusahaan produsen dengan menunjukan asli kontrak kerja sama penjualan baja paduan.
4. Setiap impor baja paduan oleh IP-baja paduan dan IT-baja paduan harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara muat barang.
5. Pengakuan sebagai IP-baja paduan dan penetapan sebagai IT-baja paduan dibekukan apabila perusahaan tidak menyampaikan laporan realisasi impor sebanyak tiga kali, dan/atau terdapat dugaan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan

pengakuan sebagai IP-baja paduan, penetapan sebagai IT-baja paduan, dan/atau persetujuan impor.

6. Pengecualian verifikasi atau penelusuran teknis impor diberikan kepada industri otomotif, industri elektronika, industri galangan kapal, dan industri alat besar, serta masing-masing komponennya. Pengecualian tersebut juga diberikan kepada IP-baja paduan sebagai industri pengguna yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) atau fasilitas skema lainnya.

Seperti yang terlihat pada Gambar 12, ketentuan impor baja paduan yang diterbitkan Juni 2014 berdampak pada penurunan impor H & I *Section* dari baja paduan (HS 7228.70) dan HRP dari baja paduan (HS 7225.40) dari dunia. Sementara itu, impor HRC dari baja paduan (HS 7225.30) dan CRC dari baja paduan (HS 7225.50) tetap mengalami kenaikan meskipun ketentuan impor baja paduan telah diimplementasikan.



Gambar 12. Pola Impor Baja Paduan Indonesia dari Dunia

Sumber: BPS (2016), diolah

Ketentuan impor baja paduan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan memang bukan instrumen berupa tarif seperti halnya BMAD, namun persyaratan-persyaratan impor baja paduan tersebut merupakan instrumen bentuk non-tarif yang implikasinya serupa dengan tambahan pengenaan bea masuk (BMAD), yaitu menghambat lonjakan impor produk sejenis yang dikenakan BMAD. Sebagai contoh, impor produk H & I *Section* (baja karbon dengan kode HS 7216.32 dan 7216.33) dari RRT mengalami penurunan pada periode 2010-2014 setelah pengenaan BMAD (Gambar 3.A). Sementara pada periode yang sama, volume impor I & H *Section* dari baja paduan dengan kode HS 7228.70 (mayoritas berasal dari RRT) mengalami peningkatan

(Gambar 12) yang mengindikasikan adanya pengalihan impor dari produk sejenis (*slightly modification circumvention*). Dengan diberlakukannya ketentuan impor baja paduan (Permendag No.28/2014), volume impor H & I *Section* dari baja paduan turun tajam. Hal ini mengindikasikan bahwa peraturan tersebut mampu menekan praktik *circumvention* yang terjadi. Apabila Indonesia memiliki aturan *anti-circumvention* atas pengenaan tindakan anti-dumping, produk impor H & I *Section* dari baja paduan tersebut dapat dikenakan BMAD dengan besaran yang sama dengan yang dikenakan terhadap H & I *Section* (pengenaan awal) dengan syarat bahwa produk H & I *Section* dari baja paduan tersebut merupakan pengalihan impor dari produk H & I tanpa adanya perubahan karakteristik produk yang signifikan.

Kebijakan *Anti-Circumvention* di Negara Lain

Sejak Putaran Uruguay hingga sekarang belum ada konsensus yang dicapai oleh anggota WTO atas ketentuan *anti-circumvention*. Bahkan, *anti-circumvention* dianggap sebagai isu yang kontroversial dalam negosiasi Perjanjian Anti-Dumping WTO (Baskin,

2016)³. Implikasinya, ada sebagian negara anggota WTO yang menganggap *circumvention* merupakan praktik perdagangan serta investasi yang normal, sedangkan negara lainnya menganggap sebagai bentuk ketidakpatuhan atau penghindaran terhadap instrumen *trade remedies* (Yu, 2008). Selain itu, ketiadaan konsensus mengenai pengaturan *circumvention* dan *anti-circumvention* di WTO berakibat pada kegagalan anggota WTO untuk menyimpulkan pengaturan *circumvention* dan *anti-circumvention* yang seragam sehingga berpotensi melanggar aturan WTO dan meningkatkan proteksionisme (Zhou, 2016).

Indonesia belum memiliki landasan hukum tindakan *anti-circumvention*. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan tidak terdapat ketentuan yang memungkinkan Pemerintah

³ Isu ketidakjelasan dan ketidakselarasan pengaturan *anti-circumvention* juga muncul dalam aturan WTO lainnya seperti *Agreement on Agriculture*, *Agreement on Government Procurement*, dan *Understanding on Commitments in Financial Services* (Kobayashi, 2014).

Indonesia untuk menindak praktik penghindaran atas pengenaan anti-dumping maupun anti-subsidi (*countervailing*) yang dilakukan oleh eksportir luar negeri maupun importir. Apabila eksportir luar negeri diduga melakukan praktik *circumvention* (penghindaraan) atas pengenaan BMAD, Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) sebagai otoritas yang berwenang harus menginisiasi penyelidikan baru terhadap negara lain yang tidak dikenakan BMAD dan diduga menjadi negara ketiga untuk kasus *third-country circumvention* atau menginisiasi penyelidikan baru terhadap produk sejenis yang diduga sebagai hasil modifikasi atas produk yang sedang dikenakan BMAD. Adanya ketentuan anti-*circumvention*, akan memudahkan suatu negara untuk menindak praktik curang tersebut tanpa harus menginisiasi penyelidikan baru. Penyelidikan dugaan *circumvention* dapat langsung dimulai asalkan produk impor yang diselidiki masih berkaitan dengan produk impor yang sedang dikenakan BMAD. Sehingga apabila terbukti terdapat praktik *circumvention*, maka pengenaan BMAD cukup diperluas cakupan produknya maupun negara yang dikenakan.

Negara-negara yang telah memiliki ketentuan anti-*circumvention* dalam peraturan domestiknya antara lain Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (EU), Australia, dan India. Ketentuan anti-*circumvention* diadopsi oleh AS pada tahun 1988 sebagai bagian dari *Omnibus Trade and Competitiveness Act* dan telah diamandemen pada tahun 1994. EU mengadopsi aturan anti-*circumvention* secara komprehensif sejak 1994 sebagaimana tertuang dalam *Council Regulation* (EC) No. 3283/1994. Sebelumnya, pengaturan anti-*circumvention* yang dicakup dalam peraturan anti-dumping EU hanya terkait dengan *circumvention* yang dilakukan melalui produksi di EU maupun melalui produksi di negara ketiga, sedangkan *circumvention* melalui pengalihan jalur perdagangan melalui negara ketiga diatur dalam peraturan kepabeanan (Vermulst, 2016). Setelah beberapa kali revisi, pengaturan anti-*circumvention* terhadap tindakan anti-dumping di EU saat ini diatur melalui Pasal 13 EC No. 2016/1036 tentang *Protection Against Dumped Imports from Countries Not Members of the European Community*, sedangkan anti-*circumvention* terhadap tindakan anti-subsidi diatur melalui Pasal 23 EC

No. 2016/1037 tentang *Protection Against Subsidised Imports from Countries Not Members of the European Community*.

Beberapa tahun terakhir, ketentuan anti-*circumvention* mulai banyak diadopsi oleh negara-negara anggota WTO di dalam peraturan domestiknya, diantaranya Australia dan India. Kerangka regulasi anti-*circumvention* di Australia dalam kaitannya dengan tindakan anti-dumping dan *countervailing* pertama kali diinisiasi oleh legislatif Australia melalui *Customs Amendment (Anti-dumping Improvements) Bill* (No. 3) 2012 sehingga berkonsekuensi pada perubahan *Customs Act* 1901 yang diterapkan secara efektif sejak Juni 2013 (Moulis, 2016). Sementara itu, aturan mengenai kebijakan anti-*circumvention* di India mulai diperkenalkan tahun 2011 dengan memasukkan sub-bab 1A dalam bab 9A *Customs Tariff Act* 1975 yang memungkinkan Pemerintah India untuk memperluas bea masuk anti-dumping terhadap tindakan *circumvention*. Selanjutnya pada tahun 2012, empat aturan detil (*Rules* 25 hingga 28) ditambahkan dalam

Custom Tariff (Identification Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 (Sud, 2016).

Secara umum, apabila terbukti adanya praktik *circumvention*, maka pengenaan anti-dumping maupun anti-subsidi yang telah diimplementasikan sebelumnya dapat diperluas baik dengan merubah cakupan negara asal impor maupun merubah deskripsi produk impor yang dikenakan tindakan *trade remedies*, tanpa harus memulai penyelidikan baru. Seperti yang dinyatakan oleh Willems dan Natens (2016) bahwa peraturan anti-dumping yang dimiliki oleh beberapa negara memungkinkan perluasan pengenaan bea masuk anti-dumping atas impor produk sejenis dari negara ketiga atau atas produk yang sedikit dimodifikasi dari negara ketiga atau memperluas negara yang dikenakan tindakan anti-dumping. Adapun perbandingan pokok-pokok pengaturan anti-*circumvention* khususnya terkait pengenaan anti-dumping untuk masing-masing negara dapat dilihat secara ringkas pada Tabel 7.

Tabel 7. Pokok-pokok Pengaturan Anti-Circumvention di Negara Lain

Komponen	AS	EU	Australia	India
Landasan Hukum	19 U.S. Code § 1677j - <i>Prevention of Circumvention of Antidumping and Countervailing Duty Orders</i> 19 CFR 351.225 - <i>Scope rulings</i>	<i>Council Regulation (EC) No.2016/1036 - Protection Against Dumped Imports from Countries Not Members of the European Community: Article 13</i>	<i>Customs Act 1901, Amandemen Juni 2013: Part XVB, Division 5A</i>	<i>The Customs Tariff (Amendment) Act</i> <i>The Custom Tariff (Identification Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules 2012: Rules 25, 26, 27, 28</i>
Definisi <i>Circumvention</i>	Tidak didefinisikan secara khusus, persyaratan & determinan <i>circumvention</i> dijelaskan di masing-masing bentuk <i>circumvention</i>	- Perubahan pola perdagangan antara negara ketiga dengan EU atau antar individu perusahaan di negara yang menjadi subjek tindakan dan EU - Tidak terdapat alasan yang kuat atas perubahan pola perdagangan, selain pengenaan tindakan anti-dumping - Terdapat bukti kerugian atau bahwa efek pemulihan dari dalam tindakan anti-dumping sedang dirusak dalam hal harga dan / atau kuantitas produk sejenis - Terdapat bukti dumping dalam kaitannya dengan nilai normal yang ditetapkan sebelumnya untuk produk sejenis	Aktivitas yang berkaitan dengan (menghindari atau mengurangi) bea masuk dumping atau <i>countervailing</i>	Tidak didefinisikan secara khusus di dalam aturan
Bentuk <i>Circumvention</i>	- Barang diproduksi secara lengkap atau dirakit di AS - Barang diproduksi secara lengkap atau dirakit di	Modifikasi sedikit produk tanpa merubah karakteristik utama produk sehingga berada pada kode kepabeanan yang tidak terkena tindakan	- Perakitan bagian-bagian di Australia - Perakitan bagian-bagian di negara ketiga - Ekspor melalui satu atau lebih negara ketiga - Pengaturan antar	- Ekspor barang dari negara asal dalam bentuk yang belum selesai atau tidak lengkap dan dirakit atau diselesaikan di India atau di negara lain - Ekspor dari negara

	negara ketiga sebelum diimpor ke AS • Barang yang telah dirubah secara minor (sedikit modifikasi) • Barang yang dikembangkan kemudian (<i>later-developed merchandise</i>)	• Pengiriman produk melalui negara ketiga • Reorganisasi oleh eksportir atau produsen terkait pola dan saluran penjualan dengan memanfaatkan produsen yang dikenakan kewajiban bea masuk individual yang lebih rendah • Perakitan bagian/komponen di EU atau negara ketiga	eksportir • Penghindaran dampak yang diharapkan atas pengenaan tindakan (<i>intended effect of duty</i>) • Eksportir sedikit memodifikasi produk • Keadaan tambahan yang ditentukan oleh peraturan	asal yang melibatkan perubahan deskripsi produk • Ekspor barang melalui eksportir atau produsen atau negara yang tidak dikenakan tindakan anti-dumping
Insiasi Penyelidikan	• <i>Secretary of Commerce</i> • Pihak-pihak yang berkepentingan	• Insiasi Komisi • Permintaan negara anggota • Pihak-pihak yang berkepentingan	• Industri Australia • Permintaan Menteri	• Industri domestik • Inisiasi otoritas
Periode Penyelidikan	300 hari	9 bulan	100-155 hari	12-18 bulan

Sumber: Disarikan dari peraturan terkait di masing-masing negara

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil analisis menunjukkan indikasi kuat keberadaan praktik *circumvention* sehingga mengakibatkan pengenaan tindakan anti-dumping terhadap beberapa produk baja impor di Indonesia menjadi sepenuhnya tidak efektif. Praktik *third-country circumvention* terindikasi dilakukan oleh RRT untuk kasus BMAD produk H & I Section dengan melakukan ekspor melalui Singapura. Indikasi praktik *third-country circumvention* juga terlihat pada kasus BMAD produk CRC oleh RRT, Taiwan, dan Jepang dengan melibatkan Malaysia sebagai

negara ketiga. Meskipun praktik *third-country circumvention* pada produk baja secara riil dianggap kurang relevan oleh pelaku usaha karena alasan biaya transportasi/logistik, namun apabila terjadi lonjakan impor dari Singapura dan Malaysia setelah Indonesia mengenakan tindakan anti-dumping maka lonjakan tersebut harus dicermati lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia karena ada kemungkinan barang impor yang masuk tersebut merupakan pengalihan asal impor dari negara yang dikenakan BMAD oleh Indonesia.

Indikasi *circumvention* terhadap pengenaan BMAD kasus produk baja

lebih mungkin dilakukan dalam bentuk *slightly modification circumvention* berupa peralihan impor dari baja karbon ke baja paduan. Indikasi *slightly modification circumvention* terjadi produk H & I Section asal RRT (2011-2014); produk HRP asal RRT (2013); serta pada produk CRC asal RRT (2013-2015), Korea Selatan (2013-2015), Taiwan (2013-2015), dan Jepang (2013-2015).

Mengingat relatif banyak indikasi *circumvention* atas pengenaan tindakan anti-dumping di Indonesia, maka penting untuk segera dilakukan penyempurnaan terhadap PP No. 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dengan memasukkan klausul tindakan anti-*circumvention* yang setidaknya mencakup bentuk-bentuk *circumvention* dan prosedur tindakan sebagaimana yang telah dilakukan beberapa negara seperti: AS, EU, Australia, dan India.

Untuk mencegah dan mengurangi pengalihan impor baja yang dikenakan BMAD dan sebagai alternatif kebijakan selama belum diberlakukannya ketentuan anti-*circumvention*, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperpanjang

pemberlakuan Permendag No. 28/M-DAG/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan yang akan berakhir pada 31 Desember 2016. Ketentuan impor baja paduan terbukti mampu menekan impor baja paduan, terutama baja paduan berupa H & I Section dan HRP.

Apabila ketentuan anti-*circumvention* sudah diberlakukan, KADI dapat menggunakan hak inisiatifnya untuk memulai penyelidikan terhadap upaya penghindaran atas pengenaan tindakan anti-dumping, khususnya pada importasi produk baja. Perlu diperhatikan bahwa hasil pengkajian ini merupakan indikasi awal *circumvention*, sehingga perlu diselidiki dan dibuktikan lebih lanjut oleh KADI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP, MSi dan Dr. Lukytawati Anggraeni, SP, MSi yang telah memberikan arahan dalam pelaksanaan kajian dalam topik yang sama di tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Alhayat, A. P. (2014). Efektivitas Tindakan Anti Dumping Indonesia 1996-2010. Buletin Ilmiah Perdagangan, Vol. 8 (2), pp. 247-268

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). Ekspor dan Impor. Diunduh tanggal 20 Oktober 2016 dari https://www.bps.go.id/all_newtemplate.php
- Baran, J. (2015). The Impact of Antidumping on EU Trade. IBS Policy Paper 12/2015. Diunduh tanggal 30 Oktober 2017 dari <http://www.etsg.org/ETSG2015/Papers/070.pdf>
- Baskin, S. (2016). Circumvention of Anti-Dumping Measures: Law and Practice of Turkey. *Global Trade and Customs Journal*, Issue 11/12, pp. 528–535
- Bael, I. V. dan J. F. Bellis. (2011). EU Anti-dumping and Other Trade Defence Instruments. The Netherlands: Kluwer Law International
- Brenton P. (2001). Anti-dumping Policies in the EU and Trade Diversion. *European Journal of Political Economy*, Vol. 17, pp. 593-607
- Ganguli B. (2008). The Trade Effects of Indian Antidumping Actions. *Review of International Economics*, Vol. 16 (5), pp. 930-941
- Global Trade Information Services (GTIS). (2016). Global Import/Export Commodity Trade Data. Diunduh tanggal 26 Januari 2016 dari <https://www.gtis.com/gta/>
- Kemendag (2014). Kemendag Terbitkan Permendag Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 tentang Regulasi Impor Baja Paduan. Diunduh tanggal 20 Mei 2016 dari <http://www.kemendag.go.id/id/news/2014/06/05/kemendag-terbitkan-permendag-nomor-28m-dagper62014-tentang-regulasi-impor-baja-paduan>
- Kobayashi, T. (2014). Revisiting the Role of Anti-Circumvention Provisions under the WTO Agreement: Lessons for East Asia. *Korean Journal of International and Comparative Law*, Vol. 2, pp. 139–163. doi 10.1163/22134484-12340037
- Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). (2016). Perkembangan Penanganan Kasus KADI dari Tahun 1996 – Desember 2015. Tidak dipublikasikan
- Konings, J., H. Vandenbussche dan L. Springael. (2001). Import Diversion under European Antidumping Policy. *Journal of Industry, Competition and Trade*, Vol. 1 (3), pp. 283-299
- Lee, M., D. Park, dan A. Cui. (2013). Invisible Trade Barriers: Trade Effects of US Antidumping Actions Against the People's Republic of China. ADB Economics Working Paper Series No. 378. Manila: Asian Development Bank.
- Liu, X. dan H. Shi. (2016). Anti-Dumping Duty Circumvention through Trade Re-Routing: Evidence from Chinese Exporters. Diunduh tanggal 30 November 2017 dari <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2823249>
- Malhotra, N., S. Kassam, dan H. Rus. (2008). Antidumping Duties in the Agriculture Sector: Trade Restricting or Trade Deflecting? *Global Economy Journal*, Vol. 8 (2), DOI: 10.2202/1524-5861.1299
- Moulis, D. (2016). Anti-Circumvention of Anti-Dumping Measures: Law and Practice of Ten World Trade Organization Members – Australia. *Global Trade and Customs Journal*, Issue 11/12, pp. 479–486
- Prusa T.J. (2001). On the Spread and Impact of Anti-Dumping. *The Canadian Journal of Economics*, Vol. 34 (3), pp. 591-611.
- Puccio, L. dan A. Erbahar. (2016). Circumvention of Anti-dumping: A Law and Economics Analysis of Proportionality in EU Rules. *Journal of World Trade*, Vol 50 (3), pp. 391–416.

- Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Puska Daglu). (2013). Analisis Masalah Boron Pada Baja Paduan Lainnya. Tidak dipublikasikan
- Staiger, R. W. dan F. A. Wolak. (1994). Measuring Industry-Specific Protection: Antidumping in the United States. *Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics*, pp. 51-118
- Sud, J. D. (2016). Circumvention of Anti-Dumping Measures: Law and Practice of India. *Global Trade and Customs Journal*, Issue 11/12, pp. 508-514
- Tjahjajari, A. (2015). The Impact of Anti-Dumping Policy on Import Volume of Steel Product in Indonesia: Case Study of Anti-Dumping Policy on Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S). Master Thesis: International Institute of Social Studies
- Vermulst, E. (2012). EU Anti-Circumvention Rules & Practice. Disajikan pada Seminar on Trade Defense Measures pada tanggal 25 April 2012 di Bangkok.
- Vermulst, E. (2016). Circumvention of Anti-Dumping Measures: Law and Practice of the European Union. *Global Trade and Customs Journal*, Issue 11/12, pp. 499-507
- Willems, A. R. dan B. Natens. (2016). What's Wrong with EU Anti-Circumvention Rules and How to Fix It. *Journal of International Economic Law*, Vol. 19 (2), pp. 497-514, <https://doi.org/10.1093/jiel/jgw045>
- World Customs Organization (WCO). (2013a). Glossary of International Customs Terms. Diunduh tanggal 30 November 2017 dari <http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/resources/~media/949B39871CE147BAB2667EC6758F29C8.ashx>
- World Customs Organization (WCO). (2013b). Compliance and Enforcement Package. Diunduh tanggal 30 November 2017 dari http://www.wcoomd.org/~media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/overview/wco_cep_online-brochure_en_for-hyperlinks.pdf?db=web
- Yu, Y. (2008). Circumvention and Anti-Circumvention Measures: The Impact on Anti-Dumping Practice in International Trade. The Netherlands: Kluwer Law International
- Zhou, W. (2016). Circumvention and Anti-Circumvention: Rising Protectionism in Australia. *World Trade Review*, Vol. 15 (3), pp. 495-522. doi:10.1017/S14747456150007

PERANAN NEGARA PERANTARA EKSPOR BAGI INDONESIA

The Role of Indirect Export Country for Indonesia

Azis Muslim

Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, BPPP, Kementerian Perdagangan

Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta 10110, Indonesia

email: azis.muslim@kemendag.go.id

Naskah diterima: 08/07/2017; Naskah direvisi: 23/10/2017; Disetujui diterbitkan: 28/12/2017

Dipublikasikan online: 31/12/2017

Abstrak

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekspor tidak langsung berperan dalam meningkatkan perdagangan. Terlepas dari fakta tersebut, beberapa pemangku kebijakan berpendapat bahwa proses ekspor tidak langsung perlu didorong menjadi ekspor langsung untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan negara perantara ekspor bagi Indonesia dengan cara mengidentifikasi negara yang menjadi perantara dan produknya; serta mengetahui alasan pelaku bisnis melakukan ekspor tidak langsung. Penelitian ini menggunakan metode estimasi untuk mengidentifikasi ekspor tidak langsung Indonesia dengan mitra dagang dari tahun 2009 hingga 2013 dengan menggunakan data UN-Comtrade. Hasil kajian menunjukkan bahwa Malaysia, Thailand, dan Vietnam merupakan negara perantara ekspor Indonesia disamping negara perantara perdagangan internasional konvensional (Singapura, Hong Kong, Belanda, dan Jerman). Ekspor tidak langsung adalah optional bagi pelaku ekspor. Negara perantara ekspor memiliki peran positif untuk memfasilitasi ekspor bagi eksportir yang memiliki keterbatasan. Pemerintah perlu mendorong ekspor tidak langsung jika menguntungkan pelaku bisnis, dan perlu meningkatkan efektifitas peranan Atase dan ITPC dalam memberikan informasi pasar ekspor jika ekspor tidak langsung menjadi penghambat.

Kata Kunci: *Indirect Export, Intermediary Country, Re-export, Entrepot Trade*

Abstract

Some researchers found that indirect export could contribute to increase trade. Likewise, Indonesian policy maker believes that changes of indirect export to direct export will contribute to increase Indonesian export. The purpose of this study is to identify the importance of indirect export for Indonesia especially to identify Indonesian indirect export countries and products, and also to find out the reason of exporters in doing indirect export. This study used indirect export identified process method of Indonesian trade data with trading partners from 2009 to 2013 from UN-Comtrade. The result shows that Malaysia, Thailand, Vietnam as intermediary country for Indonesia besides the conventional intermediary countries (Singapore, Hong Kong, Netherlands, and Germany). Indirect export process is optional for exporters. Indirect export countries have a positive role to facilitate exports for exporters with some limitations. The Government need to push the indirect export if it is profitable for business. On the other hand, If indirect export is an obstacle, it can be reduced by increasing the effectiveness of the role of the Attache and ITPC to give import market information.

Keywords: *Indirect Export, Intermediary Country, Re-export, Entrepot Trade*

JEL Classification: F41, C22, C31, O24

PENDAHULUAN

Fenomena perbedaan pencatatan perdagangan antara dua negara merupakan fenomena umum. Misalkan data ekspor Indonesia ke RRT menurut catatan Indonesia dapat berbeda dengan catatan impor RRT dari Indonesia menurut catatan RRT. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pencatatan ini berbeda. Perdagangan melalui pihak ketiga (*ekspor tidak langsung*) dapat menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan ini.

Isu perdagangan melalui pihak ketiga juga mengemuka pada saat pertemuan Menteri Perdagangan RI dengan *The Secretary for Commerce and Economic Development of Hongkong*, di sela-sela pertemuan APEC MRT tanggal 17-18 Mei 2014 di Qingdao RRT. Dalam forum tersebut, peserta pihak Indonesia melihat bahwa investasi Hong Kong ke Indonesia merupakan yang terkecil dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (Singapura, Thailand, dan Vietnam). Penyebab hal tersebut diantaranya bisa terjadi karena disinyalir sebagian perdagangan antara Indonesia-Hongkong masih dilakukan melalui negara ketiga yaitu Singapura, yang biasa dikenal dengan

istilah *ekspor tidak langsung (indirect export)*.

Ekspor tidak langsung sebenarnya hanya merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan data perdagangan (diskrepansi data). Secara umum, diskrepansi data perdagangan disebabkan oleh dua hal utama (yaitu: masalah yang berkaitan dengan pendataan dan masalah data yang tidak terdata (Puskadaglu, 2012).

Terdapat beberapa keuntungan serta kerugian yang akan didapatkan apabila suatu perusahaan melakukan *indirect export*. Dengan melakukan *indirect export* perusahaan mendapatkan beberapa keuntungan yaitu: kemudahan akses pasar, cukup fokus pada produksi atau pemasaran domestik saja, tidak ada biaya tambahan (R&D, pemasaran, dan strategi penjualan di pasar ekspor), manajemen ekspor ditangani perantara, dan tidak perlu penanganan produk setelah sampai di tujuan ekspor. Sedangkan kerugian yang akan didapatkan adalah: risiko kehilangan pasar lebih besar karena dipegang perantara, tidak punya kekuasaan mengendalikan pasar, dan keuntungan perdagangan lebih rendah

bila dibandingkan ekspor langsung (Peng, 2013).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan *ekspor tidak langsung* atau *intermediary trade* secara umum menyimpulkan bahwa *ekspor tidak langsung* sangat berperan dalam meningkatkan perdagangan suatu negara. Hasil penelitian Schröder, Trabold, & Trübswetter (2003) misalnya dengan menggunakan data ekspor Perancis menemukan bahwa semakin besar biaya akses pasar maka semakin besar *share intermediary trade*, dan semakin kecil pangsa pasarnya maka semakin besar *share intermediary trade*. *Intermediary trade* juga biasanya menjadi “*market makers*” di negara-negara berkembang seperti yang diungkapkan oleh Kumar & Bergstrom (2007). Lebih lanjut, peran *wholesaler* dalam mendorong terjadinya *indirect export* juga cukup besar (Bernard et al., 2011). Beberapa penelitian lain juga menemukan kesimpulan yang sama misalnya Abel-koch(2013), Ahn et al.(2011), Yasar (2015), Glode & Opp (2016), dan Tomasi (2012).

Di Indonesia sendiri masih terdapat banyak perbedaan pendapat terkait dengan peranan negara

perantara dalam ekspor tidak langsung. Pengambil kebijakan memiliki persepsi bahwa Indonesia akan memperoleh manfaat apabila ekspor tidak langsung diubah menjadi *direct* ekspor. Di sisi lain pelaku bisnis sebagian menganggap bahwa ekspor tidak langsung bisa memberikan manfaat yang lebih besar, sebagian lagi justru melihat bahwa ekspor tidak langsung kurang menguntungkan. Persepsi pelaku bisnis sangat ditentukan oleh persepsi masing-masing pengusaha dalam melakukan bisnisnya. Akibatnya bagi pelaku ekspor melakukan ekspor tidak langsung merupakan keputusan bisnis yang rasional. Berdasarkan hal tersebut, guna mendukung kinerja ekspor Indonesia yang semakin meningkat dan berkelanjutan diperlukan kajian “Peranan Negara Perantara *Ekspor tidak langsung* di Indonesia”. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan negara perantara ekspor tidak langsung bagi Indonesia dengan cara mengidentifikasi negara yang menjadi pihak ketiga dan produknya; serta mengetahui alasan pelaku bisnis melakukan ekspor tidak langsung. Diharapkan dengan adanya kajian ini

dapat berkontribusi menambah khasanah pengetahuan khususnya di bidang ekonomi perdagangan internasional.

METODE

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka terhadap metode yang digunakan dalam melihat peranan negara perantara ekspor tidak langsung dalam meningkatkan kinerja ekspor, kajian ini melihat belum terdapat landasan teori yang kuat yang bisa menjadi dasar untuk melihat peranan negara perantara ekspor tidak langsung. Proses identifikasi ekspor tidak langsung sebetulnya mudah apabila terdapat data *re-export* dari barang yang di ekspor. Seperti studi dari Feenstra & Hanson (2004) yang menganalisa peran Hong Kong yang menjadi perantara perdagangan antara RRT dan negara lain. Data penelitian menunjukkan bahwa 53% ekspor RRT dikirim ke Hong Kong sejak tahun 1988 – 1998. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data ekspor dan *re-export* dari Hong Kong Census and Statistics Office.

Manfaat adanya data *re-export* dapat dilihat pada studi Bernard et al.

(2011) dan Bernard et al.(2015) yang membuktikan hipotesanya mengenai pengaruh *wholesaler* dalam mendorong terjadinya *indirect export*. Penelitian tersebut menggunakan uji model regresi terhadap nilai ekspor perusahaan. Untuk menjelaskan nilai ekspor dilibatkan variabel-variabel independen yaitu karakter negara tujuan ekspor, variabel *dummy* apakah perusahaan mengekspor melalui *wholesaler* atau tidak, dan interaksi variabel-variabel tersebut serta biaya-biaya perdagangan yang harus ditanggung oleh perusahaan baik yang bersifat *fixed* maupun yang berubah-ubah.

Penelitian dari Crozet et al. (2013) melakukan uji ekonometrika terhadap *share wholesaler* dalam nilai ekspor. Variabel ini diregresi terhadap nilai PDB negara tujuan ekspor, jarak negara tujuan ekspor, karakteristik negara tujuan ekspor (berbatasan dan berbahasa yang sama), biaya perdagangan, dan *dummy* proteksi perdagangan. Model ini juga mengontrol *fixed effect* dari setiap negara tujuan perdagangan guna menjelaskan faktor-faktor spesifik

negara yang belum dijelaskan oleh variabel-variabel independen¹.

Untuk kasus Indonesia, BPS belum mencantumkan informasi *re-export* dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)². Perlu *proxy* data yang dapat mewakili informasi kejadian *re-export* tersebut. Berdasarkan pada keterbatasan yang ada, penelitian ini membuat sebuah metode untuk proses identifikasi ekspor tidak langsung Indonesia. Metode tersebut seperti yang dijelaskan pada bagian berikut:

- Definisi 1: Nilai ekspor produk k dari Indonesia ke negara i < nilai impor produk k negara tujuan utama dari negara i (definisi 1)
- Definisi 2: Volume ekspor produk k dari Indonesia ke negara i ≤ volume impor produk k negara tujuan utama dari negara i (definisi 2)
- Konsistensi dari kedua nilai identifikasi diatas selama beberapa tahun terakhir memperkuat dugaan terjadinya *indirect export* melalui negara i.

Sebagai contoh, Indonesia melakukan ekspor batubara ke negara

Singapura sebesar USD 1. Lalu, Singapura melakukan ekspor batubara ke RRT sebesar USD 2. Artinya, hal ini memenuhi definisi 1. Apabila Indonesia melakukan ekspor batubara ke negara Singapura sebanyak 1 Kg. Lalu, Singapura melakukan ekspor batubara ke RRT sebanyak 2 Kg. Artinya, hal ini memenuhi definisi 2. Karena definisi 1 dan 2 terpenuhi dan konsisten berarti diduga terjadi *indirect export* melalui negara Singapura.

Untuk saat ini, metode inilah yang paling rasional untuk mengidentifikasi perdagangan ekspor tidak langsung apabila data *re-export* tidak dimiliki, *proxy* ini digunakan sebagai pengganti data *re-export* seperti penelitian Feenstra & Hanson (2004). Selain ini, cara lainnya adalah untuk mendatangi langsung negara-negara singgah dan meneliti formulir kedatangan barang di pelabuhan mereka. Proses seperti ini akan sangat memakan waktu dan biaya, mengingat banyaknya jumlah negara yang perlu diidentifikasi sebagai negara singgah (Feenstra & Hanson, 2004).

Dengan definisi diatas, kajian ini menghitung *incidence*, nilai dan volume perdagangan ekspor tidak langsung Indonesia. *Incidence* adalah

¹Referensi lain mengenai *intermediary* dalam perdagangan dapat merujuk penelitian Bolatto et al. (2017) dan Yue (2016).

²Dalam diskusi terbatas kajian, pihak BPS sebenarnya telah berencana mencantumkan data *re-export* dalam PEB dalam bentuk isian *consignment*, namun belum terealisasi.

banyaknya jenis produk yang diperdagangkan atau lebih sering dikenal sebagai *product line*. Pada penelitian ini sepuluh (10) negara yang merupakan tujuan ekspor utama Indonesiadipilih sebagai sampel untuk mewakili negara utama tujuan ekspor Indonesia. Negara-negara ASEAN tidak dipilih menjadi negara tujuan mengingat lokasi yang sangat dekat dengan Indonesia dan besarnya kemungkinan negara-negara ASEAN menjadi negara singgah produk ekspor Indonesia, sebagai contohnya Singapura telah dikenal sebagai negara perantara ekspor Indonesia. Untuk kawasan Eropa tujuan ekspor tidak diambil per negara namun diambil secara kelompok yaitu Uni Eropa.

Negara-negara yang merupakan *partner* ekspor utama Indonesia, secara berurutan, adalah Jepang, RRT, Uni Eropa, Amerika Serikat, India, Republik Korea, Australia, Saudi Arabia, Turki dan Brazil. Kesepuluh negara tersebut dapat dikatakan mewakili masing-masing benua atau wilayah besar yang menjadi tujuan utama produk Indonesia ke seluruh dunia. Wilayah benua Afrika tidak dimasukkan dalam sampel yang

dianalisis karena ekspor Indonesia ke negara tersebut relatif kecil.

Data penelitian berasal dari UN-Comtrade yang diakses melalui *World Integrated Trade Solution* (WITS). Data penelitian ini adalah data perdagangan Indonesia dengan mitra dagang dari tahun 2009 sampai 2013. Data tersebut tersedia detil hingga level HS 6 digit.

Untuk mendukung metode estimasi di atas, penelitian ini juga menggunakan analisis dengan pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan analisis kualitatif berupa *expert judgement* yang melibatkan dan menggunakan informasi dari berbagai *stakeholders* melalui survey, FGD dan diskusi terbatas untuk menjawab peranan ekspor tidak langsung. Survey dan FGD dilakukan terhadap beberapa Perusahaan (Perwakilan usaha besar dan UKM) dan Asosiasi yang melakukan ekspor. Survey dan FGD dilaksanakan di beberapa tempat di Indonesia (Jakarta/Jawa Barat, Surabaya/Jawa Timur dan Makasar). Hal ini dilakukan untuk melengkapi hasil dari analisis data kuantitatif. Kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini dimaksudkan agar analisis penelitian dapat lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Incidence Ekspor tidak langsung

Tabel 1 meringkas hasil perhitungan *incidence* menjadi urutan negara yang mengalami paling banyak kejadian terjadinya ekspor tidak langsung berdasarkan definisi pertama. Tampak pada tabel tersebut,

Singapura adalah negara terbanyak dengan jenis produk yang diperdagangkan secara *indirect* dari Indonesia. Hal ini sesuai dengan dugaan banyak kalangan bahwa Singapura adalah negara singgah barang-barang dari Indonesia yang diekspor lagi ke negara lainnya.

Tabel 1. Jumlah *Incidence* Terjadinya Ekspor Tidak Langsung Indonesia di Beberapa Negara, Menurut Definisi 1, 2009-2013

Negara	2009		2010		2011		2012		2013	
	incidence	%	incidence	%	incidence	%	incidence	%	incidence	%
Singapura	1622	56,5	1696	61,3	1798	62,2	1790	60,9	1691	58,8
Malaysia	1537	62,9	1591	67,8	1607	69,0	1596	66,9	1553	65,5
Thailand	1382	75,9	1443	79,5	1587	82,5	1573	81,4	1527	79,5
Hong Kong	1115	73,3	1058	75,7	1235	79,0	1255	79,0	1287	78,9
Jerman	1223	75,9	1104	77,0	1140	77,4	1183	77,7	1199	77,8
Vietnam	834	56,8	890	60,6	1059	65,3	1100	67,2	1078	67,1
Italia	899	80,3	875	84,0	840	83,4	883	86,5	896	86,1
Inggris	855	69,0	758	70,4	770	72,8	854	74,3	875	74,6
Filipina	724	51,6	752	53,8	762	55,9	733	54,5	824	54,8
Perancis	818	75,7	788	79,6	792	78,5	865	81,4	821	79,6
Kanada	768	79,7	718	82,0	725	81,5	823	80,5	770	79,2
Belanda	756	57,6	795	62,2	835	62,8	770	61,5	756	61,7
Uni Emirat Arab	627	51,4	649	58,8	687	59,2	666	58,2	725	58,3
Belgia	448	53,5	443	57,0	453	57,9	685	64,6	654	64,1
Spanyol	569	62,6	594	68,8	553	67,2	610	70,7	607	70,5
New Zealand	593	65,4	563	65,2	562	65,7	581	65,1	599	65,1
Afrika Selatan	494	59,6	508	61,8	501	60,4	535	60,3	559	61,2
Meksiko	465	76,0	515	83,2	505	80,5	514	81,5	531	82,1
Swiss	521	87,7	526	91,5	519	93,3	510	92,9	513	91,0
Swedia	335	59,7	336	63,3	304	59,7	299	59,9	341	63,5
Russia	300	58,9	333	62,7	303	57,8	321	56,5	306	54,9
Norwegia	263	75,6	256	76,0	304	80,6	290	80,1	290	79,7
Sri Lanka	267	38,9	266	38,6	307	45,3	312	46,1	288	42,9
Denmark	277	54,0	286	59,3	283	58,4	323	60,4	284	57,1
Austria	315	70,8	266	68,9	264	68,8	310	70,9	259	66,4

Sumber: Data UN Comtrade (2016) diolah

Keterangan: Dihitung menggunakan definisi 1, contoh Singapura pada tahun 2013 terdapat sebanyak 1691 jenis produk yang diperdagangkan secara *indirect* dari Indonesia.

Jerman adalah negara yang paling favorit menjadi negara singgah Indonesia di wilayah eropa (dilihat dari nilai *incidence* pada Tabel 1). Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Jerman

adalah salah satu pintu masuk produk Indonesia ke wilayah Eropa. Dengan demikian, negara tersebut menjadi negara perantara ekspor tidak langsung Indonesia.

Tabel 2. Jumlah *Incidence* Terjadinya Ekspor Tidak Langsung Indonesia di Beberapa Negara, Menurut Definisi 2, 2009-2013

Negara	2009		2010		2011		2012		2013	
	incidence	%	incidence	%	incidence	%	incidence	%	incidence	%
Singapura	1399	48,7	1577	57,0	1641	56,8	1704	58,0	1513	52,6
Thailand	1286	70,6	1388	76,5	1490	77,5	1508	78,1	1474	76,7
Malaysia	1331	54,5	1452	61,8	1468	63,1	1496	62,8	1438	60,7
Hong Kong	1032	67,8	1022	73,2	1165	74,5	1188	74,8	1235	75,7
Jerman	1091	67,7	1029	71,8	1082	73,5	1240	81,4	1134	73,6
Vietnam	779	53,0	879	59,9	1039	64,1	1095	66,9	1061	66,0
Inggris	754	60,9	696	64,6	720	68,1	899	78,2	823	70,2
Italia	736	65,8	802	77,0	764	75,9	838	82,1	814	78,2
Perancis	656	60,7	714	72,1	695	68,9	854	80,3	767	74,4
Filipina	661	47,1	691	49,5	692	50,7	711	52,8	763	50,7
Kanada	641	66,5	661	75,5	670	75,3	795	77,8	711	73,1
Uni Emirat Arab	562	46,1	642	58,2	658	56,7	624	54,5	707	56,8
Belanda	650	49,5	728	57,0	774	58,2	785	62,6	697	56,9
Belgia	353	42,1	378	48,6	399	51,0	680	64,1	608	59,5
Spanyol	460	50,6	529	61,2	486	59,1	588	68,1	541	62,8
New Zealand	478	52,7	497	57,6	492	57,5	539	60,4	532	57,8
Afrika Selatan	403	48,6	443	53,9	444	53,5	447	50,4	505	55,3
Meksiko	405	66,2	476	76,9	475	75,8	456	72,3	504	77,9
Swiss	448	75,4	487	84,7	471	84,7	455	82,9	474	84,0
Swedia	279	49,7	299	56,3	270	53,0	319	63,9	310	57,7
Russia	250	49,1	322	60,6	274	52,3	299	52,6	268	48,1
Sri Lanka	238	34,6	244	35,4	275	40,6	266	39,3	261	38,9
Norwegia	209	60,1	233	69,1	277	73,5	222	61,3	260	71,4
Denmark	228	44,4	253	52,5	259	53,4	306	57,2	257	51,7
Austria	255	57,3	233	60,4	232	60,4	313	71,6	229	58,7

Sumber: Data UN Comtrade (2016) diolah

Keterangan: Dihitung menggunakan definisi 2, contoh Singapura pada tahun 2013 terdapat sebanyak 1513 jenis produk yang diperdagangkan secara indirect dari Indonesia.

Sementara itu, tabel 2 merupakan hasil perhitungan *incidence* menggunakan definisi kedua. Hasil

perhitungan menggunakan definisi ini sedikit berbeda dengan hasil di tabel 1 akibat ketersediaan data. Ada banyak

negara yang tidak menampilkan data volume perdagangan. Selain itu, meskipun data tersedia, tidak semua produk bisa dibandingkan secara langsung karena satuan volume yang berbeda. Dalam perhitungan ini, hanya volume ekspor barang yang menggunakan satuan kilogram yang bisa

dihitung. Oleh karena itu, bagi negara-negara dan produk-produk yang melaporkan volume tidak dalam kilogram akan otomatis dikeluarkan dari analisa. Alasannya, satuan volume yang berbeda (misalnya memakai liter) tidak sama dengan satuan volume kilogram.

Tabel 3. Nilai Ekspor Tidak Langsung Indonesia di Beberapa Negara (Juta dollar), 2009-2013

Negara	2009	2010	2011	2012	2013
Malaysia	14.500	23.000	27.800	39.000	26.000
Singapura	20.000	28.600	38.400	29.600	23.200
Thailand	7.051	11.900	16.600	18.500	17.600
Vietnam	2.051	3.144	3.876	4.719	5.348
Jerman	3.074	5.012	5.576	4.650	5.333
Hong Kong	5.406	5.217	5.897	5.942	4.589
Filipina	2.306	3.171	3.218	4.706	3.989
Italia	2.257	3.452	4.063	3.123	3.448
Afrika Selatan	676	996	4.763	6.627	3.446
Inggris	2.189	3.166	3.532	3.703	3.036
Meksiko	1.552	1.891	2.361	2.768	2.736
Perancis	1.554	2.489	3.431	2.895	2.689
Kanada	1.876	2.475	2.685	2.411	2.436
Belanda	1.070	1.785	1.859	2.288	2.289
Uni Emirat Arab	1.039	1.527	2.095	1.511	1.728
Spanyol	643	1.193	1.379	1.352	1.294
Polandia	260	392	471	840	930
Belgia	585	1.058	801	670	746
Russia	158	306	568	644	539
New Zealand	623	596	368	386	472
Argentina	141	192	191	261	342
Swedia	291	194	144	294	334
Swiss	609	352	380	295	283
Norwegia	76	122	150	201	241
Bangladesh	16	82	186	251	228
Denmark	166	214	319	254	211
Mesir	178	402	143	179	206

Sumber: Data UN Comtrade (2016) diolah
Keterangan: Indirect definisi 1

Nilai Perdagangan Ekspor tidak langsung

Tabel 3 menampilkan ekspor tidak langsung Indonesia per negara singgah berdasarkan nilainya. Negara singgah dengan nilai ekspor tidak langsung terbesar adalah Malaysia. Singapura yang sebelumnya merupakan negara paling banyak menerima jenis produk Indonesia dengan ekspor tidak langsung ternyata menurun peringkatnya. Sejak tahun 2012 Malaysia menggantikan Singapura sebagai negara singgah ekspor Indonesia terbesar. Hal ini didukung data pada tabel 4 dimana Malaysia merupakan negara singgah terbesar untuk ekspor tidak langsung Indonesia dilihat dari volume ekspor.

Volume Perdagangan Ekspor tidak langsung

Tabel 4 menunjukkan bahwa volume perdagangan ekspor tidak langsung Indonesia terbesar adalah melalui Malaysia, diikuti Singapura, Thailand, Vietnam. Dapat disimpulkan bahwa semakin dekat negara singgah maka semakin besar pula volume produknya. Terlepas dari kelemahan data volume yang dijabarkan, terlihat bahwa terjadi penurunan drastis volume perdagangan ekspor tidak langsung melalui Singapura (perbandingan tahun 2009 dan 2013). Namun, terjadi fluktuasi untuk volume perdagangan melalui Singapura.

Tabel 4. Daftar Negara Ekspor Tidak Langsung Menurut Volume Ekspor (Ribu Ton) 2009-2013

Negara	2009	2010	2011	2012	2013
Malaysia	21400	27200	28100	35400	22800
Singapura	7330	10900	14500	4370	4200
Thailand	2270	2740	6350	3880	3850
Vietnam	1040	1580	1950	1470	1760
New Zealand	2300	1550	611	440	1620
Belanda	415	914	906	958	1110
Filipina	570	1180	854	1070	1060
Jerman	565	725	772	685	717
Kanada	634	787	715	574	619
Hong Kong	323	342	331	294	521
Uni Emirat Arab	408	484	844	349	447
Italia	521	525	696	423	420
Inggris	672	561	569	426	385
Perancis	237	305	336	300	298

Bangladesh	10.7	117	222	326	282
Meksikoi	350	198	439	269	248
Spanyol	194	230	292	228	221
Russia	56.9	97.1	128	166	184
Argentina	14.7	22.6	67.1	40.1	143
Belgia	220	145	228	212	135
Afrika Selatan	170	208	433	96.7	120
Pakistan	18	44.2	48	49.8	113
Oman	13	43.2	53.2	73.3	96.5
Mesir	41.7	409	48.6	51.1	69.6
Chile	17.2	26.7	31.2	43.2	63.6
Swedia	14.4	23.1	23.6	39	51.5
Polandia	50.5	48	45.5	31.8	47.2
Sri Lanka	44.7	39.4	50.5	37.7	41.7
Norwegia	12.7	13.7	42.2	46.8	30.6
Denmark	18.5	31.5	93.5	42.7	24.6

Sumber: Data UN Comtrade (2016) diolah
Keterangan: Indirect definisi 1

Produk Ekspor tidak langsung Indonesia

Produk-produk yang kerap menjadi produk *ekspor tidak langsung* dirangkum pada tabel 5 dalam satuan

nilai ribu dollar. Untuk menyederhakan deskripsi produk, maka produk-produk dianalisa pada level 2 digit HS. Produk mesin listrik dan komponennya merupakan yang paling dominan.

Tabel 5. Produk-produk Ekspor Indonesia yang Melalui Ekspor Tidak Langsung Berdasarkan Nilai Perdagangan (Ribu Dollar), 2012-2013

No	hs2d	Deskripsi	2012	2013
1	85	Electrical machinery and equipment and parts thereof	6,251,428	6,912,720
2	27	Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes	5,678,091	5,246,555
3	84	Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof	3,575,833	4,370,696
4	87	Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof.	1,306,902	2,178,137
5	39	Plastics and articles thereof	1,880,152	1,985,176
6	15	Animal and vegetable fats/oils	2,794,359	1,761,101
7	40	Rubber and articles thereof	1,586,564	1,366,338
8	90	Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments	668,798	1,045,375
9	73	Articles of iron or steel.	783,511	882,010
10	29	Organic chemicals, hydrocarbons and their halogenated, sulphonated, nitrated	906,758	863,665
11	38	Miscellaneous chemical products	517,066	830,776
12	64	Footwear, gaiters and the like; parts of such articles	2,307,975	815,930
13	71	Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal	1,113,782	672,506
14	62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted	2,491,244	628,056
15	61	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted	2,558,030	609,831

Sumber: Data UN Comtrade (2016) diolah

Selanjutnya, produk mineral, *boilers*, kendaraan, plastik, minyak hewani dan nabati, karet, optik dan seterusnya adalah produk yang paling sering *melewati* negara singgah. Pada

tabel 5 terdapat juga produk-produk pakaian dan perhiasan yang sejak dulu sudah menjadi produk Indonesia yang favorit menjadi produk ekspor tidak langsung.

Tabel 6. Produk-produk *Ekspor Tidak Langsung Indonesia* Berdasarkan Nilai Perdagangan Per Negara Perantara (Ribu Dollar), Tahun 2013

Negara	No	HS 6 Digit	Deskripsi	Nilai (ribu \$)	% terhadap total ekspor
Singapura	1	854219	Monolithic integrated circuits, nes	281956	1,69%
	2	890520	Floating or submersible drilling	281503	1,69%
	3	271000	Petroleum oils, etc, (excl. crude)	185469	1,11%
	4	847192	Input or output units, whether or not	155356	0,93%
	5	847199	Automatic data processing machines	124047	0,74%
Malaysia	1	271000	Petroleum oils, etc, (excl. crude)	480605	4,51%
	2	270900	Petroleum oils and oils obtained	306309	2,87%
	3	151190	Palm oi (excl, crude) and liquid	244292	2,29%
	4	800110	Tin not alloyed unwrought	176508	1,65%
	5	151919	Industrial monocarboxylic fatty acid	169391	1,59%
Jerman	1	852110	Video recording or reproducing appa	37868	1,31%
	2	854219	Monolithic integrated circuits, nes	23815	0,83%
	3	940360	Furniture, wooden, nes	23648	0,82%
	4	870870	Wheels including parts and accessor	23176	0,80%
	5	950390	Toys nes	17416	0,60%
Belanda	1	271000	Petroleum oils, etc, (excl. crude);	91437	2,23%
	2	180400	Cocoa butter, fat and oil	13123	0,32%
	3	870870	Wheels including parts and accessor	12473	0,30%
	4	291590	Saturated acyclic monocarboxylic ac	11729	0,29%
	5	190190	Other food preparations of flour, e	10816	0,26%

Sumber: Data UN Comtrade (2016) diolah

Apabila karakteristik produk yang diekspor tidak langsung diturunkan ke masing-masing negara singgah (Tabel 6) ternyata setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk kawasan ASEAN, Malaysia merupakan negara dengan nilai *ekspor tidak langsung* terbesar.

Produk yang melalui Malaysia banyak didominasi oleh minyak bumi, minyak sawit dan timah. Untuk Singapura nilai perdagangan *indirect* lebih didominasi oleh produk minyak bumi dan produk rangkaian terintegrasi.

Untuk pasar Eropa relatif didominasi oleh negara singgah

tradisional, yaitu Jerman dan Belanda. Untuk Jerman, produk yang mendominasi dalam *ekspor tidak langsung* Indonesia relatif didominasi produk berteknologi tinggi seperti *video recording*, rangkaian terintegrasi, *sparepart* kendaraan. Berdasarkan survey informasi FGD, di Indonesia terdapat industri perakitan produk-produk Jerman. Untuk Belanda terdapat produk-produk sumber daya alam semisal minyak bumi, coklat, dan tepung terigu.

Untuk mendapatkan gambaran peranan negara perantara ekspor tidak langsung di Indonesia telah dilakukan pula beberapa survey untuk mengetahui persepsi para pelaku ekspor serta pemangku kebijakan terkait. Secara umum para pelaku ekspor³ berpendapat bahwa bagi mereka melakukan ekspor baik secara *direct* maupun *indirect* tidak menjadi masalah utama. Bagi eksportir selama proses ekspor tersebut menguntungkan maka model apapun akan dilakukan.

Terdapat beberapa alasan eksportir melakukan *ekspor tidak langsung*. Hal pertama adalah negara

singgah dari ekspor *indirect* memiliki fasilitas pelabuhan dan transportasi yang lebih bagus/baik dibandingkan dengan fasilitas pelabuhan dan transportasi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai contoh produk karet Indonesia dalam proses eksportirnya ada yang dilakukan secara *indirect* dengan negara singgahnya adalah Singapura. Produk karet yang diekspor biasanya dibawa oleh kapal-kapal Indonesia dengan kapasitas kecil, apabila sampai ke Singapura karet direkspor ke negara tujuan dengan menggunakan kapal berkapasitas besar (*mother vessel*) sehingga bisa mengangkut barang ekspor dengan volume besar. Hal kedua yang menjadi alasan melakukan ekspor tidak langsung adalah eksportir produsen ada yang merupakan anak perusahaan dari Multi National Company (MNC). Sebagai contoh salah satu perusahaan Eropa yang memproduksi *boiler* di Indonesia, produknya perlu diassembling dengan bagian lain untuk menghasilkan produk jadi. Walaupun pasar akhir produknya adalah Amerika Serikat namun karena kebijakan perusahaan induk MNC mengharuskan diekspor terlebih dahulu ke Jerman

³Dipilih berdasarkan hasil olahan data, asosiasi eksportir dengan identifikasi produk yang dominan diekspor secara tidak langsung.

(Berdasarkan keterangan PT. Siemens Indonesia dari hasil FGD). Produk karet sangat terikat oleh musim dalam produksinya, sehingga apabila terjadi kelebihan produksi di musim tertentu maka kelebihan tersebut harus dicari pasar alternatif sementara disamping pasar yang telah ada. Apabila dilakukan pencarian pasar sendiri hal ini akan menjadi biaya tersendiri, dengan adanya perantara di negara singgah maka hal ini dapat dimanfaatkan untuk menembus pasar ekspor yang dikuasai oleh perantara tersebut. Yang terakhir hasil FGD memberikan informasi bahwa untuk memasuki pasar ekspor kadang-kadang pelaku ekspor mendapati hambatan di pasar ekspor dari sisi aturan. Namun, aturan tersebut mungkin diterapkan secara berbeda antara Indonesia dan negara singgah. Untuk Indonesia aturannya relatif lebih restriktif, sehingga para pelaku ekspor menggunakan perantara di negara singgah untuk dapat menembus negara tujuan akhir.

Apa yang diungkapkan pelaku usaha ekspor (beberapa perwakilan asosiasi dipilih berdasarkan hasil pada Tabel 5) di atas nampaknya konsisten dengan beberapa kesimpulan

beberapa penelitian. Studi Ellis (2003) mengidentifikasi beberapa keuntungan model *intermediary trade* dalam perdagangan internasional. Keuntungan itu meliputi: peningkatan efisiensi distribusi barang menuju suatu negara dengan minimalisasi biaya akibat hambatan perdagangan; terbukanya peluang pasar baru dan sumber input baru dengan cara mendorong pertumbuhan produktivitas; serta peningkatan teknologi pemasaran, kredit, pemerataan infrastruktur, pelatihan pemasaran.

Selain itu, sebuah studi dari Jolanda Hessels & Siri Terjesen (2007) mengungkapkan alasan mengapa UKM di Belanda melakukan *indirect export*. Kedua ahli tersebut menjelaskan bahwa ada dua aspek besar yang mempengaruhi perilaku ekspor UKM yaitu *resource dependency* dan *institutional theory*. *Resource dependency* berarti adanya kemampuan suatu perusahaan untuk mengakses sumber daya dari pihak lain di dalam lingkungan dan bagaimana kelangkaan sumber daya bisa mendorong organisasi untuk mencari inovasi dan memakai sumber daya alternatif. Sedangkan, *institutional theory* menjelaskan

bagaimana organisasi bisa mengadopsi perilaku yang dapat diterima dalam lingkungan organisasinya. Hasil dari studi ini menyatakan bahwa *financial access* yang baik dalam lingkup domestik akan lebih mendorong UKM untuk melakukan *indirect export*. Sedangkan pengaruh dari pihak lain dan lingkungan bisnis berpengaruh dalam mendorong UKM untuk mengekspor (Hessels et al. 2007). Sedangkan Crozet et al. (2013) melakukan analisa data perusahaan-perusahaan Perancis guna membuktikan bahwa keberadaan *wholesaler* membantu perusahaan untuk dapat meningkatkan kegiatan ekspor mereka. Hal ini disebabkan karena *wholesaler* menghilangkan kendala yang dihadapi perusahaan untuk mencapai pasar-pasar yang sulit digapai dan dapat membantu perusahaan yang kurang efisien untuk mensuplai pasar-pasar di luar negeri.

Sebuah studi dari Feenstra & Hanson (2004) mengungkapkan lima alasan RRT melakukan *re-export* melalui Hong Kong, yaitu:

1. Hong Kong *traders* memiliki keunggulan informasi perdagangan antara Cina dengan seluruh dunia⁴.

Sebagai negara perantara, Hong Kong bisa mengklaim biaya informasi untuk barang RRT. Keunggulan informasi ini juga yang menyebabkan Hong Kong menjadi *quality control* bagi barang RRT agar sesuai dengan standar internasional (*Quality Sorting*).

2. Penghubung jaringan produksi. *Re-export* dari Hong Kong digunakan untuk mentransfer barang setengah jadi untuk diproduksi di negara lain.
3. *Taxes, tariffs, and Quotas*. Hong Kong menerapkan *corporate tax* lebih rendah.
4. *Multinational firms* menyebabkan kemungkinan *re-export* lebih besar oleh karena adanya *tax benefit*.
5. Jarak antara negara tujuan ekspor dengan RRT yang *cukup* jauh dan bervariasi. Semakin jauh jaraknya, *re-export* semakin mungkin terjadi.

Disamping manfaat yang diperoleh oleh adanya model ekspor tidak langsung ada juga pelaku usaha yang menganggap proses ekspor tidak langsung merugikan mereka. Sebagai contoh ada pelaku ekspor majun (kain bekas) Indonesia dengan pasar Afrika harus melalui negara Thailand. Menurut pelaku ekspor majun tersebut

⁴Hong Kong dikenal sebagai *entrepot* bagi perdagangan Cina (Qian, 2016).

seandainya informasi mengenai negara tujuan ekspor yaitu siapa pembeli dari produk mereka, dapat diketahui, maka menurut mereka ekspor majun dapat dilakukan secara *direct*. Pelaku ekspor majun tersebut mengusulkan agar Kementerian Perdagangan terutama dalam hal ini perwakilan luar negerinya (Atase dan ITPC) dapat diberdayakan untuk mendapatkan informasi akan hal ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengetahui pembeli/industri pemakai kain majun di Afrika.

KESIMPULANDAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disamping sebagai negara singgah perdagangan internasional konvensional (Singapura, Hong Kong, Belanda, Jerman) negara Malaysia, Thailand, Vietnam juga terindikasi sebagai negara singgah ekspor tidak langsung Indonesia. Barang utama yang diperdagangkan Indonesia ke pasar dunia yang melalui ekspor tidak langsung dari ranking nilai perdagangan adalah produk mesin listrik dan komponennya, mineral, boilers, kendaraan, plastik, minyak hewani dan nabati, karet, optik adalah

produk yang paling sering melewati negara singgah.

Terdapat beberapa alasan pelaku ekspor melakukan ekspor secara *indirect*, diantaranya: fasilitas transportasi dan pelabuhan di negara singgah; produsen eksportir merupakan cabang dari MNC sehingga pasar dan jalur pengiriman ditentukan pusat; terdapat gap informasi; adanya produksi berlebih mendorong produsen menggunakan *ekspor tidak langsung*; letak geografis, preferensi perdagangan, besarnya keuntungan dan faktor non-ekonomi. Sehingga negara perantara ekspor memiliki peran positif untuk memfasilitasi ekspor bagi eksportir yang memiliki keterbatasan.

Pada prinsipnya proses ekspor secara tidak langsung adalah optional bagi pelaku ekspor. Apabila menguntungkan pelaku bisnis pemerintah perlu mendorongnya misalnya dengan memberikan informasi pasar ekspor. Apabila merupakan hambatan, dapat dikurangi misalnya dengan peningkatan efektifitas peranan atase dan ITPC dalam memberikan informasi pasar ekspor.

Untuk penelitian lebih lanjut disarankan adanya perbaikan dari sisi data. Disarankan pencantuman informasi data *re-export* dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) segera direalisasikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Dionisius A. Narjoko Phd., Bang Carlos Mangunsong, dan Mas Aditya, atas dukungan serta sarannya baik dalam penelitian yang dilakukan maupun dalam penulisan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan di Puskadaglu atas dukungan moral dan pertemanan selama bekerja di bidang penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada mitra kerja di PDSI Kementerian Perdagangan Indonesia yang telah memberikan bantuan berupa ketersediaan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel-koch, J (2013). *Who Uses Intermediaries in International Trade? Evidence from Firm-level Survey Data*. World Economy. vol. 36.no. 8. pp. 1041-64.
- Ahn, J., Khandelwal, A. K., & Wei, S. J. (2011). *The role of intermediaries in facilitating trade*. Journal of International Economics. vol. 84.no. 1. pp. 73-85.
- Bernard, A. B., Grazi, M., & Tomasi, C. (2011). *Intermediaries in international trade: Direct versus indirect modes of export*. National Bureau of Economic Research.
- Bernard, A. B., Grazi, M., & Tomasi, C. (2015). *Intermediaries in international trade: Products and destinations*. Review of Economics and Statistics, 97(4), 916-920.
- Bolatto, S., Grazi, M., & Tomasi, C. (2017). *Export intermediaries and adjustments to exchange rate movements*. NBER Working Paper No. 17711.
- Crozet, M., Lalanne, G., & Poncet, S. (2013). *Wholesalers in international trade*. European Economic Review, 58, 1–17.
- Ellis, P. (2003). *Are international trade intermediaries catalysts in economic development? A new research agenda*. Journal of International Marketing, 11(1), 73–96.
- Feenstra, R. C., & Hanson, G. H. (2004). *Intermediaries in Entrepot Trade: Hong Kong Re-Exports of Chinese Goods*. Journal of Economics & Management Strategy, 13(1), 3–35.
- Glode, V., & Opp, C. (2016). *Asymmetric information and intermediation chains*. The American Economic Review, 106(9), 2699-2721.
- Hessels, J., Terjesen, S., & others. (2007). *SME Choice of Direct and Indirect Export Modes: Resource Dependency and Institutional Theory Perspectives*. Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMES, 5–9.
- Kumar, S., & Bergstrom, T. (2007). *An explorative study of the relationship of export intermediaries and their trading partners*. In Supply Chain Forum: An International Journal (Vol. 8,

- pp. 12–31). KEDGE Business School.
- Peng, M. (2013). *Global business*. Cengage learning.
- Puskadaglu (2012). Analisis Diskrepansi Perdagangan Luar Negeri. Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri kementerian Perdagangan RI.
- Qian, Y. A. N. G. (2016). Comparative Advantages of Shenzhen Hong Kong Modern Cooperation Zone Analysis and Impact on Hong Kong. *Canadian Social Science*, 12(7), 46-49.
- Schröder, P. J., Trabold, H., & Trübswetter, P. (2003). *Intermediation in foreign trade: when do exporters rely on intermediaries?*. DIW-Diskussionspapiere.
- Terjesen, S.A. (2007). *SME Choice of Direct and Indirect Export Modes: Resource Dependency and Institutional Theory Perspectives*. EIM Business and Policy Research.
- Tomasi, C. (2012). *Intermediaries in International Trade: Direct Versus Indirect Modes of Export*. Centre for Economic Performance. LSE.
- Yaşar, M. (2015). *Direct and Indirect Exporting and Productivity: Evidence from Firm-Level Data*. *Managerial and Decision Economics*. vol. 36. no. 2. pp. 109-20.
- Yue, C. S. (2016). Globalization and Regionalization: Singapore's Trade and FDI. In *Singapore's Economic Development: Retrospection and Reflections* (pp. 169-194).

DETERMINING PRIORITY PRODUCTS OF SMALL MEDIUM ENTERPRISES FOR EXPORT THROUGH TRADING HOUSES

Penentuan Produk Ekspor UKM Prioritas Melalui Trading House

Fitria Faradila, Hasni

Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, BPPP, Kementerian Perdagangan-RI
Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, Indonesia.
email: faradilafitria@gmail.com

Naskah diterima: 28/09/2017; Naskah direvisi: 14/11/2017; Disetujui diterbitkan: 28/12/2017
Dipublikasikan online: 31/12/2017

Abstrak

Upaya mempercepat laju ekspor Indonesia melalui peningkatan ekspor dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan pendekatan yang strategis. UKM telah terbukti sebagai sektor yang mampu bertahan dalam situasi krisis ekonomi domestik dan global. Namun demikian, UKM menghadapi beberapa kendala dalam menembus pasar internasional. *Trading House* dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kriteria prioritas produk potensial ekspor dan sekaligus menentukan produk prioritas ekspor UKM yang akan dimasukkan dalam *Trading House*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari BPS dan data primer yang berasal dari FGD. Metode yang digunakan adalah metode *Analytical Network Process* (ANP). Metode ANP diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih bagus mengingat kemampuannya dalam memperhitungkan interaksi dua arah antar elemen dan kluster dalam kerangka penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria prioritas untuk menentukan produk *Trading House* adalah pangsa ekspor, impor dunia dan ketersediaan bahan baku lokal. Produk prioritas *Trading House* adalah perhiasan dan aksesoris, furnitur, makanan olahan, produk tekstil dan garmen, minyak atsiri (produk spa aromaterapi). Pemerintah perlu segera membangun *Trading House* yang komprehensif dan mensosialisasikan fungsinya kepada pelaku usaha terutama UKM.

Kata kunci: *Trading House*, Ekspor, UKM, Metode ANP

Abstract

One of the efforts to accelerate Indonesian exports can be done through increasing small and medium enterprises (SMEs) which is a strategic approach. SMEs are able to survive in the domestic and global economic crisis even though they experienced some obstacles in getting an access to international market. Trading House could be a solution in overcoming the SMEs difficulties. This study aims to establish priority criteria of potential export products as well as priority of export products of SMEs through Trading House. This study utilized both secondary data coming from BPS and primary data from Focus Group Discussion (FGD), and used Analytical Network Process (ANP) method. The ANP is aimed to give the best solution of the problem since it considers two way interactions between elements or clusters (feedback). The results show that the priority criteria for determining Trading House products include the share of exports, world imports and the availability of local raw materials. Trading House priority products are jewelry and accessories, furniture, processed foods, textile and garment products, essential oils (aromatherapy spa products). The government must immediately build a comprehensive Trading House and socialize its functions to business players, especially SMEs.

Keywords: *Trading House*, export, SMEs, ANP Methods

INTRODUCTION

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) plays an important role on supporting Indonesian economy. It is indicated by significantly growing number of the business units. The number of Micro and Small business units rose on the average of 6.42% and 2.13% per year during 2010-2015.

Furthermore, the trend of starting independent business is also high. For example, around 41% people in labor force age have their own independent business in 2015. The use of social media as one of marketing strategies supports this MSMEs performance (Vasquez & Escamilla, 2014).

In term of output value, Micro and Small business also experienced significant growth. The trend of its output value reached 40.75% per year for micro businesses during 2010-2015, while the output value of small businesses increased on average 37.86% per year.

Unfortunately, the share of MSMEs exports is still low around 15.7% of total non-oil and gas exports in 2014, compared to Korea (43%), China (40-60%) and Taiwan (56%)

(Sato, 2015). In 2014, the value of MSMEs exports reached Rp 186 trillion, increased 2.1% compared to a previous year. The share of Micro Enterprises export to total non-oil and gas export fell by 4.43% compared to 2013, furthermore the share of small businesses also decreased 4.14% while the share of Medium Enterprises increased by 1.90%. In spite of its export contribution that is considered relatively low, the opportunity to grow of the MSMEs is widely open.

The trend of MSMEs share to export is weakened during 2010-2014, however its export value in 2014 showed positive growth. Therefore, Indonesia should be optimistic that the opportunity of MSMEs export can be strived to increase.

The participation of SMEs in the Global Value Chain (GVC) is expected increase exports optimally. Mohiuddin & Su (2014) stated firms are more integrated through GVC. About 62% of Canadian manufacturing SMEs are re-integrated to produce their own products, even 28% of them are successfully incorporated to be the exporters. In addition, participating in GVC will benefit to strengthen

company's technical and managerial capabilities, improving capacity utilization and production efficiency, strengthening corporate credibility, providing a way for SMEs to compete in global markets. However, participating on GVC is a challenge particularly for SMEs. This is because SMEs have constraints and limitations to meet product standards, production capacity, quality standards, logistics efficiency and process standards (Abonyi, 2015).

Currently there are at least five global SMEs products that are affected by GVC involvement: (1) Agriculture products, (2) Processed foods (3) Automotive products, (4) Electronic products (5) Handicrafts. Through GVC, SMEs are involved in providing intermediate input and acting as subcontractors in the production process (Yuhua, 2014).

Participation in the GVC is expected can encourage SMEs product exports. However, Indonesian SMEs are still difficult to engage in GVC, because they do not have access to export information and products that fulfill quality standards (Kadarusman & Nadvi, 2013).

Trading House becomes one of alternative solutions to increase SMEs

export. Reflect from Japan's and South Korea's successful experiences, establishment of Trading House could effectively increase export and help SMEs product marketing. Beside Japan and South Korea, many countries have developed trading house to support their SME export, for instance, Canada, Taiwan and Sweden.

Ortega, et. al (2016) on their research provided a new classification of the MSMEs sector based on the knowledge level. Research finding revealed that almost half of the MSMEs sector in Mexico has lower level of knowledge, and only 10% are classified as highest level knowledge. Adding employees has no significant contribution to MSMEs knowledge and sales, and therefore not effective to improve its performance.

Furthermore, effort to maintain the uniqueness and the quality of exported products requires SMEs to have copyright protection (Intellectual Property Rights/IPR) of their products. These IPR requirements can only be obtained with good cooperation between IPR publishers, SMEs supporting institutions, business associations, and other relevant

government agencies (Sukarmijan & Sapong, 2014).

Trading House is expected to play an active role as bridging tool between SMEs and its access to IPR need. Trading House assisting SME to get IPR certification at the Ministry of Justice and Human Rights which take advantage of the cooperation scheme between Ministry of Cooperative and SMEs with Ministry of Justice and Human Rights that provide free of charge to take care of IPR of SME's export products.

However, the main benefit of trading house to SME is helping them to access the market. Accessing foreign market requires sunk costs, such as marketing and market information gathering, which is too large for typical SME to bear. Hadiyanti (2015) said that the SME frequently experience difficulty in marketing their product that prevent them from competing with larger firms in foreign market. Trading house should be directed to provide the collective marketing service for SME. In other word, Trading House is a means for government intervention to overcome market failure due to public goods problem.

The question is what criteria can be used as a reference to determine what SMEs export products can be improved through Trading House. In addition, which SMEs products that should be selected based on those priority determination criteria. This paper will answer these two problems both criteria and the selected SME product. This paper is in accordance with National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019 which states "marketing and distribution channel integration are supported by market information system and trading house development for SMEs products".

RESEARCH METHODS

The Analytical Network Process (ANP) method is utilized to select the criteria as well as SMEs product or commodity group which to be included in the Trading House. The ANP is believed to have better process over other decision-making methods because it provides more consideration both in the criteria as well as in the option through its feedback feature. There are two stages of ANP in this paper. The first is determining the criteria that will be used to find priority product that are:

1. Source of raw materials (domestic or imported)
2. Trends in output values
3. Indonesia's export growth
4. Growth of export share
5. Growth of world imports
6. Contribution to the Indonesian economy

The second stage is to determine priority products of SMEs that will be included in the Trading House by using the criteria resulted from the first stage. The ANP method has been widely used by previous research to make priority and determine a right decision.

The ANP method is being developed from the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. AHP chooses the alternative priority of choice through hierarchy process in one direction, while ANP takes into account interactions among elements as well as clusters and it has two way tracks or feedbacks of selecting best solution of the problem. As a result, ANP is alleged to give the best composite weights (Vayvay et al, 2012). Several studies have used AHP methods for various aspect. Prabowo (2014) utilized AHP method to select some commodities that are included in priority foodstuffs.

Gorener's study (2012) compared the ANP and AHP methods to determine the priority factors of Strengths, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT) in making decisions on manufacturing companies. Nedjati & Izbirak (2013) research used ANP method to formulate and establish prioritized leading indicator of intellectual capital (IC) for dairy companies.

Alfian research, et. al (2013) also used ANP method to select supplier of paper raw materials for magazine industry. While, research conducted by Jaharnsyah, et.al (2013) formulated a strategy of improving SMEs shoes export in Surabaya by using the ANP method.

ANP analysis consists of two parts, which are:

1. Hierarchy control where network of criteria and sub criteria control the interactions within the system.
2. The second part is a network that shows the influence between elements in a cluster or between clusters.

ANP method describes a decision of choosing problem's solution through a network called control hierarchy. The decision network consists of clusters, elements

and links. A cluster consists of some corresponding elements in a network or sub network. For each network, the cluster of a system with its elements is calculated.

All interactions and feedbacks within a cluster are called inner-dependence, whereas interactions and feedback between clusters are called outer-dependence. Through inner-dependence and outer-dependence, decision makers can describe the concept of interaction relationships between clusters and between elements within a cluster.

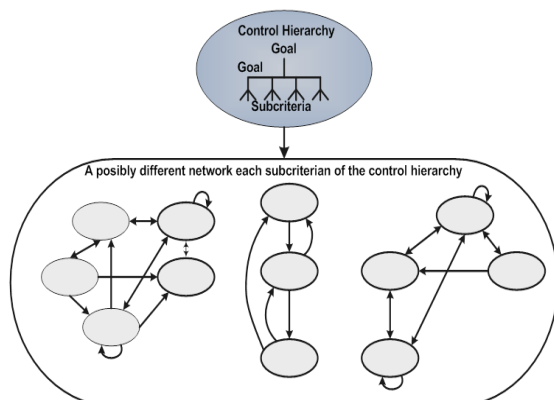


Figure 1. ANP Hierarchy and Feedback

The ANP network structure is represented by a two-lane arrow (circular arc) that shows inter-dependence between clusters. If there is an interaction among elements within the same level of cluster is called a loop. The arrow of a circular

arc signifies a dependency. There are several steps in using ANP method:

1. Develop a network hierarchy of decisions that show the relationship between decision factors
2. Make pairwise comparisons among factors that influence decisions
3. Calculates the relative importance weight vectors of these factors.
4. Creating a super-matrix composed of relative importance weight vectors.
5. Calculates the final weights with super-matrix.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Priority Criteria Determination

The criteria used as a basis for prioritizing product groups to be handled through Trading House is a combination of review and considerations through FGD with relevant stakeholders. Initially there are only six criteria by reviewing the literature. However, the six criteria do not include Indonesia specific criteria. The latter are obtained through FGD. Some criteria used to prepare Priority Trading House products are;

1. The availability of local raw materials. This criteria indicates that the priority product should has plenty sources of raw materials

domestically, and it does not depend on imported raw materials. In addition, an increase in the priority product exports with high local raw material content will also boost the upstream sector.

2. The growth trend of output value. This criterion is indicated by the average growth of production value during 2009-2013. Output value growth trend is used to see the consistency of production processes of the priority products.
3. The trend of Indonesia's export growth. It is indicated by average growth of Indonesian exports during 2011-2015. Export growth

trend is an indicator to observe Indonesia's ability to supply the priority products for international market.

4. Export share growth trend to indicate the size of Indonesia's export capability. The instrument used in this criterion is the average growth of Indonesian export share towards Indonesia's non-oil and gas exports during 2011-2015.
5. World import growth trend which is indicated by the average growth of world import during 2010-2014. This criterion shows the trend of import demand in the world market.

Table 1. Priority Weighted Product Criteria to be handled through Trading House

CRITERIA	Domestic Raw Material					Contribution to Economy			
	Domestic Raw Material	Output Value	Export Value	Export Share	World Import	Contribution to Economy	TOTAL	RANK	WEIGHT
Domestic Raw Material	1,0	1,4	1,2	0,8	0,8	0,8	6,0	3	0,17
Output Value	0,6	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	4,8	6	0,13
Export Value	0,8	1,2	1,0	0,6	1,0	1,0	5,6	4	0,16
Export Share	1,2	1,2	1,4	1,0	1,2	1,2	7,2	1	0,20
World Import	1,2	1,2	1,0	0,8	1,0	1,4	6,6	2	0,18
Contribution to Economy	1,2	1,2	1,0	0,8	0,6	1,0	5,8	5	0,16

Source: Desk Research, FGD

6. Contribution to the Indonesian economy to see the impact of priority product sectors on economic activity, both upstream

and downstream sectors. The indicators used are indexes of both forward and backward linkage from Input-Output (IO) table.

Table 1 presents the analysis on the priority products criteria which is indicated by aggregate sum. Based on the aggregate sum, the table also provides the rank of each criterion. Analysis shows that the priority criteria for determining the products to be handled through Trading House are (1) High export share; (2) High world import; (3) Local raw material available; (4) High export value; (5) High economic contribution; (6) High output value

B. Priority Product Determination

The FGD was conducted by involving SMEs, exporters, institutions that are knowledgeable on Trading House to perform several functions Trading House, and the local government representative which handle export and SME. Each FGD participants are required to provide an assessment of the criteria for the application of Trading House concept. Criteria for selection of the product is determined by the priority weighting

FGD participants. These criteria are: (1) Source of raw materials (domestic or imported); (2) Trends in output value; (3) Indonesia's export growth; (4) Growth of export share; (5) Growth of world imports; (6) Contribution to the Indonesian economy.

After the criteria are determined, the next step is to provide a priority assessment or scoring/weighting for each criterion. Appraisal score for the criteria for the selection of priority criteria was determined and followed by determining the scores of priority product alternatives that have been previously selected. Weighting method is done in the same way that is making pairwise comparison matrix for each alternative pair based on each criterion. Priority synthesis is carried out by the sum of the weights obtained by each product alternative for each criterion. High-ranking products will become export priority products handled through Trading House. The list of priority products to be enhanced through Trading House is reconfirmed and review by all related stakeholders in FGD. The products are as presented in Table 2:

Table 2. Proposed Trading House Products

Group	Products
Handicraft Industry	Furniture
	Wood product handicrafts (rattan, wicker and plait handicrafts)
	Pottery, ceramics, and decorative product
	Jewelry and accessories
	Textile and garment
Fishery Product	Leather and batik product (slipper, shoes, handbag, and wallet)
	Seaweed
	Ornamental Fish
	Mollusca and sea cucumber
Agriculture Oriented Product	Essential Oils
	Ornamental Plants and Flowers
	Coconut product
	Plantation product (coffee, cocoa, cinnamon, ginger, cashew, mangoesteens)
	Processing food

Source: FGD results

Note: * The wood product include carving, painting

B1. Priority Products based on Local Raw Material Availability Criteria

Fishery products, such as ornamental fish, and Mollusca as well as ornamental plants have the highest weight in the criteria of local raw materials which the weight reaches 0.0834. This condition shows that

these two products mostly use local raw materials as production input. In addition, processed food products, such as snacks also have a high weight in this criterion that is 0.08. Meanwhile, the leather and batik products have the lowest weight (0.0573) compared to other priority products.

Table 3. Priority Product Weight Based on Local Raw Material Availability Criteria

No	Priority Product	Weight on Local Raw Material Criteria
1	Ornamental Fish	0,0834
2	Ornamental Plants and Flowers	0,0834
3	Mollusca and sea cucumber	0,0834
4	Processing food	0,0800
5	Seaweed	0,0800
6	Plantation product (coffee, cocoa, cinnamon, ginger, cashew, mangoesteens)	0,0797
7	Furniture	0,0767
8	Jewelry and accessories	0,0700

9	Wood product handicrafts (rattan, wicker and plait handicrafts)	0,0677
10	Essential Oils	0,0642
11	Textile and garment	0,0583
12	Coconut product	0,0583
13	Pottery, ceramics, and decorative product	0,0576
14	Leather and batik product (slipper, shoes, handbag, and wallet)	0,0573

Source: ANP results

B2. Priority Products based on Output Value Growth Criteria

Based on the criteria of output value growth trend, furniture products have the highest weight of 0.2789. This condition shows that furniture production in Indonesia tends to be

consistent and higher than other product groups. In addition to furniture, other products that have a quite high weight in this criterion are plantation products, processing foods (snacks, fruit juices) and coconut product.

Table 4. Priority Product Weight is based on the Output Value Growth Criteria

No	Priority Product	Weight on Output Value Criteria
1	Furniture	0,2789
2	Plantation product (coffee, cocoa, cinnamon, ginger, cashew, mangoesteens)	0,1432
3	Processing food	0,1394
4	Coconut product	0,1335
5	Seaweed	0,1095
6	Leather and batik product (slipper, shoes, handbag, and wallet)	0,0812
7	Wood product handicrafts (rattan, wicker and plait handicrafts)	0,0642
8	Essential Oils	0,0268
9	Textile and garment	0,0161
10	Pottery, ceramics, and decorative product	0,0073
11	Ornamental Fish	0,0000
12	Jewelry and accessories	0,0000
13	Ornamental Plants and Flowers	0,0000
14	Mollusca and sea cucumber	0,0000

Source: ANP results

On the other hand, handicraft products of pottery, metal ceramics

and other decorative products have the lowest weight. The ornamental

fish, jewelry, ornamental plants and sea cucumbers are not included in the criteria of output value growth trend because they have negative growth trend value.

B3. Priority Products based on Export Value Growth Criteria

Jewelry and accessories products have the highest weight of export growth trend criteria. The weight of jewelry and accessories products is 0.6233, much higher than other priority product choices. This condition indicates that the product is

experiencing a five-year average increase which is greater than other products. In contrast, pottery, ceramics and other decorative handicraft products have five-year export value growth trends lower than other products, so the weight value tends to be low. The ornamental fish products, wood products and wicker rattan, coconut products and sea cucumbers are not included in this criterion because they have a negative export growth trend or tend to decline during 2011-2015.

Table 5. Priority Product Weight is Based on Export Growth Criteria

No	Priority Product	Weight on Export Value Criteria
1	Jewelry and accessories	0,6233
2	Textile and garment	0,1375
3	Leather and batik product (slipper, shoes, handbag, and wallet)	0,0472
4	Seaweed	0,0430
5	Ornamental Plants and Flowers	0,0430
6	Furniture	0,0376
7	Processing food	0,0236
8	Essential Oils	0,0230
9	Plantation product (coffee, cocoa, cinnamon, ginger, cashew, mangoesteens)	0,0164
10	Pottery, ceramics, and decorative product	0,0055
11	Ornamental Fish	0,0000
12	Wood product handicrafts (rattan, wicker and plait handicrafts)	0,0000
13	Coconut product	0,0000
14	Mollusca and sea cucumber	0,0000

Source: ANP results

B4. Priority Products based on Export Share Growth Criteria

Jewelry and accessories products have the highest export share growth rate which the weight reaches 0,5010. Textile and garment products also have a high weight of 0.1268. The

ornamental fish has the lowest weight of 0.0196. Rattan and wicker products, coconut products and sea cucumbers are not included in this criterion because the growth of their export share is on average decreased during 2011-2015.

Table 6. Priority Product Weight based on Export Share Growth Criteria

No	Priority Product	Weight on Export Share Criteria
1	Jewelry and accessories	0,5010
2	Textile and garment	0,1268
3	Leather and batik product (slipper, shoes, handbag, and wallet)	0,0574
4	Seaweed	0,0544
5	Ornamental Plants and Flowers	0,0542
6	Furniture	0,0499
7	Processing food	0,0392
8	Essential Oils	0,0388
9	Plantation product (coffee, cocoa, cinnamon, ginger, cashew, mangoesteens)	0,0337
10	Pottery, ceramics, and decorative product	0,0250
11	Ornamental Fish	0,0196
12	Wood product handicrafts (rattan, wicker and plait handicrafts)	0,0000
13	Coconut product	0,0000
14	Mollusca and sea cucumber	0,0000

Source: ANP results

B5. Priority Products based on world Import growth criteria

Essential oils and pottery handicrafts, metal ceramics and other decorative products have the highest world import growth trend compared to other priority products of 0.31 and 0.2786, respectively. This condition shows that both groups of products have a higher trend of world demand than other

products. Meanwhile, rattan and wicker handicrafts actually have the lowest weight value of 0.0045. Some products such as ornamental fish, plantation products, coconut products, seaweed, ornamental plants and sea cucumbers are not included in the criteria of world import growth trend due to negative growth of import demand.

Table 7. Priority Product Weight is based on the Criteria of World Import Growth Trend

No	Priority Product	Weight on World Import Criteria
1	Essential Oils	0,3100
2	Pottery, ceramics, and decorative product	0,2786
3	Furniture	0,1312
4	Leather and batik product (slipper, shoes, handbag, and wallet)	0,0914
5	Textile and garment	0,0908
6	Jewelry and accessories	0,0561
7	Processing food	0,0376
8	Wood product handicrafts (rattan, wicker and plait handicrafts)	0,0045
9	Ornamental Fish	0,0000
10	Plantation product (coffee, cocoa, cinnamon, ginger, cashew, mangoesteens)	0,0000
11	Coconut product	0,0000
12	Seaweed	0,0000
13	Ornamental Plants and Flowers	0,0000
14	Mollusca and sea cucumber	0,0000

Source: ANP results

B6. Priority Products based on Contribution to the Economy Criteria

Based on the contribution to the economy criteria, coconut products such as VCO and coconut fiber/belt have the highest weight of 0.095. Besides that, pottery, ceramics and decorative products also experience high weight which reaches 0.0835. Both groups have forward and backward linkage index above 1

indicating that the development of both industries can contribute to the growth of their upstream and downstream sectors. In addition to these two products, other priority products that have a high enough weight include: (i) processing foods (snack, fruit juice); (ii) ornamental fish; (iii) furniture; (iv) wood, rattan and wicker products; (v) jewelry and accessories; and (vi) sandals, shoes, handbags, handicrafts from batik, leather and combination.

Table 8. Priority Product Weight is based on Contribution Criteria to the Economy

No	Priority Product	Weight on Contribution to the Economy Criteria
1	Coconut product	0,0951
2	Pottery, ceramics, and decorative product	0,0835
3	Processing food	0,0821
4	Ornamental Fish	0,0773
5	Furniture	0,0763
6	Wood product handicrafts (rattan, wicker and plait handicrafts)	0,0763
7	Jewelry and accessories	0,0717
8	Leather and batik product (slipper, shoes, handbag, and wallet)	0,0702
9	Textile and garment	0,0673
10	Plantation product (coffee, cocoa, cinnamon, ginger, cashew, mangoesteens)	0,0672
11	Seaweed	0,0619
12	Ornamental Plants and Flowers	0,0588
13	Essential Oils	0,0575
14	Mollusca and sea cucumber	0,0542

Source: ANP results

B7. Weight of Criteria Based on Priority Products

In ANP method, it is possible to have reciprocal relationship which can be seen from each priority product. In the reciprocal stage, each criteria is compared to one specific options (SME product). The criteria of local raw materials and contribution to the economy cannot be compared with other criteria because of the different data types. Criteria of output value growth trend, Indonesia's export value growth trend, export share growth trend and world import growth trend have the same type of data that is the percentage of growth, so these four

criteria can be compared each other based on priority products.

Based on furniture product, the superior criterion is the output value growth trend, so this criterion is given the highest weight value that is 0,7275. The second highest weight in furniture product is the export share growth trend with a weight value of 0.1546. Meanwhile, on ornamental fish product, an export share growth trend criterion is the only one that is superior, so the weight is 1. The other criteria for the product have a negative growth value, so the weight is 0.

Export share growth trend criteria also have a high weight on pottery,

metal ceramics and other decorative handicraft product by 0.4380. In addition, the criteria of world imports growth trend in these products also have a relatively high weight which reaches 0.3874.

From the processing food products side, the growth trend of output value is superior to other criteria. The weight of this criterion is 0.6633, much higher than the other criteria. Furthermore, the criteria are followed by the growth trend of export share with the weight of 0.2217; Indonesia's export value growth trend with a weight of 0.0981; and world import growth trend of 0.0169.

Reflect in the option of essential oil products or aromatherapy spa products, these four criteria compared to each other have almost the same weight. The highest weight is obtained from the export share growth trend of 0.3769; followed by world import growth trend of 0.2393; the growth trend of output value of 0.2190; and export value growth trend of 0.1649.

The weight for the growth trend of export share and export value have almost the same weight from jewelry and accessories products that are 0,5198 and 0,4755, respectively. The

weight of world import growth trend is very low at 0.0046.

In rattan wood and wicker products, the growth trend of output value has much greater weight than the weight of world import growth trend criteria. The weight of the growth trend of output value was 0.9934, while the world import growth trend only recorded at 0.0066.

The growth trend of output value also have a high weight on plantation products, such as cashew, gambier, mangosteen, coffee, chocolate and ginger which is equal to 0,7250. The growth trend of export share was the second with the weight value reaches 0.2024. The export value growth criterion has the lowest weight of 0.0726.

From the textile and garment products, export share growth trend criterion has the highest weight with a value of 0.5101. In addition to the growth of export share, the export value growth trend criterion also has a fairly high weight of 0.4063. Meanwhile, the weight of the growth trend of output value and world import demand tends to low which recorded at 0.0545 and 0.0290, respectively. In coconut products case, only growth trend of output value that has weigh

because the three others have a negative growth. Consequently, this criterion has weight of 1.

On the other hand, from seaweed product there are only two criteria that can be compared each other, which are the growth trend of export share and export value. Nevertheless, the export share growth trend criteria have a greater weight than the export value growth trend of 0.6307. While, the weight export value growth trend was 0.3693.

Furthermore, based on the products of sandals, shoes, handbags, handicrafts from batik, leather and combination, growth trend of output

value has the highest weight of 0.4077 and followed by export share growth trend criteria and export value growth trend which each has weights of 0.3421 and 0.2069. The weight of world import growth trend is the lowest (0.0433).

Similar to seaweed products, the export share growth trend criteria have a greater weight than the growth trend of export value in ornamental plant products. The weight of the export share growth trend is 0.6314, while the value is only 0.3686. All four criteria on Mollusca and sea cucumber products have a negative growth trend, so they have the same weight of zero.

Table 9. Criteria Weight by Each Priority Product

Priority Product													
	Furniture	Ornamental Fish	Pottery, ceramics, and decorative product	Processing food	Essential Oils	Jewelry and accessories	Wood product handicrafts (rattan, wicker and plait handicrafts)	Plantation product (coffee, cocoa, cinnamon, ginger, cashew, mangoosteens)	Textile and garment	Coconut product	Seaweed	Leather and batik product (slipper, shoes, handbag, and wallet)	
Criteria	Local Raw Material	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Output Value	0,7275	0,0000	0,1076	0,6633	0,2190	0,0000	0,9934	0,7250	0,0545	1,0000	0,0000	0,4077
	Export Value	0,0855	0,0000	0,0670	0,0981	0,1649	0,4755	0,0000	0,0726	0,4063	0,0000	0,3693	0,2069
	Export Share	0,1546	1,0000	0,4380	0,2217	0,3769	0,5198	0,0000	0,2024	0,5101	0,0000	0,6307	0,3421
	World Import	0,0323	0,0000	0,3874	0,0169	0,2393	0,0046	0,0066	0,0000	0,0290	0,0000	0,0000	0,0433
	Contribution to Economy	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Source: ANP Results

B8. Priority Products in Trading House Indonesia

All the weight both on criteria and each product are compiled and calculated using Super Decision software. The final weight on each priority product are transferred to ordered rank on

Table 10. Based on the calculation, it is concluded that jewelry and accessories product is the main priority products that its export need to be improved through Trading House. Jewelry and accessories product dominates in export growth criteria

both in value and share. In both criteria, the product is the first rank based on the weight. It means that the export growth of jewelry and accessories product is higher than other priority product options. Furthermore, on the table 10, export share also has the highest weight among criteria. However, this product is weak in the criteria of output value growth which means that its production

tends to slowdown. In addition to jewelry and accessories product, other potential products include: (i) furniture; (ii) processed foods in the form of snack and fruit juice; and (iii) textile as well as garment products. Meanwhile, ornamental fish products and sea cucumbers, hoi sum, jellyfish are categorized as less prioritized products in Trading House in Indonesia.

Table 10. Total Priority Product Rank

Priority Product	Rank of Each Criteria						Overall Rank
	Local Raw Material	Output Value Growth Trend	Export Value Growth Trend	Export Share Growth Trend	World Import Growth Trend	Contribution to Economy	
Jewelry and accessories	8	12	1	1	6	7	1
Furniture	7	1	6	6	3	5	2
Processing food	4	3	7	7	7	3	3
Textile and garment	11	9	2	2	5	9	4
Essential Oils	10	8	8	8	1	13	5
Leather and batik product (slipper, shoes, handbag, and wallet)	14	6	3	3	4	8	6
Seaweed	5	5	4	4	12	11	7
Plantation product (coffee, cocoa, cinnamon, ginger, cashew, mangoes)	6	2	9	9	10	10	8
Pottery, ceramics, and decorative product	13	10	10	10	2	2	9
Coconut product	12	4	13	13	11	1	10
Ornamental Plants and Flowers	2	13	5	5	13	12	11
Wood product handicrafts (rattan, wicker and plait handicrafts)	9	7	12	12	8	6	12
Ornamental Fish	1	11	11	11	9	4	13
Mollusca and sea cucumber	3	14	14	14	14	14	14

Source: ANP results

CONCLUSION AND POLICY RECOMMENDATION

Priority criteria for determining products included in Trading House are (1) export share; (2) world import; (3) availability of local raw materials; (4) export value; (5) contribution to economy; (6) output value. The analysis using these criteria

successfully identified 14 products that need to be handled through Trading House, five priority products are (1) jewelry and accessories; (2) furniture; (3) processing foods; (4) textile and garment products; (5) essential oil (aromatherapy spa product).

The government must immediately build a comprehensive

Trading House and socialize its functions to business players, especially SMEs. It is better to cover exported products as many as possible on Trading House; however, in the early stage of development, government and stakeholders should focus firstly on some potential products first.

In the initial stages (the first 3-5 years) the government can create a pilot of a Trading House project managed by the state or local government, and if necessary, the next stage may involve the private sector.

ACKNOWLEDGEMENT

Our gratefulness to Head of Center of Foreign Trade Research, Ministry of Trade which allows the authors to use this analysis to be published through Call for paper. Acknowledgments are also made to our colleagues from export sector who have participated in this analysis.

REFERENCES

- Abonyi, George. (2015). Presentation. *SMEs' Participation in Global and Regional Value Chains: Greater Mekong Subregion* Executive Education Programs. Preparing Leaders for a Global Community.
- Alfian, Sandy, I. A., Fathurahman, H. (2013). *Penggunaan Metode Analytic Network Process (ANP) dalam Pemilihan Supplier Bahan Baku Kertas pada PT Mangle Panglipur*. Jurnal Rekayasa Sistem Industri Vol. 2, No.1, pp. 32-39.
- Gorener, Ali. (2012). *Comparing AHP and ANP: An Application of Strategic Decisions Making in a Manufacturing Company*. International Journal of Bussiness and Social Science, Vol.3, No.11, pp. 194-268.
- Hadiyanti, Ernani. (2015). *Marketing and Government Policy on MSMEs in Indonesia: A Theoretical Framework and Empirical Study*. International Journal of Business and Management, Vol. 10, No.2.
- Jaharnsyah, M., Novianti, T., dan Ernaning W. (2013). *Rumusan Strategi Pengembangan Ekspor UKM Sepatu Di Surabaya Dengan Menggunakan Pendekatan ANP*. Jurnal Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura, pp. 1-9.
- Kadarusman, Y. Nadvi, K. (2013). *Competitiveness and Technological Upgrading in Global Value Chains: Evidence from the Indonesian Electronics and Garment Sectors*. *Journal European Planning Studies*, Vol. 21, pp. 1007-1028.
- Mohiuddin, M. Su, Z. (2014). *Global Value Chains and the Competitiveness of Canadian Manufacturing SMEs*. *Academy of Taiwan Business Management Review*, 10 (2), pp. 82-92.
- Nedjati, A and Izbirak G. (2013). *Evaluating the Intellectual Capital by ANP Method in a Dairy Company*. Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences 107, pp. 136 – 144.
- Ortega, E. L., Sanchez, D. C., Godinez, T. B., Herrera, S. M. (2016). *Classification of micro, small and medium enterprises (M-SME) based on their available levels of*

- knowledge. Elsevier, Technovation Vol 47, pp. 59-69.
- Prabowo, D. W. (2014). *Pengelompokan Komoditi Bahan Pangan Pokok Dengan Metode Analytical Hierarchy Process*. Buletin Ilmiah Perdagangan Vol 8, No. 02 Desember 2014, pp. 163-182.
- Sato, Y. (2015). Development of Small and Medium Enterprises in the ASEAN Economies. Japan Center for International Exchange.
- Sukarmijan, S. S. dan Sapong, O. D. V. (2014). *The importance of intellectual property for SMEs; Challenges and moving forward*. Elsevier, UMK Procedia 1, pp.74 – 81.
- Vasquez, G. A. N. dan Escamilla, E. M. (2014). *Best practice in the use of social networks marketing strategy as in SMEs*. Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences 148, pp. 533 – 542.
- Vayvay, O. Ozcan, Y. Cruz-Cunnha, M., M. (2012). ERP consultant selection problem using AHP, fuzzy AHP and ANP: A case study in Turkey. *Journal of Business Management and Economics*, Vol. 3(3). pp. 106-117.
- Yuhua, Zhang. (2014) *Integrating SMEs into Global Value Chains: Policy Principles and Best Practices*. Issues Paper No. 6. Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat.

THE IMPACT OF WORLD CPO PRICE CHANGE TOWARDS PRICES, ECONOMIC ACTIVITIES, AND INCOME DISTRIBUTION IN INDONESIA

Dampak Perubahan Harga CPO Dunia Terhadap Harga, Aktivitas Ekonomi, dan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Wisnu Winardi¹, Hadi Susanto¹, Kadim Martana²

¹Statistics Indonesia, Jl. dr. Sutomo 6-8, Jakarta 10710, Jakarta, Indonesia

²Ministry of Environment and Forestry, Jl. Gatot Subroto, Gedung Manggala Wanabakti Blok I
lt. 3, Jakarta 10207, Indonesia
email: wisnu.winardi@gmail.com

Naskah diterima: 21/12/2016; Naskah direvisi: 10/05/2017; Disetujui diterbitkan: 15/12/2017
Dipublikasikan online: 31/12/2017

Abstrak

Paper ini menganalisis dampak perubahan harga CPO dunia terhadap harga-harga, aktivitas ekonomi, dan distribusi pendapatan rumah tangga di Indonesia dengan pendekatan model CGE. Model pertama mengasumsikan Indonesia tidak mampu memengaruhi harga, sedangkan model kedua mengasumsikan Indonesia mampu memengaruhi harga. Data utama yang digunakan bersumber dari Tabel Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia tahun 2008. Hasil simulasi menunjukkan bahwa apabila Indonesia berperan sebagai penerima harga, peningkatan harga CPO dunia diperkirakan akan berdampak pada penguatan nilai tukar, penurunan tingkat harga, dan meningkatkan aktivitas ekonomi, namun sedikit mengurangi pemerataan distribusi pendapatan. Di sisi lain, penurunan harga CPO dunia akan memberikan dampak yang sebaliknya. Apabila Indonesia dapat berperan memengaruhi harga, perubahan harga CPO dunia diperkirakan akan berdampak sama dengan bila Indonesia tidak dapat memengaruhi harga, namun dengan nilai perubahan yang relatif lebih kecil. Hasil ini mengindikasikan bahwa Indonesia sebaiknya dapat berperan sebagai penerima harga ketika harga CPO dunia bertendensi meningkat dan berperan memengaruhi harga ketika harga CPO dunia bertendensi turun.

Kata Kunci: Harga CPO dunia, Model CGE, Penerima harga, Penentu harga

Abstract

This paper analyzes the impact of world CPO change price towards prices, economic activities, and household income distribution using CGE Models. The first model assumes that Indonesia is a price taker, while the second model assumes that Indonesia could influence the price. The main data were taken from Indonesian Social Accounting Matrix 2008. The simulation results suggest that if Indonesia takes the role as a price taker, an increase in world CPO price will affect exchange rate, decrease prices, and improve economic activities, but it slightly worsened household income distribution. On the other hand, a decrease in world CPO price will bring about the opposite impacts respectively. Conversely, if Indonesia takes the role as a main price influencer, world CPO price change will lead to a similar result with less magnitude impacts. These findings suggest that Indonesia should be able to take the role as a price taker when world CPO price is increasing and as a main price influencer when world CPO price is decreasing.

Keywords: CPO world price, CGE models, Price taker, Price influencer

JEL Classification: D58, E31, F47

INTRODUCTION

In the period of 2011 to 2015, the Indonesian economy grew at the average of 5.51%. One factor that can explain the slowdown was the under performance of export. Weakness of global demand and declining prices were the underlying background coupled with the decreasing price of main export commodities in the international market. One of those commodities is CPO.

In the recent 6 years, world CPO price (Rotterdam market) is relatively fluctuated. From 2010 to 2015, there have been at least six times of uptrends and downtrends. It is noted that in this recent three years, after showing a promising uptrend from December 2012 to February 2014, the price started its plunging tendency until nowadays. The dynamics of world CPO price is strongly influenced by the price of other commodities, besides its global supply and demand (Rahman, 2017). The descending world CPO price in recent two years cannot be disassociated with price weakness on other commodities.

The movement of world CPO price would be transmitted to domestic CPO price. Figure 1 shows that the domestic CPO price (Belawan) is

strongly integrated and move in line with the world CPO price.

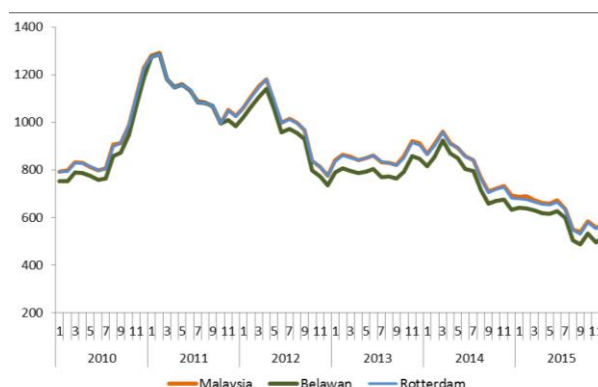


Figure 1. CPO Price at Rotterdam, Malaysia and Belawan, 2010-2015 (USD/MT)

Source: World Bank (2016) & PT. SMART Tbk. (2016), processed

Some studies have argued that the decline of world CPO price has significant share on the weakening of Indonesian Rupiah (IDR) towards foreign exchanges (Aprina, 2014; Aziz & Applanaidu, 2017; and Ashfahany & Priyatna, 2015). The level of world CPO price in November 2013 was 921\$/MT, then declined gradually and in September 2015 touched 538\$/MT. In that respective month IDR was recorded to hit its all-time low position in a decade with 14,653 IDR for 1 USD. This has something to do with large portion of CPO in the Indonesian export of goods as declining of its world price would push the export revenue down and reduce the supply

of foreign currency. The export of CPO on the period of 2008-2014 amounted 10.4-17.6 billion USD, or around 9% of total export of goods.

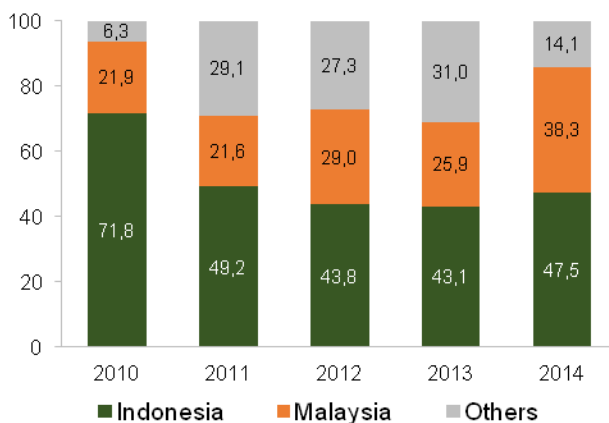


Figure 2. Contribution of Indonesia, Malaysia, and Other Countries in CPO Market, 2010-2014

Source: UN Comtrade (2015), processed

Universally, Indonesia lies at the top on the list of CPO producing countries. During the period of 2008-2014, contribution of Indonesia to the world CPO supply was 41.8-51.4%. Malaysia was in the subsequent position with 35.3-43.1% and other CPO producing countries contributed 11.6-15.2% (Figure 2). It has been several decades for Indonesia to become a main CPO producer.

By considering such position, Indonesia has the potential to take the role as a main influencing country in the world CPO price, which is

commonly stated as a large country role (Appleyard et al., 2008). However such role has not been taken by Indonesia.

This situation has drawn a wide range of awareness among concerning figures. The government and business actors have followed up by trying to reverse the condition by suggesting and making some efforts to place Indonesia as not only price taker, but the price influencer. One of the efforts could be conducted by building CPO marketing pool for physical CPO and futures market in Jakarta (Agustira et al., 2010). By this pooled market, seller and buyer could make efficient, effective, fair, and transparent transactions. Besides, this physical market could be the reference for CPO world price. Another effort could also be conducted by strengthening domestic palm oil market (Office of Chief Economist, 2015). Strong domestic market is expectedly capable to absorb CPO production when global consumption is in decreasing tendency and to minimize its price fluctuation.

At national level, the government also has tried to determine CPO price reference for exporters to set the price and to comply with export tax (ICDX, 2015). By setting CPO export price,

Indonesia is expected to be able to influence CPO world price as Indonesia position as the largest supplier.

In recent time, awareness comes not only from national stakeholders but also from Malaysia. Malaysia's Federal Land Development Authority (FELDA) Chairman said that as Indonesia and Malaysia control more than 80% of the CPO market in the world, these countries have the potential to control its price too (Tempo, 2017). However, the idea of putting Indonesia as a price maker is still unreachable, the world CPO price has not recognized Indonesia CPO price as a reference.

The failure of Indonesia to influence world price of CPO may have incurred unnecessary opportunity costs due to the loss of potential to gain positive effects of being such country, particularly in determining the price, as in this position Indonesia could receive more profit. Regarding that, it is important to identify risks and benefits from being price taker and price influencer when the world price is either increasing or decreasing.

By considering those conditions, this research aims at estimating the impact of CPO world price changing

toward economic activities, prices, and income distribution in Indonesia. The research compares the impact occurred if Indonesia assumed as a small country (acts as a price taker) and Indonesia assumed as a large country (acts as a price influencer) in world CPO price forming. Understanding the impact of both roles in world CPO price forming hopefully could be used as an input for stakeholders in making policies.

To the best of our knowledge so far, unfortunately, there is no preceding research discussing impact of world price in small and large country, particularly in world CPO price. With this regard, this research hopefully could contribute to fill the gap of research availability on this topic.

The following paragraphs will discuss part by part of the paper which are data sources, method of analysis, result and discussion, conclusion and policy recommendations, and limitation of current research.

METHOD

The main data used in the model is the Indonesian Social Accounting Matrix (SAM) 2008 which was published by national statistics office of Indonesia (BPS, 2010).

Basically, this original SAM of Indonesia is designed as a satellite accounts for national accounts data, therefore should be adjusted for modeling purpose. For this research, adjustments on SAM data were done to fulfill analytical purpose and synchronize it with equations used in the model by keeping the consistency in accounts interconnection. Adjustments were done by:

1. changing the transaction from purchaser price to producer price and removing transportation and trade margin block to avoid double counting in commodity price noted in original SAM;
2. merging production sectors, domestic commodities, and imported commodities into sectors block;
3. merging construction sector into industry of chemicals, fertilizer, clay crafts, cement, electricity, gas and water supply;
4. disaggregating row and column of Food, Beverages and Tobacco

Industry into CPO and non CPO. This disaggregation is done by using export data.

As the result of this adjustment, we have a 39x39 SAM matrix consists of 23 accounts on production activities, two accounts on production factors (labor and capital), two accounts on net taxes and tariffs, one capital account, and 11 institutional sector accounts (eighth household accounts, a corporation account, a government account, and rest of the world account). The simple form of this rearrangement result is figured on Table 1.

Other data used in the model are parameters to determine constant elasticity of substitution (CES) and constant elasticity of transformation (CET), which are assumed to be 0.5 for 22 sectors, except for food, beverages and tobacco industry. They are assumed to be 1.5. These parameters are adopted from research done by Teguh (2010).

Table 1. The Framework of SAM

		Production Factor		Institution			Prod. Activity	Capital Account	Net In-direct Taxes	Net Import Tariff	Rest of the World	Total
		Labor	Non Labor	HH	Corp.	Govt.						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Production Factor	Labor	1					T1 6				T1 10	T1 .
	Non Labor	2					T2 6				T2 10	T2 .
Institution	Household	3	T3 1	T3 2	T3 3	T3 4	T3 5				T3 10	T3 .
	Corporation	4		T4 2	T4 3	T4 4	T4 5				T4 10	T4 .
	Government	5		T5 2	T5 3	T5 4	T5 5		T5 8		T5 10	T5 .
Production Activity		6			T6 3	T6 4	T6 5	T6 6		T6 9	T6 10	T6 .
Capital Account		7			T7 3	T7 4	T7 5				T7 10	T7 .
Net Indirect Taxes		8						T8 6				T8 .
Net Import Tariff		9					T9 5					T9 .
Rest of the World		10	T10 1	T10 2	T10 3	T10 4	T10 5	T10 6	T10 7			T10 .
Total			T. 1	T. 2	T. 3	T. 4	T. 5	T. 6	T. 7	T. 8	T. 9	T. 10

Source: authors' rearrangement (2016)

Method of Analysis

Analytical tool used in this paper is CGE models. The model is a static CGE model based on the model used by Winardi (2013). The model is a modification of standard CGE model

developed by Hosoe et al. (2010). The model described a situation characterized with such features as full employment of labor and capital, therefore the simulation result could be noted as having long run impacts.

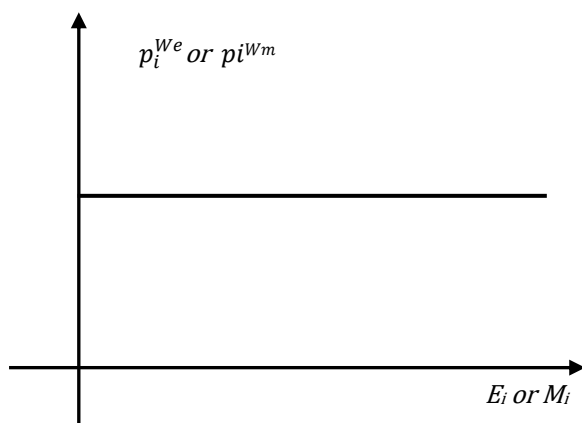


Figure 3. Export Demand and Import Supply for Small Country

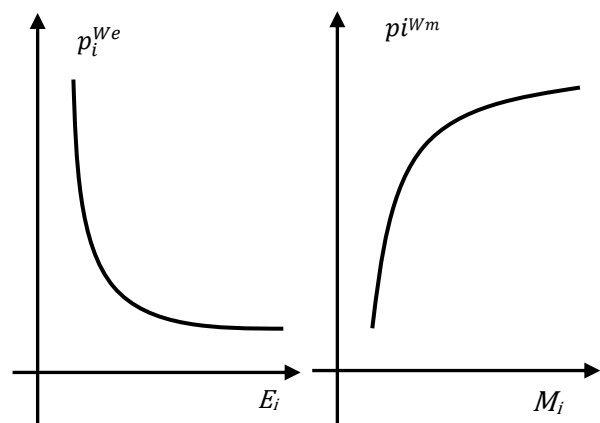


Figure 4. Export Demand and Import Supply for Large Country

Equations used in this model refer to the same research, particularly for small country model, while in large country model, it requires some adjustments. These adjustments are needed to depict the different condition between small and large country.

Within the small country, export and import curves are assumed to be flat and straight lines at the level of international price (Figure 3). This could come into view because as a small country, Indonesia would be considered insignificant to affect either world export price (p_i^{We}) or world import price (p_i^{Wm}).

Conversely, within the large country, export curve are assumed to

$$\frac{E_i}{E_i^0} = \left(\frac{p_i^{We}}{p_i^{We0}} \right)^{-\sigma_i} \quad \forall i \dots \dots \dots (1)$$

$$\frac{M_i}{M_i^0} = \left(\frac{p_i^{Wm}}{p_i^{Wm0}} \right)^{\psi_i} \quad \forall i \dots \dots \dots (2)$$

where:

E_i and M_i	:	Indonesian export and import of the i-th goods (variable)	i -th goods in term of the foreign currency (variable)
E_i^0 and M_i^0	:	initial equilibrium value of Indonesian export and import of the i-th goods (variable)	p_i^{We0} and p_i^{Wm0} : initial equilibrium value of export price and import price of the i-th goods in term of the foreign currency (variable)
p_i^{We} and p_i^{Wm}	:	export price and import price of the	

be convex to the origin (Figure 4, left hand side). This means that the higher export will drive the world price down, because as a large country, Indonesia could affect world price significantly. Meanwhile, the import curve (Figure 4, right hand side) that has an upright concave means the higher import of large country will increase the world price (Hosoe et al., 2010).

Adjustments of the model are done by adding and modifying equations related to export, import, and Armington function (Hosoe et al., 2010). Some of the additional equations are as follows:

σ_i	: elasticity of substitution	ψ_i	: elasticity of transformation
	coefficient of the i-th goods (parameter)		coefficient of the i-th goods (parameter)

Whereas, some of the modified equation are as follows:

$$Arm_{i,rr} = \gamma_{i,rr} (\delta m_{i,rr} M_{i,rr}^{\eta_i} + \delta d_{i,rr} D_{i,rr}^{\eta_i})^{1/\eta_i} \quad \forall i, rr \dots \dots \dots (3)$$

$$M_{i,rr} = \left(\frac{\gamma_{i,rr}^{\eta_i} \delta m_{i,rr} p_{i,rr}^q}{p_{i,rr}^m} \right)^{\frac{1}{1-\eta_i}} \quad \forall i, rr \dots \dots \dots (4)$$

$$Arm_{i,rr} = \left(\frac{\gamma_{i,rr}^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}} \delta m_{i,rr} p_{i,rr}^q}{p_{i,rr}^m} \right)^{\sigma_i} \quad \forall i, rr \dots \dots \dots (5)$$

where:

$Arm_{i,rr}$	: the i-th Armington composite goods (variable)	η_i	: parameter defined by the elasticity of substitution
$\gamma_{i,rr}$	: scaling coefficient in the Armington composite good production function (variable)	$p_{i,rr}^q$	: price of the i-th Armington composite goods (variable)
$\delta m_{i,rr}$ and $\delta d_{i,rr}$	: input share coefficient in the Armington composite good production function (parameter)	$p_{i,rr}^m$	: price of the i-th imported goods in terms of domestic currency (variable)
$M_{i,rr}$	: the i-th imported goods (variable)	σ_i	: elasticity of substitution in the Armington composite good production function (parameter).
$D_{i,rr}$	: the i-th domestic goods (variable)		

The variables above are endogenous, i.e their values should be equal to benchmark values in baseline position and would change accordance with the change (shock) in either parameter or

exogenous variables in the system. Meanwhile, the parameters are exogenous, where detemination of their values are based on SAM data and previous research.

The models belong to the category of neoclassical class with characteristics as follows:

1. following Walras theorem, where equilibrium of quantity and prices is determined by the interaction of producers and consumers in a perfect competition;
2. staged model scheme is applied with following functions:
 - Cobb-Douglas function is applied to optimize the use of labor production factor;
 - Leontief function is used to depict intermediate input and production factor to describe output production;
 - Constant Elasticity of Transformation (CET) function is used in allocating output into domestic product and export;
 - Constant Elasticity of Substitution (CES) function is used to optimize the creation of composite goods originated from domestic and import;
 - market equilibrium is used to allocate composite goods into final demand; and
 - model solution is obtained by maximizing the sum of utilities of

households as objective function.

3. using saving driven as the closure; and
4. small country setting is assumed to represent existing condition whereas large country setting is used to depict ideal and expected condition.

The decision to use CGE as an analytical tool is based on the consideration that the model is suitable to solve what-if analysis. In this case, we use the model to analyze what if world CPO price change would bring impact in case Indonesia takes roles as price taker and as price maker. Besides, regarding economic policy making, this model is more suitable for developing countries compared to other economic models such as: simultaneous equation and other econometric models in analyzing macroeconomic shocks (Oktaviani, 2008). It has something to do with the nature of CGE model that does not necessarily require abundant long series of well presented data, which are commonly unavailable in developing countries. CGE model also provides a good framework to analyze

matters related to structural adjustment: impact of a shock that works through a price change and market incentive in influencing allocation and structure of demand, production, and trade (Robinson, 2006).

Despite those advantages, CGE simulations also have limitations that they are not unconditional predictions but rather work as thought experiments relied on the assumed circumstances and time reference. CGE models strongly rely on calibrated benchmark parameters and there are not validity test for the result of simulation. Besides, CGE models are quantitative yet theoretical and not empirical in the sense of econometric modeling (GTAP, 2017).

Simulations are done with an objective to estimate the impact on the economic activities¹, prices, and income distribution due to various level of simulating shocks. Economic activity is indicated by some variables, such as export, factor income, output, composite goods, and household consumption. Prices are indicated by

price variables, such as export price, import price, domestic price, composite goods price, and exchange rate index. Income distribution is indicated by income received by each household groups and Williamson index with which its calculation is based on households' income and population data from SAM and simulation result.

In general, the simulation scenario consists of two categories, where each category comprises six simulations. At first category, simulations are done by changing world CPO price as much as 10, 25, and 50 percent as external shocks, where other world prices and other parameters are unchanged and Indonesia is considered as a small country. On the other category, every other thing the same with first category but Indonesia is put as a large country.

The variability of shocks is based on the reality that the world CPO price sometimes could go up and down dramatically as ever happened in January 2007-February 2008 and June 2008-November 2008 or move moderately as in other periods.

The impact is stated as percentage (except stated differently) and the calculation is based on

¹ An activity is a process, i.e. the combination of actions that result in a certain set of products (OECD, 2013).

comparison between simulation results and base line values.

RESULT AND DISCUSSION

Based on the simulation result, under the large country assumption, any increase in the world CPO price will drag up real CPO export. The increase in world CPO price could be the representation of increase in external demand. From the view point of producers or exporters, this is a good incentive to boost export. The rise of world CPO price of 10, 25, and 50 percent would likely increase CPO real export as much as 40.74, 128.84, and 269.89 percent consecutively. In this context, the result resembles research conducted by Iskandar (2015), which stated that increase of international CPO price would increase the volume of CPO export of Indonesia.

However, the increase of CPO real export would not equivalent with total of real export. The impact of the world CPO price rise of 25 percent would be smaller than the one of 10 percent. Even at the increase of 50 percent of world CPO price, total of

real export would be smaller than the base line (Table 2). This result confirms the research results conducted by Bergmann et al. (2016), which stated that world commodity price shock would further spillover to other price commodities.

The increase of world CPO price would endorse an increase of CPO real export and some other commodities as well as reduction of production factor cost. Increase of export would therefore increase foreign exchange reserve. Additionally, the reduction of production factor cost would hold up the foreign exchange outflow for compensating foreign production factors. As the result, Indonesian Rupiah gains its strength. The rise of world CPO price of 10, 25, and 50 percent would - in the long term - strengthen IDR as much as much as 3.30, 10.70, and 24.60 percent (Table 3). Rupiah strength as a domestic currency is in line with Bodart et al. (2012) and Al-mulali and Sab (2012) research, which they found out that increases in oil price have caused appreciation of real exchange rate in 12 oil exporting countries.

Table 2. The Impacts of World CPO Price Changes on Economic Activities in Small and Large Country (Percent)

Description	Decrease of World CPO Price			Increase of World CPO Price		
	50	25	10	10	25	50
Impact on small country						
▪ CPO export	-78.51	-53.39	-27.27	40.74	128.84	269.89
▪ Total export	-0.65	-0.31	-0.12	0.10	0.09	-1.05
▪ Factor income	0.10	0.07	0.04	-0.06	-0.19	-0.44
▪ Output	-0.35	-0.25	-0.13	0.20	0.62	1.27
▪ Composite goods	-0.45	-0.32	-0.17	0.25	0.81	1.77
▪ Composite goods price	0.99	0.75	0.39	-0.57	-1.77	-3.87
▪ Household consumption	-0.65	-0.50	-0.25	0.34	1.01	2.31
Impact on large country						
▪ CPO export	-48.86	-25.09	-10.20	10.40	26.33	53.55
▪ Total export	-0.24	-0.09	-0.03	0.03	0.06	0.09
▪ Factor income	0.06	0.03	0.01	-0.01	-0.04	-0.07
▪ Output	-0.23	-0.12	-0.05	0.05	0.13	0.26
▪ Composite goods	-0.30	-0.16	-0.06	0.07	0.16	0.33
▪ Composite goods price	0.64	0.33	0.14	-0.15	-0.34	-0.72
▪ Household consumption	-0.41	-0.21	-0.08	0.08	0.21	0.41

Source: simulation results (2016)

However, an extra strong currency would create negative impact in the form of weaker competitiveness at international market, which therefore would diminish real export.

The strengthening of currency brings effect on the decrease of goods and services composite price. This would in turn bolster household purchasing power on domestic and imported products, which is resulted in an increase of household consumption. The increasing household demand would be

responded by production sectors by increasing output. On the other hand, the increase of output is also supported by the decrease of production factor cost. Although the decrease of production factor cost would reduce household income originated from production factor compensation. However, this negative impact would be smaller than the positive impact caused by the decrease of composite price, which therefore the purchasing power of household would remain safe.

Table 3. The Impacts of World CPO Price Changes on Prices in Small Country and Large Country (Percent)

Description	Decrease of World CPO Price			Increase of World CPO Price		
	50	25	10	10	25	50
Impact on small country						
▪ Exchange rate	5.60	4.10	2.10	-3.30	-10.70	-24.60
▪ CPO export price	-47.20	-21.90	-8.10	6.40	11.60	13.10
▪ Export price	4.90	3.35	1.64	-2.46	-7.57	-15.95
▪ Import price	4.80	3.87	2.03	-3.24	-10.57	-24.36
▪ Domestic price	0.70	0.54	0.28	-0.38	-1.18	-3.80
▪ Composite goods price	0.99	0.75	0.39	-0.57	-1.77	-3.87
Impact on large country						
▪ Exchange rate	3.70	2.00	0.80	-0.80	-2.10	-4.30
▪ CPO export price	-18.90	-7.30	-2.50	2.10	4.70	7.80
▪ Export price	2.99	1.57	0.62	-0.60	-1.57	-3.16
▪ Import price	3.36	1.88	0.76	-0.78	-2.02	-4.17
▪ Domestic price	0.45	0.23	0.11	-0.11	-0.24	-0.49
▪ Composite goods price	0.64	0.33	0.14	-0.15	-0.34	-0.72

Source: simulation results (2016)

The decrease of composite price would be caused by the decrease of two constructing factors, which are domestic output and import (in IDR), where the price of imported goods would fall deeper compared to domestic output price. The decrease of import is caused by the strengthening of IDR compared to most of foreign currencies.

As one of the results, the decrease of import price would bring incentive to an increase in import volume. The increase of domestic output coupled by rising import would increase the availability of composite

goods, which in turn would increase household consumption, which would give hint on a better welfare. In general, a 10, 25, and 50 percent of world CPO price would increase household consumption as much as 0.34, 1.01, and 2.31 percent consecutively. This result confirms the research of Rahardja et al. (2010) that stated the benefit for Indonesia if the global commodity prices are high due to the position of Indonesia as a net commodity producer and exporter.

The result is also in line with research conducted by Quero-Virla (2016) in Colombia. He studied the

effects of oil price changes on the Colombian economy (as an oil exporting country) during 2001:Q1 to 2016:Q2 using a structural vector auto-regression model. The result showed

that increase in the oil price generates a contemporaneous increase in GDP growth, decrease in unemployment, and decrease in inflation.

Table 4. The Impacts of World CPO Price Changes on Household Income Distribution in Small Country and Large Country

Description	Decrease of World CPO Price			Increase of World CPO Price		
	50	25	10	10	25	50
Impact on small country						
▪ Household income (Percent)						
1. Category 1	-0.56	-0.45	-0.23	0.35	1.11	2.60
2. Category 2	-0.57	-0.45	-0.24	0.35	1.11	2.57
3. Category 3	-0.50	-0.41	-0.21	0.32	0.99	2.32
4. Category 4	-0.46	-0.38	-0.20	0.29	0.93	2.18
5. Category 5	-0.55	-0.45	-0.23	0.35	1.12	2.66
6. Category 6	-0.59	-0.47	-0.25	0.37	1.16	2.68
7. Category 7	-0.61	-0.49	-0.25	0.38	1.21	2.84
8. Category 8	-0.68	-0.54	-0.28	0.42	1.33	3.10
▪ Diff. of Williamson index (Point)	-0.0006	-0.0004	-0.0002	0.0003	0.0011	0.0026
Impact on large country						
▪ Household income (Percent)						
1. Category 1	-0.37	-0.19	-0.08	0.09	0.20	0.43
2. Category 2	-0.37	-0.19	-0.08	0.09	0.20	0.43
3. Category 3	-0.33	-0.17	-0.07	0.08	0.18	0.38
4. Category 4	-0.31	-0.15	-0.07	0.08	0.16	0.36
5. Category 5	-0.37	-0.19	-0.08	0.09	0.20	0.43
6. Category 6	-0.39	-0.20	-0.09	0.09	0.21	0.45
7. Category 7	-0.40	-0.21	-0.09	0.10	0.22	0.47
8. Category 8	-0.45	-0.23	-0.10	0.11	0.24	0.52
▪ Diff. of Williamson index (Point)	-0.0004	-0.0002	-0.0001	0.0001	0.0002	0.0004

Notes:

1. Agricultural labor
2. Agricultural employer
3. Non-agricultural rural low category
4. Rural non labor

5. Non-agricultural rural high category
6. Non-agricultural urban low category
7. Urban non labor
8. Non-agricultural urban high category

The increase of world CPO price also has an effect on the household income distribution. By considering the

industrial sectors, a rising world CPO price would affect more on non-agriculture household than non-

agriculture household. Although palm oil as raw material to produce CPO is produced by agriculture sector, the increase of world CPO price would not necessarily enjoyed more by agriculture household. The increase of world CPO price of 10, 25, and 50 percent would increase agriculture household as much as 0.35, 1.11, and 2.58 percent, whereas non agriculture household would seem to be more benefitted by having an increase of 0.37, 1.16, and 2.72 percent consecutively (Table 4).

By distinguishing household into rural and urban classification, the impact of rising world CPO price would benefit more on urban household, while according to income classification, the increase of world CPO price would mostly benefit high income household. This has something to do with the ownership of production factors (especially capital and high skilled labor), which is mostly belong to high income household who live at urban area.

Previous research conducted by Harjanti (2012) indicated similar result. She examined the consequences of international palm oil price fluctuation on domestic palm oil price and assessed price impact on welfare in

Indonesia using econometrics model. One of her finding was increase of international price will be followed by increase of domestic price which would lead to welfare inequality between the poor and the rich.

Another research conducted by Bhattacharyya and Williamson (2016) also indicated the similar result. The research studied the distributional impact of commodity price shocks in Australia using GARCH model and found that commodity price shocks increase the income share of the high income groups in the short run.

This simulation result indicates bigger gaps between industrial sectors, area (urban and rural) and income group of household for any change of world CPO price. Williamson index shows that for an increase of world CPO price of 10, 25, and 50 percent would worsen income inequality as much as 0.0003, 0.0011, and 0.0026 point. Regardless its small numbers, still it requires proper attention and anticipation to avoid the negative impact.

According to simulation result, the rising world CPO price is estimated to bring generally similar impact with posing Indonesia either as a small country or as a large country. The

difference lies in the magnitude of the impact. As an example, the impact on export for Indonesia as a price influencer, the rising world CPO price would increase real export appropriately. It could happen because the currency strengthening of a large country would not be as big as the small country, therefore the export price at international market would be kept competitive.

The simulation result on the decrease of world CPO price shows an opposing impact compared to the impact of increasing world CPO price. In general, the decreasing world CPO price would bring adverse effect on the Indonesian economy. Income equality among household would become the only good result (Table 4). However, the improved income equality does not deserve applause since the reason behind it is mostly by the income contraction of all groups of households. The income of agricultural households drops deeper than the income of non-agricultural households. The income of urban households declines deeper than the income of rural households. The higher level households have more severe income contraction than lower level households.

This result is in line with research done by Kitous et al. (2016) which almost similar with report released by International Monetary Fund. The Fund analyzed the declining commodity price toward countries' economy. The report stated that the recent drop in commodity prices has been accompanied by pronounced declines in real GDP growth rates, much more so in commodity-exporting countries than in other emerging market and developing economies (IMF, 2015).

The decreasing world CPO price would bring more stable impact if Indonesia is posing as a large country. The role as large country would be ideal to be taken at the time of decreasing trend of all commodities to mitigate the adverse impact. By taking the role as a large country, Indonesia would have capacities to influence world price significantly. So then the world CPO price could be set to expected price. With this privilege to influence the price, the world CPO price would be more predictable, with which the impact of world CPO price toward the domestic economy could be more manageable.

CONCLUSIONS AND POLICY RECOMMENDATIONS

Based on the above description, world CPO price changing would affect economic activity, price level and income distribution in Indonesia. Magnitude of the impact depends on the role taken in price forming and the price shock scale. In the forming where Indonesia takes the role as a price taker, the rising world CPO price is estimated not only to increase economic activity, to strengthen the currency, to lower prices, but also to enlarge income gap. The bigger shock given to the model, the impact would also get bigger.

If posing as a price influencer, the rising world CPO price would bring similar direction of the effect but with smaller scale. One of the differences happens on the value of real export, where bigger shock on world CPO price would bring an increase on real export. On the other hand, by posing as a price taker, the bigger price shock would weaken real export or even cut it down. It is caused by high currency strengthening at price taker position.

The decrease of world CPO price is estimated to have opposing impacts compared to its increase, where the impact as a price influencer

is smaller than the impact as a price taker.

Based on this finding, Indonesia would be able to get more benefit at the world CPO market by optimizing its role on the price forming, by being able to play the role either as a price taker or price influencer on the right time. In which Indonesia should take role as a price taker when world CPO price is increasing and as a price influencer when world CPO price is decreasing.

At the bullish commodity market, being a price taker would bring benefit in terms of economic activity, currency strength, domestic price and household income. The policy in deciding to take the role as a price taker should be accompanied by supporting policies intended to mitigate the widening income gap as the consequence of being a price taker.

Besides, it would be also important to wisely manage the extra income from increased world CPO price. Therefore Indonesia would be able to manage currencies, especially at the hard times.

On the other way around, if the world CPO price tends to decline, being price influencer would bring a lot of benefits due to ability to manage the price. In such position, Indonesia

would be able to minimize following adverse effects that would probably occur, such as economic activity declining, currency weakening, prices increase and contraction of household income. Therefore this choice of price forming should be accompanied by policies with “pro-growth” characteristics, where part of budget could originate from financial profit received when world CPO price is high.

This conclusion should also be supported by detail information and proper strategies before it is brought into implementation. Therefore further related researches are strongly encouraged.

ACKNOWLEDGEMENT

We would like to thank Associate Professor Nobuhiro Hosoe, Ph.D. from GRIPS-Japan for his assistance and helpful advice in learning the model. We also thank Febtina Setya Retnani for her assistance in preparing the data. All errors remain our own.

REFERENCES

Agustira, M.A. and A. Jatmika. (2010). Membentuk Harga Referensi CPO Dunia di Indonesia. *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, Vol. 32 (6), pp.16-18.

Al-mulali, U., C.N.B.C. Sab. (2012). Oil Price and The Real Exchange Rate in Oil Exporting Countries. *OPEC Energy Review*, Vol. 36, pp. 375-382.

Appleyard, D.R., Field, A.J.JR., Cobb, S.L. (2008). *International Economics*. New York: McGraw-Hill.

Aprina, H. (2014). The Impact of Crude Palm Oil Price on Rupiah's Rate. *Bulletin of Monetary, Economics and Banking*, Vol. 16 (4), pp 295-314.

Ashfahany, A. E. and M. F. Priyatna. (2015). Analysis of World Crude Palm Oil Prices on the Real Exchange Rate: A Case Study of Indonesia and Malaysia. Paper: presented on International Conference on Trends in Business and Economics on May 29-30, 2015 at Holiday Inn Express London (UK).

Aziz, M.I.A and S-D. Applanaidu. (2017). Effects of Palm Oil Price on Exchange Rate: A Case Study of Malaysia and Indonesia. *Institutions and Economies*, Vol 9 (4), pp. 71-87.

Badan Pusat Statistik. (2010). *Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2008*. Jakarta: CV. Dharma Putra.

Bergmann, D., D. O'Connor, and A. Thümmel. (2016). An Analysis of Price and Volatility Transmission in Butter, Palm Oil and Crude Oil Markets. *Agricultural and Food Economic*, Vol. 4, pp. 1-23.

Bhattacharyya, S. And JG. Williamson. (2016). Distributional Consequences of Commodity Price Shocks: Australia Over a Century. *The Review of Income and Wealth*, Vol. 62, pp. 223-244.

Bodart, V. B. Candelon; J-F. Carpentier. (2012). Real Exchanges Rates in Commodity Producing Countries: A Reappraisal. *Journal of International Money and Finance*, Vol. 31, pp. 1482-1502.

GTAP. (2017). GTAP Models: Computable General Equilibrium

- Modeling and GTAP. Downloaded on May 2, 2017 from https://www.gtap.agecon.purdue.edu/models/cge_gtap_n.asp.
- Harjanti, M. (2012). The Impact of Palm Oil Price Swings on Household Welfare: The Case of Indonesia. Research Paper. Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands.
- Hosoe, N., K. Gasawa, and H. Hashimoto. (2010). *Textbook of Computable General Equilibrium: Programming and Simulations*. Great Britain: Palgrave Macmillan.
- ICDX. (2015). News and Updates. Downloaded on December 30, 2015, from http://www.icdx.co.id/newsandupdate/detail/indonesia_harus_menjadi_a_cuan_sawit_dunia.
- International Monetary Fund. (2015). World Economic Outlook: Adjusting to Lower Commodity Prices. Washington.
- Iskandar, A. (2015). Dampak Perubahan Harga Crude Palm Oil (CPO) Dunia Terhadap Value Ekspor Komoditas Kelapa Sawit dan Perekonomian Indonesia (Pendekatan Vector Autoregression Analysis). *Jurnal Info Arta STAN*, Vol. 2, pp. 1-17.
- Kitous, A., B. Saveyn, K. Keramidas, T. Vandyck, RL. Santos, K. Wojtowicz. (2016). Impact of Low Oil Prices on Oil Exporting Countries. *JRC Science for Policy Report*; EUR 27909 EN; doi: 10.2791/718384.
- OECD. (2013). Glossary of Statistical Terms: Activity. Downloaded on May 3, 2017 from <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=30>.
- Office of Chief Economist. (2015). *Indonesia Update*. Downloaded on July 13, 2017, from <http://mandiri-institute.id/indonesia-update-2015/?upf=dl&id=1495>.
- Oktaviani, R. (2008). *Model Teori Ekonomi Keseimbangan Umum: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi IPB.
- PT. Smart Tbk. (2015). International CPO prices. Downloaded on December 1, 2016, from http://www.smart-tbk.com/ir_international_prices.php.
- Quero-Virla, L. (2016). Macroeconomic Effects of Oil Price Fluctuations in Colombia. *Ecos de Economía: A Latin American Journal of Applied Economics*, Vol. 20, pp. 23-38.
- Rahardja, S., E. Aldaz-Carroll, and M.S. Lauro. (2010). Managing Commodity Price Shocks in Indonesia, in: Bank, Boom, Bust and Up Again? Evolution, Drivers and Impact of Commodity Prices: Implications for Indonesia. *A Trade Development Report*, Vol. 2 (58831). Jakarta: The World Bank Office Jakarta.
- Rahman, AKA. (2017). Impact of Palm Oil Supply and Demand on Crude palm Oil Price Behavior. Downloaded on May 10, 2017 from <http://www.pointers.org.my/slide/slides116.pdf>.
- Robinson, S. (2006). Macro Models and Multipliers: Leontief, Stone, Keynes, and CGE Models. Poverty, Inequality, and Development. In de Janvry, A. & Kanbur, R. (Ed.). *Economic Studies in Inequality, Social Exclusion and Well-being*, Vol. 1 (pp. 205-232). New York: Springer Science.
- Teguh, D. (2010). Volatility of World Rice Prices, Import Tariffs and Poverty in Indonesia: a CGE-Microsimulation Analysis. MPRA Paper 31451. Downloaded on February 7, 2012, from http://mpa.ub.uni-muenchen.de/31451/1/MPRA_paper_31451.pdf.
- Tempo. (2017). Indonesia, Malaysia Poised to Set World CPO Price. Downloaded on May 2, 2017 from <https://en.tempo.co/read/news/2017/>

04/23/056868763/Indonesia-Malaysia-Poised-to-Set-World-CPO-Price.

UN Comtrade. (2015). International Trade Data. Downloaded on December 28, 2015, from <http://comtrade.un.org/data/>.

Winardi, W. (2013). Dampak Kenaikan Harga Kedelai Dunia dan

Penghapusan Tarif Impor Kedelai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal BPPK*, Vol. 6 (1), pp. 15-28.

World Bank. (2016). Commodity Markets. Downloaded on December 1, 2016, from <http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>.

THE LEVEL OF COMPARATIVE ADVANTAGES OF WORLD MAIN COFFEE PRODUCERS

Tingkat Keunggulan Komparatif Produsen Utama Kopi Dunia

Nia Rosiana¹, Rita Nurmalina², Ratna Winandi², Amzul Rifin²

¹Study Program of Agricultural Economics, Graduate School of Bogor Agricultural University,
Jl. Kamper Wing 5 Level 4, Darmaga, Bogor, Indonesia

²Faculty of Economics and Management, Bogor Agricultural University,
Jl. Kamper Wing 4 Level 5, Darmaga, Bogor, Indonesia
email: niarosiana@gmail.com

Naskah diterima: 20/10/2017; Naskah direvisi: 02/12/2017; Disetujui diterbitkan: 20/12/2017
Dipublikasikan Online: 31/12/2017

Abstrak

Tingkat pertumbuhan produksi kopi dunia cenderung menurun dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan konsumsi kopi dunia. Hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi kopi di negara-negara penghasil utama. Hal ini berdampak pada jumlah kopi yang diekspor untuk pemenuhan kebutuhan kopi dunia. Penelitian ini menganalisis tingkat persaingan antar negara produsen utama dalam lima periode waktu dengan menggunakan analisis *Revealed Comparative Advantage* (RCA) dan *Dynamic Revealed Comparative Advantage* (DRCA). Hasil menunjukkan bahwa pada periode 2001-2003, rata-rata pertumbuhan daya saing antar negara paling tinggi dibanding periode lainnya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan ekspor yang cukup signifikan dari negara Honduras yang berdampak pada nilai RCA. Dalam periode 2012-2015, Colombia merupakan negara yang memiliki tingkat pertumbuhan daya saing paling tinggi karena peningkatan jumlah ekspor yang cukup signifikan. Perubahan daya saing dapat mempengaruhi perubahan posisi pasar ekspor suatu negara. Dalam periode 2012-2015, terdapat penurunan pangsa pasar yang terjadi di Vietnam, Ethiopia, India, Honduras, Guatemala dan Peru sedangkan peningkatan pangsa pasar terjadi di Brazil, Colombia, Indonesia, dan Uganda. Posisi Indonesia di pasar kopi dunia tahun 2015 yaitu *failing stars* dimana pangsa kopi Indonesia lebih tinggi dari pangsa kopi dunia. Peningkatan daya saing akan meningkatkan pangsa pasar suatu negara yang didukung oleh peningkatan teknologi, kualitas dan produktivitas kopi.

Kata Kunci: Ekspor kopi, Keunggulan Komparatif, Kopi, Pangsa Pasar

Abstract

The rate of world coffee production growth tends to decrease compared to the growth rate of world coffee consumption. This is due to the decline of coffee production in some major producing countries. This has an impact on the quantity of exported coffee to meet the demand of world's coffee. This paper analyzed the level of competition among major producing countries in five periods of time using the analysis of RCA and DRCA. The results showed that during the period 2001-2003, the average growth of competitiveness among countries was found to be the highest compared to other periods. This was due to a significant increase in export from Honduras which affected the value of RCA. During the period 2012-2015, Colombia became a country that achieved the highest growth rate of competitiveness due to the significant increase in the number of export. Change in competitiveness can affect the export market position of a country. During the period 2012-2015, the decline in market share occurred in Vietnam, Ethiopia, India, Honduras, Guatemala, and Peru, while the increasing market share occurred in Brazil, Colombia, Indonesia, and Uganda. Indonesia's position in the world coffee in 2015 was at failing stars in which the coffee share in that country was higher than in the world market. Increased

competitiveness will enhance the market share of a country that is supported by improvement of the technology, quality and productivity of coffee.

Keywords: *Export of Coffee, Comparative Advantage, Coffee, Market Share*

JEL Classification: F13, Q02, Q17

INTRODUCTION

The growth of world coffee consumption was faster than the world coffee production during the period of 2012/2013-2015/2016 (ICO, 2016). The level of world production experienced a decrease of 1.89 percent during that period, while the world consumption growth increased by 4.08 percent. In 2015/2016, coffee production in the world reached 147 994 (000 bags) while the world consumption of coffee reached 151 303 (000 bags).

The decrease of the world coffee production was due to the decline of production in the main coffee producers including Brazil, Colombia, and Indonesia (ICO, 2016). In fact, the increase of coffee consumption was caused by several reasons, such as: (1) the growth of coffee consumption in some countries (e.g. Russia, Eastern Europe, China), (2) changes in cultural pattern of drinking coffee, that is from conventional system (drip coffee) to modern pattern (espresso), (3) an increase in living standard and life

style which promote the increasing consumption of coffee in some producing countries such as Brazil, Mexico, Indonesia, Vietnam, and India (GAEKI, 2014).

The biggest robusta coffee producer during the growing season of 2015/2016 was dominated by Brazil which amounted to 2,905, 380 tons. Brazil produces two types of coffee, namely Arabica and Robusta, yet Arabica production is far higher than that of Robusta. Brazil becomes the world biggest of Arabica coffee producer for its successful programs to enhance the productivity, thus resulted in increasing production (Kustiari, 2007). Besides, there are some Arabica coffee producing countries, among others, Colombia, Ethiopia, Honduras, Guatemala, and Peru (ICO, 2016)

The second biggest world producing country is Vietnam in which Robusta coffee is mostly produced. This brings Vietnam as the biggest Robusta coffee producer in the world reaching 1,650,000 tons in 2015-

2016. Other Robusta coffee producers are Indonesia, India, and Uganda (ICO,2016). Indonesia produces Robusta and Arabica coffee but Robusta production has gained almost 74.76 percent (Ditjenbun, 2015).

Generally, some of the world major producing countries can meet the domestic need of each country. Moreover, the surplus of coffee production in each country will be exported to various export destination countries. During 2000-2015,there was an increase in the world coffee export by 31.49 percent with the export growth rate of 4.70 percent per year. The quantity of world coffee export in 2015 reached 6 944,589 ton, while it was only 5,281,467 ton in 2000. During the last fifteen years, Brazil achieved the highest export growth compared to the other major exporters. However, a country with the decreasing trend of export growth was Guatemala with the growth rate of - 37.11 percent. This condition was due to coffee farmland conversion for non-agricultural investment and disease attacks on coffee leaves which led to declining production of Guatemala coffee export.

The fluctuations in the value of exports of coffee in international trade

can not be separated from the competitive and comparative advantage which are deeply affected each other (Baroh *et al.*, 2014). Fluctuation of coffee export quantity in several major exporting countries for the last fifteen years is expected to support a country position in facing the competition with other major exporters.

The number of fluctuating exports is due to supply and demand factors (Krugman & Obstfeld, 2005; Salvatore, 1997). The supply factors are production quantity, export price, domestic price, exchange rate, raw material import, and policy. The price of coffee and the price of production means such as fertilizer can affect the amount of coffee production (Luthfi & Azhar, 2011). The higher the coffee production the higher the amount of coffee that can be exported. In addition, the existence of a country's tariff policy has an impact on the amount of coffee exports (Kustiari, 2007). Another factor is that the membership of export destination countries in the World Trade Organization has a positive impact on the export volume (Meiri, 2013). The demand factors affecting coffee exports include export prices, real exchange rates, world revenues, and

devaluation policies. The high value of coffee exports is determined by the quality of coffee (Dradjat et al., 2007; Gebre, 2015). The exported coffee should meet the requirement of International Coffee Organization No 407 about Coffee Quality Improvement Program. Quality and continuity of coffee become the main concern of exporting countries in fulfilling the export market.

The growth in the volume of coffee exports of the world's coffee-producing countries such as Brazil, Honduras, Guatemala and Peru is lower than its production growth during the 2000-2015 period. However, the opposite is shown in Colombia, Ethiopia, Indonesia, Vietnam, India and Uganda. The different conditions will affect the coffee trade of a country in the international market.

Competitiveness analysis is important in global competition or hyper competitive (Tambunan, 2001). Hyper competitive analysis will make each country determine the right strategy to survive in the increasingly difficult level of competition (Hamdy, 2001). Strong-and-weak competitiveness of a commodity in the international market largely determines the size of the export volume of a

commodity. That change is due to the ability of a country to meet the demand of consumer and international requirement of exporting coffee. Based on those conditions, it is important to analyze the level of competition and position major exporting countries in dynamic of time. Furthermore, it is necessary to make strategic efforts to improve the competitiveness of a country through various policy recommendations.

METHODS

This study analyzed the competitiveness of coffee according to the coffee export in major exporting countries such as Brazil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Ethiopia, India, Honduras, Uganda, Guatemala, and Peru. This research applied method of Revealed Comparative Advantage (RCA) to analyze coffee competitiveness level of a country. Change in competitiveness can affect the change in export market position of a country thus it was analyzed using the Dynamic Revealed Comparative Advantage (DRCA). Data used were time series data between 2000-2015 which included ten world major coffee exporting countries. Source of data was obtained from the International

Coffee Organization (ICO 2016) and United Nation Comtrade Database (UN-Comtrade, 2017).

The amount of export of a country indicates comparative advantage of a country. It can be determined by using Revealed Comparative Advantage (RCA) or Balassa index. The higher the comparative advantage of a specific product, the higher the possibility of a country as a net exporter becomes (Widodo, 2010). It is shown by RCA value that is greater than one. If RCA value is less than one, it indicates that the country does not have comparative advantage, thus the value of RCA is $0 \leq RCA_{ij} \leq \infty$. It can be seen in equation 1 and 2.

$$RCA_j = \frac{(x_{ij})(\sum_j x_{wj})}{(x_{wj})(\sum_j x_{ij})} \dots\dots\dots(1)$$

$$RCA_j = \frac{\frac{x_{ij}}{\sum_j x_{ij}}}{\frac{x_{wj}}{\sum_j x_{wj}}} \dots\dots\dots(2)$$

Change in the competitiveness of commodity in a country during a certain period can determine the position of the commodity in the market. This condition can be analyzed using Dynamic Revealed Comparative Advantage (DRCA) (Edwards & Schoer, 2002). The

formulation can be found in Equation 3 and 4.

$$DRCA = \frac{\Delta RCA_j}{RCA_j} \dots\dots\dots(3)$$

$$DRCA = \frac{\Delta [x_{ij} / \sum_j x_{ij}]}{x_{ij} / \sum_j x_{ij}} - \frac{\Delta [x_{wj} / \sum_j x_{wj}]}{x_{wj} / \sum_j x_{wj}} \dots\dots(4)$$

Where:

RCA_j : Comparative advantage of a country towards commodity j

$DRCA$: Dynamics of competitiveness

x_{ij} : Total export of commodity j from country i (USD)

x_{wj} : Total export of commodity j from all countries (world) (USD)

$\sum_i x_{ij}$: Total export of all commodities from country i (USD)

$\sum_j x_{ij}$: Total export of all commodities from all countries (world) (USD)

j : Commodity j

i : Country i

According to Table 1, the position of the most wanted export market of a commodity can be identified by a country in the condition of rising stars. This happens because the increase of certain commodity

export share in a country is bigger than the increase of world export market share. Under these conditions, a country has the ability to increase the export destination market and even open up new markets.

Table 1. Market Position of Exports

	Share j in country exports		Share j in world exports		Market position of exports
Increasing RCA	↑	>	↑		Rising stars
	↑	>	↓		Failing stars
	↓	>	↓		Lagging retreat
Decreasing RCA	↓	<	↑		Lost opportunity
	↓	<	↓		Leading retreat
	↑	<	↑		Lagging opportunity

Source: Edwards and Schoer (2002)

DYNAMICS OF INDONESIAN COFFEE

Most of Robusta coffee is grown in Indonesia with an area of 73.54 percent in 2015 while the rest is Arabica coffee (Ditjenbun, 2015). In 2015, coffee planting area reached 1,233,227 hectares. The largest coffee growing areas in Indonesia are South Sumatra, Lampung, Aceh, East Java, Bengkulu and North Sumatra. Coffee cultivation in Indonesia is managed through public plantations (PR), state plantations (PN), and private plantations (PS) with percentage rate of 96.12 percent each; 1.83 percent; and 2.14 percent with the number of

national coffee farmers reached 1,789,283 households.

In general, Indonesia's coffee productivity decreased by 0.79 percent per year in the period of 2014-2016. Indonesia's coffee productivity level reached 744 kg per ha which is much lower than the main competitor countries such as Vietnam which reached 2 tons per ha. The productivity increase of Indonesian coffee needs to be improved through various efforts such as the use of superior seeds (technology), appropriate coffee maintenance management, and rejuvenation of old coffee plants. The efforts in increasing productivity, production, and development targets (planting area and harvested area) in coffee-based agroforestry should be supported by the readiness of production technology (Supriadi & Pranowo, 2015; Sudjarmoko, 2013).

Indonesia's coffee trade activity has shifted export destination countries. The market share of export destinations to Europe and America tends to decline by 2015. Asian regions such as Malaysia, Thailand and India tend to increase exports from Indonesia. Indonesia coffee offer in Japan and Australian are affected

by the supply of coffee (Baroh et al., 2014).

The increase of Indonesian coffee exports is predicted to increase in 2012 to 2021 with the growth trend of 1.6% every year (Chandra et al., 2013). However, in the period of 1990-2015, Indonesia's coffee bean exports fluctuated with an average growth rate of 3.56 percent per year (UN Comtrade, 2017). The growth of national coffee exports is quite slow compared to other Robusta countries such as Vietnam (9.08 percent), India (5.31 percent). This is due to the slow growth of the area with the 0.63 percent per year rate so that the increase in coffee production tends to be low.

DYNAMICS OF WORLD COFFEE

The major Arabica coffee producing countries are Brazil, Colombia, Ethiopia, Honduras, Guatemala, and Peru. Moreover, the major robusta coffee producing countries include Vietnam, Indonesia, India, and Uganda. Indonesia was the major Robusta coffee producing country in the world before 1998, yet leaf rust disease outbreak resulted in

decreasing production thus impacted on declining export. During the same period, Vietnam succeeded in increasing the production through several policies established by the government such as: mass migration, land reform, plant selection, and application of appropriate technology (Marsh, 2007). In growing season 2013/2014, Vietnam achieved the highest coffee export which was resulted from increasing production due to increase in harvesting area and beneficial weather factor (Ministry of Industry RI, 2014).

If compared to other competitor countries (Brazil, Vietnam, Colombia), only Indonesia experienced declining coffee export during 1990-2015 (Figure 1). Before 1997/1998, Indonesia was the world biggest Robusta coffee exporter, yet Indonesian export continued to decrease after 1997/1998 due to declining production in many production center areas in Indonesia. Since 1998/1999 until today, Vietnam is able to compete Indonesia so that It becomes the biggest robusta coffee exporter in the world.

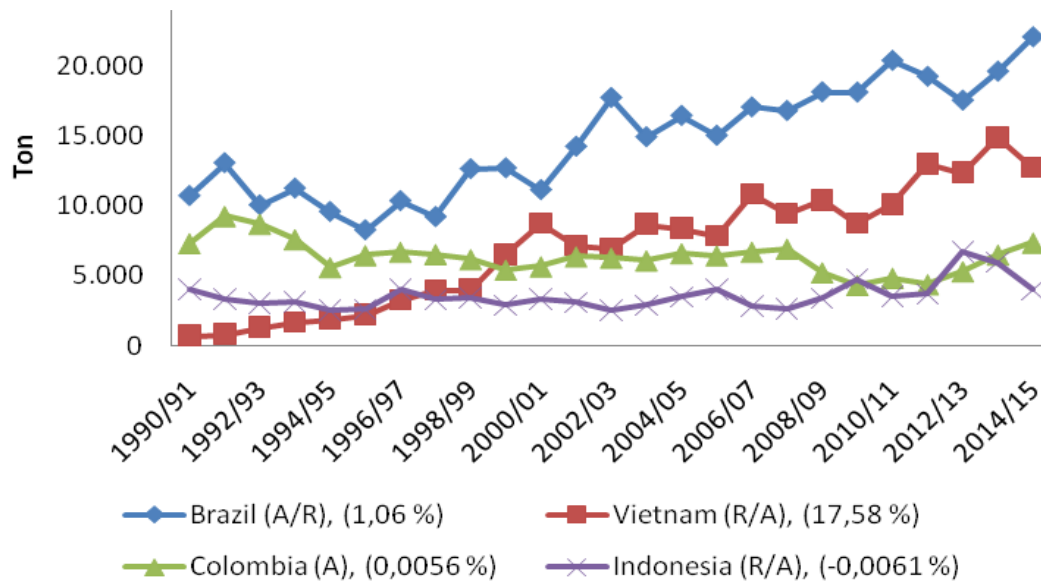


Figure1. The Development of World Coffee Export in Major Producing Countries, 1990-2015

Source: ICO (2016), Processed

Changes in export during 1990/1991 until 2014/2015 indicated dynamic and shift of competitiveness between world coffee producers. These producing countries conduct several efforts to increase the market share of world coffee. Competition in international coffee market insists coffee producers

to enhance the production and quality of coffee to meet the demand of consumer. In addition, coffee to be exported should meet the Resolution of International Coffee Organization No.407 in Coffee Quality Improvement Program (AEKI, 2013).

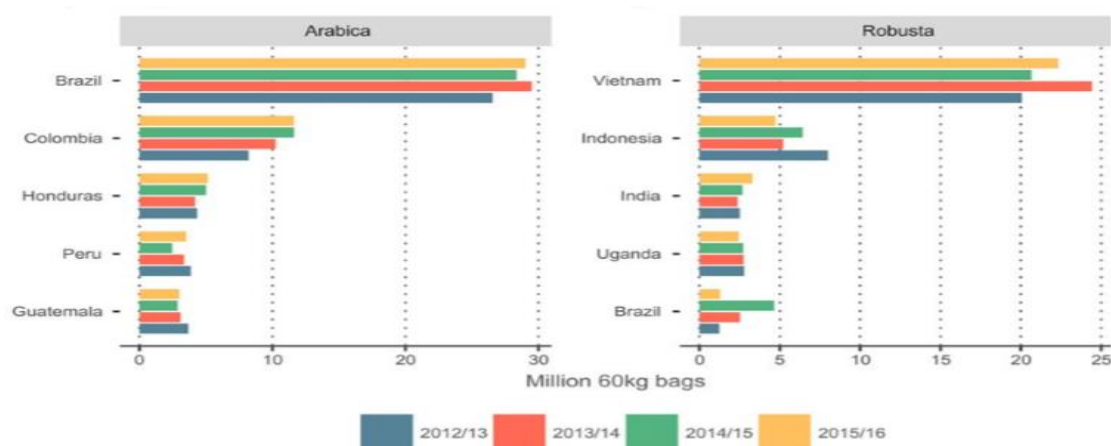


Figure 2. Five Major Robusta and Arabica Exporting Countries in the World

Source : ICO, 2016

Figure 2 shows Vietnam's highest export of coffee during the planting season of 2013/2014. The increased production was due to increased area of harvest and favorable weather factors (Ministry of Trade, 2014). In contrast, there was a declining condition in Indonesian coffee exports. The reason was that there were coffee plantations that have

been above 25 years old causing the decline in coffee productivity (Ministry of Trade, 2014).

In addition, the dry season that came early reduced the flowering of coffee plants, while excessive rain reduced the yield. Another cause was the area of coffee in the period 2010 to 2014 decreased by 0.29 percent/year (Ministry of Agriculture, 2015).

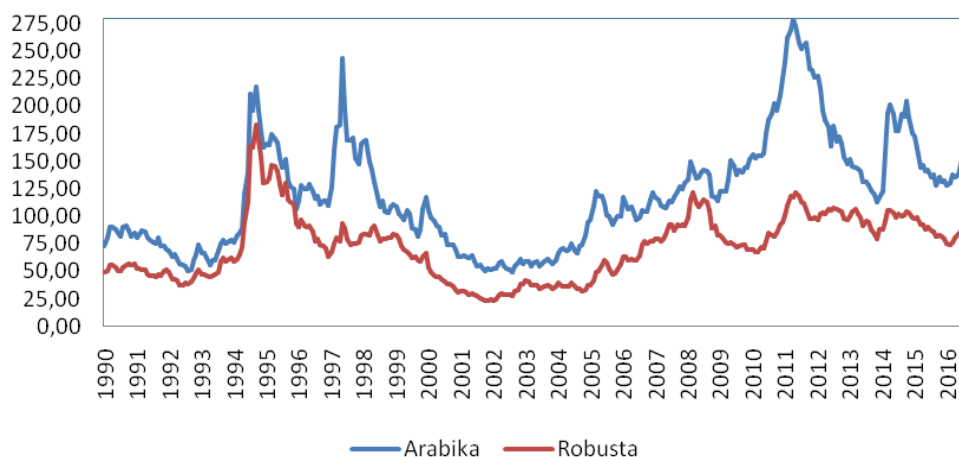


Figure 3. World Price of Arabica and Robusta Coffee (US cents/lb)

Source : ICO (2016)

The world market conditions of Robusta and Arabica coffee experienced an increase in prices in the period of 1990 to September 2016 (Figure 3). Selling price of coffee in the international market also shows upward trend over the years. Price of Arabica coffee in September 2016 reached 158.29 US cents/lb, while price of Robusta coffee in October 2016 was 103.65 US cents/lb in which

those prices were the highest in the period January 2015-October 2016. Compared to the year 2015 which achieved 88.05 US cents/lb, the increasing price during the months was due to decreasing supply of Robusta from several major producing countries. Even though the trend of coffee price showed an increase, the world coffee consumption level did not decrease, yet increased every year.

During 2011-2016, the world consumption of coffee increased by 8.47 percent.

RESULTS AND DISCUSSION

The Level of Competition for The World's Major Coffee Exports

The quantity of coffee export from various world coffee producing countries increased during 2010-2015 with an average increase of 4.7 percent. However, the quantity of world coffee export in 2000 reached 5,281,467 tons, while the export of world coffee in 2015 amounted to 6,944,589 tons. It means that the increase of coffee export during the period was only 31.5 percent. World coffee export in 2015 was still dominated by Brazil as the biggest Arabica coffee producer with market share reaching 28.87 percent and average growth of export quantity per year of 5.63 percent (Figure 4).

Brazil was also included as one of the five biggest Robusta coffee exporters after Vietnam, Indonesia, India, and Uganda (ICO, 2016). The biggest market share of Robusta coffee producer was still placed by Vietnam with market share of 18.14 percent. Despite of the fact that Indonesia is the second biggest Robusta coffee producer, market

share of Indonesia was far behind Vietnam. The average growth of Vietnamese coffee export quantity reached 9.08 percent/year, while Indonesia only achieved 5.36 percent. Vietnam and Indonesia are countries that produce both types of coffee, yet Robusta coffee is more dominant to be produced and exported. The result indicated that a country experienced negative growth average of export quantity was Guatemala that was 2.43 percent/year.

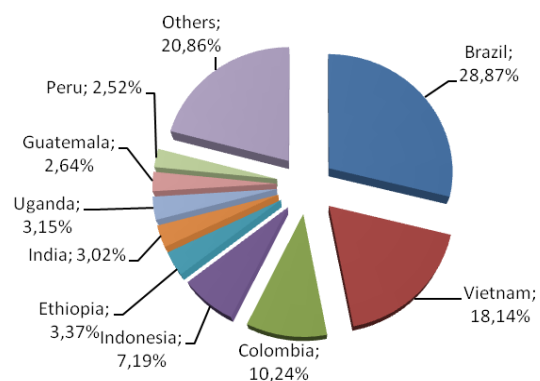


Figure 4. Export Market Share of World Coffee in 2015

Source : UN Comtrade (2017), processed

During the last fifteen years, the quantity of coffee export from that country continued to decrease due to land conversion for investment which frequently occurs. The highest decline was in 2015 as a result of disease which attacked the leaves thus affected the coffee production.

Comparative advantage of world coffee was analyzed in the form of

beans (not roasted, not decaffeinated) with HS code: 090111 which was measured using Revealed Comparative Advantage (RCA). Based on Table 2, the ten world major coffee

exporting countries had comparative advantage. It is shown by the value of RCA which was greater than one. Ethiopia achieved the highest RCA value compared to other countries.

Table 2. RCA of The World Major Coffee Exporting Countries

Year	Country									
	BRA	VNM	COL	IDN	ETH	IND	HND	UGA	GTM	PER
2000	23.21	28.40	66.54	4.12	434.72	3.34	133.62	225.62	174.75	26.73
2001	24.95	31.09	74.80	3.90	430.72	4.77	133.49	250.44	152.95	31.79
2002	26.68	25.98	87.58	5.16	518.71	3.76	255.29	268.64	158.55	33.08
2003	24.42	34.39	84.53	5.64	485.11	3.56	252.36	257.46	155.96	27.54
2004	24.35	32.55	76.36	5.29	406.37	2.70	289.59	255.01	150.52	30.64
2005	24.62	26.10	80.48	6.74	40.75	2.73	295.12	245.59	100.03	20.74
2006	24.05	34.56	67.81	6.55	78.42	2.94	234.58	221.11	164.19	24.52
2007	22.37	41.90	60.81	5.91	344.20	2.13	221.98	201.91	89.06	16.17
2008	21.69	34.95	52.01	7.50	360.60	2.22	*)	220.74	86.79	21.38
2009	22.20	27.12	42.40	6.37	206.06	1.32	179.52	153.21	72.94	19.71
2010	23.25	22.54	41.89	4.56	265.42	1.53	194.29	146.31	74.73	21.94
2011	21.87	19.76	32.05	3.56	226.64	1.57	250.65	148.84	73.22	24.09
2012	18.63	24.19	25.03	5.17	243.31	1.66	225.10	124.21	74.76	17.43
2013	20.74	20.86	35.10	7.00	207.15	1.83	*)	193.20	77.85	17.99
2014	24.29	19.69	40.85	5.30	163.49	1.52	156.28	163.68	55.45	17.24
2015	25.50	12.68	62.10	6.94	177.49	1.78	*)	155.26	54.48	15.30

Source: UN Comtrade (2017), processed

Note : *): No data available

Although the value of RCA Ethiopia is highest among other countries, the market share of Ethiopia reaches only 3.37 percent which is much smaller than Brazil reaching 28.7 percent. In 2015, the value of Brazilian coffee exports in 2015 reached USD 5.5 billion or 2,005 million tons. Ethiopia only exports coffee to the

world market of 234 million tons or USD 1 billion.

Ethiopia has not yet maximized its position as the producer of some of the best coffee in the world (Petit, 2007). Even though Ethiopia has comparative advantage in the export of coffee, it cannot be said of its overall performance on the international

market owing to challenges with management of price risk, high transaction cost resulting from the extensive nature of the supply chain and the numerous actors and processes there in, challenges with quality control, low productivity of growers' fields, and incidence of smuggling (Boansi and Crentsil, 2013).

In contrast, India has reached the lowest RCA value compared to other countries, yet the quantity of coffee exported was higher than that of Guatemala, and Peru in 2015. Coffee exported by India reached 3.02 percent of the world total export of coffee in 2015.

Compared to the world major Robusta coffee exporters (e.g. Vietnam, Indonesia, India, and

Uganda), a country that had the highest RCA value was Uganda. It was because the coffee export value of Uganda was higher than the value of all commodities exported by Uganda which amounted to 17.7 percent in 2015. Besides, the values in Vietnam, Indonesia, and India were 1.45 percent; 0.79 percent; 0.20 percent, respectively.

However, if it is seen from the quantity of coffee exported to the world market at the same year, Vietnam was the country exporting the highest quantity of 1,259,448 tons or about 18.14 percent of the total export of world coffee. While Indonesia exported 499 613 tons or approximately 7.19 percent of world coffee total export in 2015.

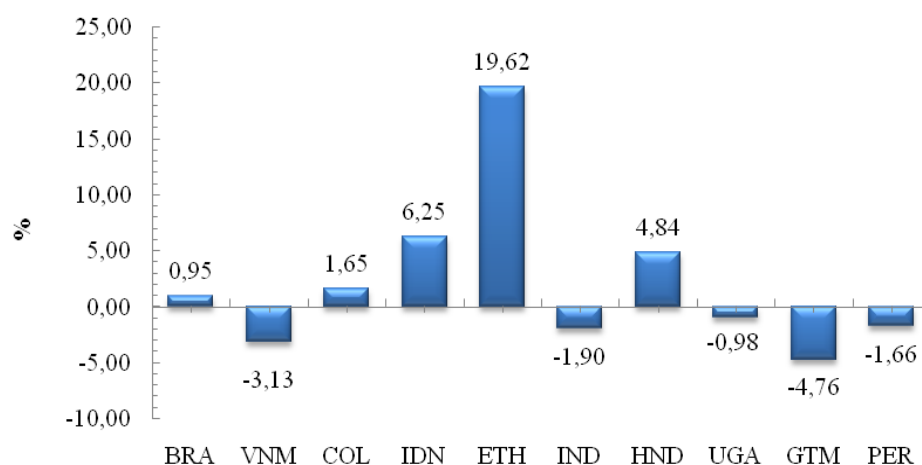


Figure 5. Average RCA Growth of Each Country Per Year

Source: UN Comtrade (2017), processed

Based on Figure 5, the average growth of RCA per year was fluctuated. Brazil was the world biggest coffee exporter with RCA growth of 0.95 percent/year. Besides, Vietnam was the second biggest exporter in the world which experienced decrease in competitiveness during the last fifteen years. It is shown by the negative average growth of RCA, that was 3.13 percent/year with the average growth of coffee export quantity of 5.63 percent/year. The negative average of RCA growth obtained by Vietnam was caused by a decrease of coffee export quantity in 2001, 2002, 2008, 2013, and 2015 with the highest decline occurred in 2001 which amounted to 55.34 percent. With the similar characteristics of coffee type exported by Vietnam, the average RCA growth per year of Indonesian coffee was higher than that of Vietnam. It was due to the trend of Indonesian RCA value from 2000-2015 in which the value obtained by Indonesia was higher than Vietnam, yet the market share of Vietnam was still twice and half higher than that of Indonesia. The main factors affecting competitiveness of Vietnam's export coffee are production factor conditions (e.g. natural conditions, human resources, capital,

infrastructure), national condition, related and supporting industries to coffee export, firm strategy, structure, rivalry, the role of the government, and the role of opportunity (Nhien, 2016).

The average growth of RCA which experienced a decrease was found in Vietnam, India, Uganda, Guatemala, and Peru. The highest decline was obtained by Guatemala as much as 37.62 percent during the period 2011- 2015. This is due to weather anomaly, pest, and disease which attacked coffee plant in Guatemala. Positive RCA growth was seen by Brazil, Colombia, Indonesia, Ethiopia, and Honduras. High RCA obtained by Ethiopia was caused by the share of coffee export value towards all exported commodities in the country which was higher compared to other countries. Even though the RCA growth per year of Ethiopian coffee was the highest, the quantity of exported coffee was still far below Brazil, Vietnam, Colombia, and Indonesia. Competitiveness of the world major coffee exporters has changed during a certain period of time. In general, the growth of coffee export share of the major coffee exporters during the period 2000-2003

was higher than the growth of world coffee export share (Figure 6).

The growth of Honduras coffee export was the highest among other countries, while Guatemala had the

lowest one. However, during the period 2006-2009, the quantity of Ethiopian coffee export had increased which led to higher growth than that of the world coffee export.

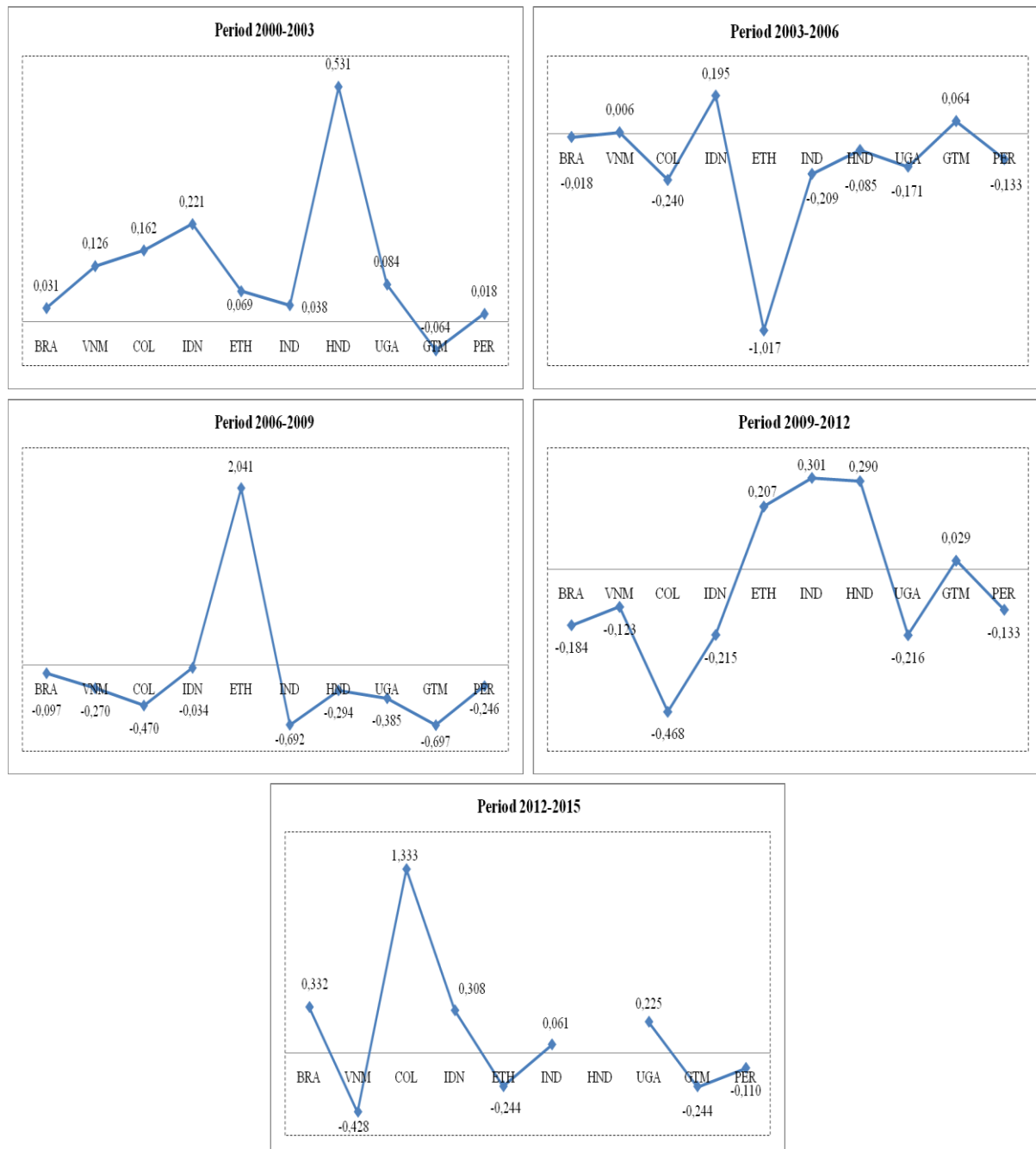


Figure 6. RCA Dynamics of World Major Coffee Exporting Countries in Five Periods of Time

Source: UN Comtrade (2017), processed

Different from the period 2003-2006, the growth of coffee export done by Guatemala was higher than the growth of world coffee export. On the other hand, the growth of Ethiopian coffee export was far below the growth of world export because of the quantity of exported coffee significantly decreased.

During the period, most of exporting countries had lower their export growth than that of the world. Yet, during the period 2009-2012, Indonesia, Honduras, Ethiopia and Guatemala had positive growth compared to the previous period. During the last period (2012-2015), the growth rate of coffee export quantity of Colombia was at the highest peak for the last fifteen years. The competitor coffee in Columbia are Japan and the Netherlands (Baroh *et al* 2014). The growth of coffee export share of a country depends on the value of coffee export of a country and the value of total export of that country.

This situation occurred was due to declining coffee share in exporting country which was lower than coffee share in the world market. During that period, they were only Honduras and Guatemala which obtained increasing RCA. Honduras was at failing stars in

which the coffee share in that country was higher than coffee share in the world market that experienced a decline (Table 3). Furthermore, Guatemala was at lagging retreat in which decrease in coffee export in that country was higher than the decreasing export in the world market.

In Period 2 (2003-2006), there were some countries considered to achieve rising stars i.e. Vietnam, Indonesia, and Guatemala. In that condition, coffee share in each country was higher than the coffee share of the world. This position is the most wanted position by each country in facing competition between countries involved. In addition, those countries tried to increase market share through quality improvement. There was a development of coffee quality to increase the export market and domestic consumption (Arifin, 2013). This condition was seen by increasing RCA value. The value of DRCA was the highest among those three countries, namely Indonesia with the value of 0.195. It was indicated by the growth of export quantity which amounted to 28.3 percent at the same period. During this period, several other coffee exporting countries also suffered from declining RCA which

reflected changes in competitiveness, included Brazil, Colombia, Ethiopia,

India, Honduras, Uganda, and Peru.

Table 3. Change in Position of Each Country in Coffee Export Competition

No	Country	Period 1	Period 2	Period 3	Period 4	Period 5
		2000-2003	2003-2006	2006-2009	2009-2012	2012-2015
1	Brazil	Leading	Lagging	Lagging	Lost	Failing
		Retreat	Opportunity	Opportunity	Opportunity	Stars
2	Vietnam	Leading	Rising	Lost	Lagging	Lagging
		Retreat	Stars	Opportunity	Opportunity	Retreat
3	Colombia	Leading	Lost	Lost	Lost	Failing
		Retreat	Opportunity	Opportunity	Opportunity	Stars
4	Indonesia	Leading	Rising	Lagging	Lost	Failing
		Retreat	Stars	Opportunity	Opportunity	Stars
5	Ethiopia	Leading	Lost	Lagging	Rising	Lagging
		Retreat	Opportunity	Opportunity	Stars	Retreat
6	India	Leading	Lagging	Lost	Rising	Leading
		Retreat	Opportunity	Opportunity	Stars	Retreat
7	Honduras	Failing	Lagging	Lost	Rising	*)
		Stars	Opportunity	Opportunity	Stars	
8	Uganda	Leading	Lagging	Lost	Lost	Failing
		Retreat	Opportunity	Opportunity	Opportunity	Stars
9	Guatemala	Lagging	Rising	Lost	Rising	Lagging
		Retreat	Stars	Opportunity	Stars	Retreat
10	Peru	Leading	Lagging	Lagging	Lagging	Lagging
		Retreat	Opportunity	Opportunity	Opportunity	Retreat

*) : No Data Available

Compared to the previous period where increase and decrease in RCA value existed, during the period 3 (2006-2009), ten coffee exporters faced declining RCA. This decrease in RCA was seen from the result of DRCA analysis. Declining RCA occurred along with the condition of lagging opportunity which was faced by Brazil, Indonesia, Ethiopia, and Peru. In that condition, the increase in coffee share of each country was lower than that of the

world. Moreover, decreasing RCA also occurred in Vietnam, Colombia, India, Honduras, Uganda, and Guatemala with position of lost opportunity. This position was shown by declining coffee share in each country which was lower than increase in the world coffee share. It shows that those countries could not take an opportunity to increase their market share.

In period 4 (2009-2012), there were several countries experienced

the increase of RCA compared to the previous period, namely Ethiopia, India, Honduras, and Guatemala. Each of those countries obtained higher domestic coffee share than the world coffee share thus they faced position of rising stars. In the condition of rising stars, those countries were able to take advantage of the opportunity to increase market share. Another condition was faced by the other six coffee exporting countries which experienced decreasing RCA. During the last period, coffee market share in Brazil and Indonesia increased lower than the increase in the world market share. However, in this condition, Brazil and Indonesia were suffered from the decline of market share. When the world market share increased, Brazil and Indonesia thus experienced lost opportunity. A similar thing was also found in Colombia and Uganda which confronted lost opportunity, while Vietnam and Peru faced lagging opportunity.

The condition which changed quite significantly occurred in India during period 5 (2012-2015). In that period, India faced leading retreat in which there was declining RCA that was reflected by the situation where

the decrease of Indian coffee share was lower than that of in the world coffee share. This finding was diverse from the previous period where India experienced rising stars of the increase in coffee export value as much as 136.5 percent during the period 2009-2012. However, this country was suffered from decreasing export coffee with the value of 12.26 percent during the period 2012-2015. This situation led to quite significant change in position of India in the coffee market. In general, other coffee exporting countries such as Brazil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Ethiopia, Uganda, Guatemala, and Peru faced increasing RCA from the previous period.

Primarily, Indonesia experienced a change of position in the period 2000-2015 by facing the world coffee market competition. Indonesian coffee in the international market experienced the best period (rising stars) during 2003-2006.

This is indicated by the increasing market share of Indonesian coffee which exceeds the increase of the world market share. Indonesia was able to compete with Vietnam and Guatemala in that period which were equally positioned as rising stars.

Indonesia was also able to open new export markets such as in East Asia. In the fourth period (2009-2012), Indonesia experienced a considerable decline in market share. This is due to the decline of Indonesian coffee exports by 12.36 percent. On the other hand, during that period Indonesian coffee production increased by 7.62 percent. The decline of the Indonesian coffee exports was due to the increase in domestic consumption. The Indonesian government set a target of increasing coffee exports by 24.3 percent by 2025 (Ministry of Agriculture 2015). Efforts to achieve these targets can be done through increasing productivity such as the use of technology, superior seeds suitable with agro climate of each production center, plant pruning, and treatment improvement of harvested coffee beans.

CONCLUSION AND POLICY RECOMMENDATION

A shift in competitiveness can affect the change in export market position of a country. The ten world coffee producing countries have a comparative advantage that is shown by the value of RCA greater than one. The greater the market share a

country has, the higher of competitiveness of the country compared to other countries. In line with the increasing level of world coffee trade competition, the targeting of coffee export by the Indonesian government began to be directed to market orientation rather than production orientation. This is done through some efforts to increase productivity through the implementation of technology and superior seed which is appropriate to agro climate of each production center area in each country. It is also essential to perform coffee plant pruning in some countries that have old coffee plant to increase the production and encourage the export. It is necessary to improve the quality of coffee export through the treatment improvement of harvested coffee beans. A country can increase export market share in new destination countries which have a potential market.

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors would like thank the Department of Agribusiness, FEM-IPB and Directorate of Collaboration and International Program, IPB which have provided an opportunity to

conduct lecturers mobility activities through the writing and presentation of this article. In addition, we feel indebted to the International Conference and Congress Committee of the Indonesian Society of Agricultural Economics (ICC ISAE) 2017 and Journal Editor Board in collaboration with Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) for the comments and improvements of this article.

REFERENCES

- Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. (AEKI).(2013). Ekspor Kopi. Retrieve September 30, 2016, from <http://www.aeki-aice.org/page/ekspor/id>.
- Arifin, B. (2013). On The Competitiveness And Sustanaibility of The Indonesian Agricultural Export Commodities. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*. Vol 1 (1). PP 81-100.
- Baroh *et al.* (2014). Indonesian Coffee Competitiveness in The International Market : Armington Model Application. *American Journal of Economics*. Vol 4 (4), pp.184-194.
- Boansi, D and C. Crentsil.(2013). Competitiveness and Determinants of Coffee Exports, Producer Price and Production for Ethiopia. *Journal of Advanced Research in Economics and International Business*. Vol 1 (1), pp. 31-56.
- Chandra, D., R. H. Ismono., E. Kasymir.(2013). Perdagangan Kopi Robusta Indonesia di Pasar Internasional. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*. Vol 1 (1)pp. 10-15.
- Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Kementerian Pertanian. (2015). Statistik Perkebunan Indonesia (2013-2015 Kopi). Penerbit : Dirjenbun. Jakarta (ID).
- Dradjat B, A Agustian., A Supriatna. (2007). Ekspor dan daya saing kopi biji Indonesia di pasar internasional : implikasi strategis bagi pengembangan kopi biji organik. *Pelita Perkebunan* Vol 23 (2), pp.159-179.
- Edwards, L., and V Schoer. (2002). Measures of Competitiveness: A Dynamis Approach to South Africa's Trade Performance in The 1990s. *The SouthAfrican Journal of Economic*. Die Suid Afrikaanse Tydskrif vir ekonomic. Vol 70 (6)pp 1008–1046.
- Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI). (2014).Perkembangan dan Tantangan Produk Kopi Olahan Indonesia. [Retrieved 15 Februari 2016]. From : <http://www.gaeki.or.id>.
- Gebre, Y T. (2015). Determinants of Coffee Export Performance in Ethiopia. *Journal of Economics and Sustainable Development*. Vol 6 (5) pp 147-157.
- Hamdy, H. (2001). *Ekonomi Internasional-Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Jakarta : Ghalia
- International Coffee Organization (ICO). (2016). Historical data on The Global Coffee Trade [Internet]. [Retrieve21 Januari 2016]. From http://www.ico.org/new_historical.asp
- Kustiari, R. (2007). Analisis Ekonomi Tentang Posisi dan Prospek Kopi Indonesia di Pasar Internasional. Disertation. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- Krugman, P R., dan M. Obstfeld. (2005). *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*, Edisi 5 jilid 2, Jakarta: PT. Indeks kelompok Gramedia.
- Luthfi, M., and M. E. Azhar. (2011). Pengaruh Faktor-faktor Sosial Ekonomi dan Instabilitas Harga terhadap Respon Penawaran Kopi Arabika Organik. *Jurnal Manajemen & Bisnis*. Vol 11 (1), pp 25-39.
- Marsh, A. (2007). Diversification by Smallholder Farmers : Vietnam Robusta Coffee. *Agricultural Management, Marketing and Finance Working Document*. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.
- Meiri, A., R. Nurmalina., A.Rifin. (2013). Trade Analysis of Indonesian Coffee in International Market. *Buletin RISTRI*. Vol 4 (1), pp 39-46.
- Ministry of Industry, Republic of Indonesia. (2014). Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Industrialisasi Kopi, Kakao, Dan Teh di Indonesia. On Roundtable Agribusiness and Food KADIN Indonesia. 1 Desember 2014. Jakarta (ID).
- Ministry of Trade, Republic of Indonesia. (2014). Analisis Komoditas Kopi dan Karet Indonesia : Evaluasi Kinerja Produksi, Ekspor dan Manfaat Keikutsertaan dalam Asosiasi Komoditas Internasional. Trade Policy Analysis and Development Agency. Ministry of Trade RI. Jakarta (ID).
- Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia. (2015). Rencana Strategis. Ministry of Agriculture RI 2015-2019. Jakarta (ID).
- Nhien, N T H. (2016). The Competitiveness of Vietnamese Coffee Into The EU Market. Thesis. Finlandia : Centria University of Applied Sciences.
- Petit, N. (2007). Ethiopia's Coffee Sector: A Better or Bitter Future?. *Journal of Agricultural Change*, Vol. 7(2), pp. 225-263.
- Salvatore, D. (1997). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari: International Economic. Ed ke-5.
- Sudjarmoko, B. (2013). Prospek Pengembangan Industrialisasi Kopi Indonesia. *SIRINOV*. Balai Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri. Vol1 (3)pp. 99-110.
- Supriadi, H., and D Pranowo. (2015). Prospek Pengembangan Agroforestri Kerbasis Kopi di Indonesia. *Perspektif*. Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar. Vol 14 (2)pp. 135-150.
- Tambunan, T. (2003). *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta : LP3ES.
- United Nations Comtrade Database (UN Comtrade). (2017). Extract data. Retrieved Februari 2, 2017. from : <https://comtrade.un.org/data/>.
- Widodo, T. (2010). *International Trade, Regionalism and Dynamic Market*. Yogyakarta,: Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gajah Mada.

TINGKAT INTEGRASI PASAR AYAM BROILER DI SENTRA PRODUKSI UTAMA: STUDI KASUS JAWA TIMUR DAN JAWA BARAT

The Level of Market Integration of Chicken Broiler at Main Production Center: Case Study East Java and West Java

Rahayu Ningsih¹, Dwi Wahyuniarti Prabowo²

¹Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional, BPPP, Kementerian Perdagangan,

²Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, BPPP, Kementerian Perdagangan,
Jl.M.I. Ridwan Rais No 5, Jakarta, Indonesia

email: dwi.wahyuniarti@kemendag.go.id

Naskah diterima: 08/07/2017; Naskah direvisi: 27/07/2017; Disetujui diterbitkan: 10/11/2017

Dipublikasikan online: 31/12/2017

Abstrak

Ayam broiler merupakan salah satu komoditi pangan yang harganya cenderung meningkat dan mengalami fluktuasi harga cukup tinggi diantara komoditi pangan lainnya. Fluktuasi harga yang tinggi menyebabkan disinsentif bagi pelaku usaha sektor perunggasan karena mengakibatkan ketidakpastian berusaha. Studi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pasar vertikal ayam broiler di tingkat peternak-pedagang besar dan pedagang besar-pengecer di sentra produksi utama yakni Jawa Timur dan Jawa Barat. Tingkat transmisi harga dalam studi ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan model Ravallion. Hasil analisis menyimpulkan bahwa tidak terjadi integrasi pasar di tingkat peternak-pedagang besar baik di Jawa Timur maupun Jawa Barat begitu pula di tingkat pedagang besar-pengecer di Jawa Barat. Namun demikian untuk Jawa Timur, terjadi integrasi pasar di tingkat pedagang besar-pengecer. Dengan tidak terintegrasinya pasar secara vertikal, maka ada kecenderungan bahwa margin keuntungan tidak terdistribusi dengan baik di tiap pelaku dalam rantai distribusi. Hasil studi ini merekomendasikan perlu adanya peningkatan transmisi harga dari pedagang pengecer ke pedagang besar dan selanjutnya ke peternak melalui peningkatan akses informasi pasar secara transparan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur informasi harga secara online.

Kata Kunci: Ayam Broiler, Ravallion, Integrasi Pasar, Transmisi Harga

Abstract

As one of the staple foods in Indonesia, chicken broiler prices tend to increase and experience price fluctuation. This high price fluctuation generates disincentive for the poultry sector that leads to business uncertainty. This study analyzed vertical market integration of chicken broiler at the level of farmers-wholesalers and wholesalers-retailers in the main production centers (East Java and West Java Province). The Ravallion model approach was used to analyze price transmission. The results of the analysis concluded that there was no vertical market integration at the farmers-wholesalers level in both East Java and West Java as well as at the level of wholesalers-retailers in West Java. However, for East Java there was a vertical market integration in the wholesalers-retailers level. Vertical price disintegration reflects a tendency that profit margins were not well distributed in the distribution chain. This study recommended that increasing the transmission of prices from retailers to wholesalers and subsequently to the farmers can be done through increasing the access of market information by providing facilities and infrastructure in the form of online price information.

Keywords: Chicken Broiler, Ravallion, Market Integration, Price Transmission

PENDAHULUAN

Sub sektor peternakan merupakan basis ekonomi yang berpotensi tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu sub sektor peternakan yang mengalami pertumbuhan pesat adalah sektor perunggasan. Sektor perunggasan merupakan ujung tombak dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi hewani. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS, 2011), produk unggas memberi kontribusi terhadap konsumsi protein sebesar 11,00%, dan berkontribusi terhadap konsumsi protein hewani sebesar 60,73% (Bahri, Fanani & Nugroho, 2012). Selain itu, sektor perunggasan telah menyerap tenaga kerja lebih dari 1000 orang per tahun (Ditjen PKH, 2013).

Pertumbuhan produksi unggas cukup prospektif dan progresif. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan produksi yang cenderung naik dari tahun ke tahun (Ditjen PKH, (2013). Pada tahun 2014, produksi ayam broiler dari perusahaan besar (terintegrasi) yang menguasai pasar lebih dari 85% telah mencapai lebih dari 2,5 juta ton. Sementara kebutuhan

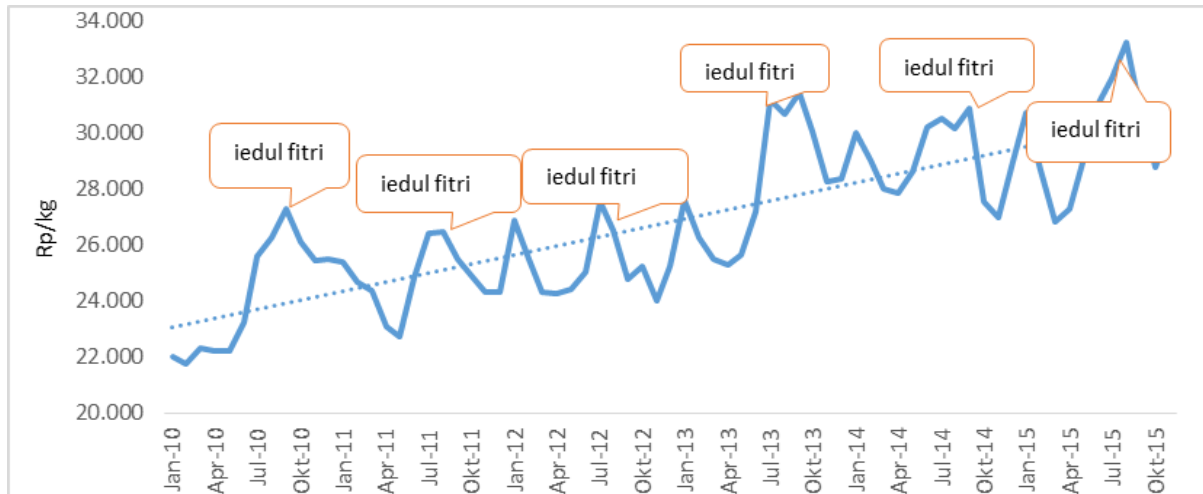
hanya sebesar 2,3 juta ton. Hal ini berarti kebutuhan daging ayam broiler dapat dipenuhi dari dalam negeri (*self-sufficient*).

Dari aspek permintaan, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk unggas terutama daging ayam cenderung naik rata-rata sekitar 9,3% per tahun (BPS, 2013). Faktor-faktor yang mendorong permintaan untuk produk peternakan ke depan ditentukan oleh jumlah penduduk dan pertumbuhannya, tingkat pendapatan, fenomena urbanisasi dan segmentasi pasar, serta preferensi konsumen.

Pada sisi penawaran faktor-faktor yang berpengaruh adalah produksi, produktivitas dan daya saing produk perunggasan (Saptana & Daryanto, 2013). Hal ini sangat terkait erat dengan ketersediaan dan harga *day old chick* (DOC), ketersediaan dan harga pakan, perubahan teknologi (genetika, pakan dan logistik), ketersediaan air bersih, ketersediaan dan harga energi, dan lingkungan kebijakan yang kondusif (kerangka insentif, regulasi pasar, kebijakan kredit, *sanitary standards*, kebijakan pertanahan, ketenagakerjaan dan lingkungan).

Namun demikian, industri perunggasan saat ini dihadapkan pada realita dimana harga produk unggas ditingkat peternak terus merosot hingga di bawah biaya pokok produksi

(Kompas.com, 1 Maret 2017). Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya harga pakan input produksi terutama harga pakan yang dipicu oleh meningkatnya harga bahan baku pakan.



Gambar 1. Perkembangan Harga Eceran Daging Ayam Broiler

Sumber: Ditjen PDN, Kemendag (2015)

Kerentanan yang dapat terjadi akibat hal tersebut ditambah lagi dengan karakteristik permintaan yang berfluktuasi pada hari perayaan tertentu, mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga daging ayam di tingkat eceran. Tingkat fluktuasi harga daging ayam broiler dapat dilihat pada Gambar 1.

Selain fluktuasi harga yang cukup tinggi yang diindikasikan dengan rata-rata koefisien variasi harga bulanan selama tahun 2015 yakni sebesar 7,6% (Kementerian Perdagangan, 2016), harga ayam broiler juga cenderung mengalami

peningkatan. Fluktuasi harga yang tinggi menyebabkan disinsentif bagi pelaku usaha sektor perunggasan karena mengakibatkan ketidakpastian berusaha. Di sisi lain harga yang cenderung naik juga dapat merugikan konsumen.

Melihat karakteristik harga ayam broiler yang sangat berfluktuasi ditambah kondisi harga di tingkat peternak yang cenderung menurun, maka perlu dilakukan studi yang dapat menggambarkan tingkat integrasi harga ayam broiler secara vertikal dalam rantai distribusi. Tidak simetrinya selisih antara harga di

tingkat peternak dan pengecer dalam rentang waktu tertentu dapat mengindikasikan tidak terintegrasinya harga meskipun tidak mutlak (Bathla dan Srinivasulu, 2011). Hal ini lebih jauh akan berimplikasi pada sebaran atau distribusi margin keuntungan yang tidak proporsional. Untuk itu studi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi harga daging ayam broiler di tingkat peternak-broker dan pedagang besar-pengecer di sentra produksi utama yakni Jawa Timur dan Jawa Barat.

METODE

Alexander & Wyeth (1994) melakukan penelitian tentang integrasi pasar di pasar beras Indonesia dengan judul *Cointegration and Market Integration: An Application to the Indonesian Rice Market* menggunakan model Ravallion dan mendapatkan hasil bahwa secara umum terdapat integrasi pasar antara harga beras di 7 daerah sampel (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Ujung Pandang dan Papua).

Selain itu, Tahir (1997) melakukan kajian integrasi pasar komoditi pertanian (gandum, kapas, dan beras) dengan judul *Integration of Agricultural Commodity Markets in The*

South Punjab Pakistan menggunakan model Ravallion dan mendapatkan hasil bahwa integrasi pasar untuk beras di Pakistan menghasilkan dua kesimpulan yang berbeda. Untuk daerah produsen beras yang memiliki harga acuan, ditemukan integrasi pasar beras dan sebaliknya. Sementara untuk gandum dan kapas secara umum hasil yang didapat menunjukkan bahwa kedua komoditi ditemukan memiliki integrasi pasar.

Model Ravallion banyak digunakan untuk melihat tingkat integrasi harga maupun pasar. Diantaranya, untuk melihat tingkat integrasi pasar regional untuk komoditi sayuran di Indonesia (Firdaus & Gunawan, 2012). Selain itu, penelitian yang dilakukan Djulin & Malian (2003), berjudul *Struktur Integrasi Pasar Ekspor Lada Hitam dan Lada Putih di Daerah Produksi Utama*, mencoba mengetahui struktur dan integrasi pasar lada hitam dan lada putih di Indonesia dengan model Ravallion. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa tidak ada integrasi antara harga di tingkat petani dengan harga di tingkat pedagang besar. Pendekatan Djulin & Malian dalam melihat integrasi harga secara vertikal dalam rantai

distribusi juga akan digunakan dalam studi ini.

Tingkat transmisi harga dalam studi ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan model Ravallion yang dimodifikasi sebagaimana studi yang dilakukan oleh Djulin & Malian (2003) untuk melihat integrasi pasar secara vertikal di tiga level yang berbeda yaitu petani, eksportir, dan pasar internasional. Sementara studi ini menganalisis integrasi pasar di tiga level yang berbeda yaitu peternak, pedagang besar, dan pengecer.

Model Ravallion juga dapat digunakan dalam analisis perilaku pasar untuk membuktikan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk itu model Ravallion dapat melengkapi analisis *Structure-Conduct-Performance* (SCP). Menurut Asmarantaka (2009); Saptana & Saliem (2015) terdapat tiga kriteria untuk melihat perilaku industri yaitu strategi harga, kondisi *entry* dan tipe produk. Perilaku pasar mencakup: (a) Penentuan harga dan *setting level of output*, secara bersama-sama atau *price leadership*; (b) Perilaku dalam kerjasama antar pelaku usaha dapat direfleksikan oleh pola interaksi dan

koordinasi antar pelaku dengan demikian perilaku pasar dapat diukur juga dengan menggunakan tingkat integrasi pasar, secara kuantitatif dapat menggunakan integrasi pasar (Ravallion, 1986); (c) Kebijakan promosi produk; dan (d) *Predatory and Exclussenary*.

Model Ravallion (1986) telah digunakan secara luas dan dikembangkan serta didiskusikan dalam analisis integrasi pasar spasial.

$$P_{it} = \sum_{s=1}^n a_{is} P_{it-s} + \sum_{s=0}^n b_{is} P_{1t-s} + X_{it}c_i + e_{it}$$

Dimana P_{it} adalah harga di eceran i di waktu t , P_{1t} adalah harga di produsen, dan X_{it} adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga di eceran yakni harga eceran periode sebelumnya.

Kelebihan model Ravallion adalah dapat melihat tingkat integrasi pasar baik vertikal maupun horisontal. Selain itu dengan model Ravallion ini, juga dapat dilihat siapa penentu harga (*leading market*). Sementara kekurangan model Ravallion ini adalah: (1) Adanya asumsi bahwa ada satu pasar pusat yang dikelilingi beberapa pasar lokal sehingga perlu pengetahuan tentang struktur pasar; (2) Derajat keterpaduan pasar juga

tidak dapat diukur dengan model ini; (3) Model Ravallion sesuai untuk menganalisis keterpaduan jangka pendek dan juga sesuai untuk data bulanan, tetapi tidak cocok untuk menganalisis keterpaduan jangka panjang. Dalam analisis ini pendekatan Ravallion digunakan untuk melihat *leading actor* dalam penentuan harga ayam broiler secara vertikal dalam rantai pasok.

Untuk menangkap besarnya pengaruh kedua variabel tersebut terhadap harga di tingkat petani, Timmer (1987) mengembangkan suatu indeks hubungan pasar yang dikenal dengan nama IMC (*Index of Market Connection*). IMC merupakan rasio dari koefisien dua variabel harga yang mempengaruhi harga yang terjadi di tingkat petani, yaitu $(1 + b_1)/(b_3 - b_1)$ atau β_1/β_3 dimana β_1 adalah $(1+b_1)$ dan β_3 adalah (b_3-b_1) . Apabila nilai indeks IMC = 0 yaitu $b_1 = -1$, dikatakan pasar terintegrasi dan apabila indeks IMC = ∞ , yaitu jika $b_1 = b_3$, dikatakan pasar tidak terintegrasi.

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa informasi mengenai karakteristik pasar dan industri ayam broiler diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku di

daerah. Total sampel sekitar 40 dengan jumlah kurang lebih 20 sampel di masing-masing propinsi. Sampel terdiri dari peternak, pedagang besar, pedagang retail, supermarket (*retail modern*), dan rumah potong ayam. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan kuesioner. Untuk wilayah Jawa Timur dilakukan di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, sementara untuk propinsi Jawa Barat dilakukan di wilayah Bogor dan sekitarnya.

Sementara data sekunder berupa harga di tingkat peternak, pedagang besar dan pengecer diperoleh dari beberapa sumber. Sumber data untuk harga di tingkat peternak diperoleh dari asosiasi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR). Sedangkan untuk harga di tingkat pengecer diperoleh dari data pantauan harga harian yang dikompilasi oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Data harga di propinsi Jawa Timur direpresentasikan oleh kota Surabaya sedangkan Jawa Barat oleh kota Bandung.

Harga di tingkat pedagang besar diperoleh melalui proksi harga di tingkat peternak ditambahkan margin

di tingkat pedagang besar. Margin diperoleh dari hasil perhitungan selisih harga penjualan dan biaya produksi di pedagang besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Perdagangan Ayam Broiler di Jawa Timur dan Jawa Barat

Peternak ayam broiler di wilayah Jawa Timur terdiri dari peternak kemitraan pabrika terintegrasi (kemitraan internal), kemitraan non pabrika (kemitraan eksternal) dan peternak mandiri. Jalur distribusi ayam broiler di wilayah Jawa Timur secara umum adalah dari peternak dijual dalam kilogram berat hidup kepada mitra yang biasanya diarahkan kepada rumah potong ayam (RPA) untuk kemudian dijual ke pedagang besar. Pedagang besar kemudian menyalurkan ke pedagang bakulan untuk seterusnya didistribusikan kepada pedagang pengecer di pasar-pasar tradisional.

Provinsi Jawa Timur sebagai sentra utama ayam broiler memiliki peran yang cukup besar dalam produksi daging ayam dan merupakan salah satu penentu harga untuk wilayah Jawa dan luar Jawa. Hal ini disebabkan peran Jawa Timur dalam

perdagangan antar pulau untuk ayam dan telur tergolong cukup besar yakni sekitar hampir 50% yang merupakan pemasok untuk wilayah Indonesia timur.

Adapun permasalahan seputar harga yang terus mengalami penurunan di tingkat peternak, hal ini diduga akibat kelebihan produksi (*over supply*) ayam broiler. Kelebihan produksi ini dinilai karena tidak/belum adanya audit atas produksi *Grand Parents* (GP) dan *Great Grand Parents* (GPS). Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian data atas kebutuhan total bibit DOC yang dibutuhkan sehingga terjadi kelebihan suplai atas bibit DOC. Informasi mengenai jumlah kebutuhan DOC dapat digunakan sebagai dasar atau acuan dalam perhitungan *final stock* dan kebutuhan peternak. Pengaturan impor untuk GP, GPP, dan DOC perlu dilakukan terutama bagi perusahaan-perusahaan besar sehingga dapat menciptakan ruang usaha yang lebih berkeadilan. Saat ini di Provinsi Jawa Timur belum ada Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai sistem kemitraan, sehingga kemitraan yang ada hanya didasarkan atas perjanjian dua pihak yang bermitra.

Dari hasil wawancara dengan pelaku di Jawa Timur yakni di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, menunjukkan adanya indikasi terjadinya integrasi vertikal dalam industri perunggasan, baik integrasi secara penuh maupun integrasi secara parsial. Beberapa alasan pokok perusahaan peternakan skala besar melakukan integrasi vertikal adalah: (1) Bisnis perunggasan (broiler) tergolong jenis bisnis yang tingkat keberhasilannya bersandar pada ketepatan pengelolaan pada setiap fase-fase pertumbuhan broiler; (2) Produktivitas broiler sangat tergantung pada pakan ternak baik dari jumlah maupun mutunya, hal ini mengharuskan anggota mitra harus menggunakan pakan produksi perusahaan inti atau perusahaan yang menjadi induk perusahaan dari inti; dan (3) Produk akhir (*final product*) dari industri broiler merupakan produk yang dihasilkan melalui tahapan-tahapan produksi mulai dari hulu hingga ke hilir, di mana produk antara adalah makluk biologis bernilai ekonomi tinggi, sehingga mensyaratkan peternak mitra menggunakan DOC yang dihasilkan perusahaan inti atau perusahaan yang menjadi induk perusahaan dari inti.

Dengan karakteristik dasar yang demikian menuntut pengelolaan bisnis broiler dilakukan terintegrasi secara vertikal. Dalam hal ini terdapat beberapa implikasi sebagai berikut: (1) Bagi peternak mitra mendapatkan jaminan pasokan sarana produksi peternakan dan penjualan hasil, namun harus mengikuti aturan-aturan dalam kemitraan usaha tergantung pola kemitraan yang dipilih (Bahri, D.I, Z. Fanani, & B.A. Nugroho. (2012)); (2) Bagi peternak mitra mendapatkan jaminan keuntungan dan terbaginya resiko, dengan syarat mencapai standar-standar teknis yang ditetapkan, terutama tingkat kematian (*mortalitas*), nilai rasio konversi pakan (*feed conversion ratio/FCR*), umur panen dan indeks prestasi; (3) Bagi peternak rakyat (peternak mandiri) akan menghadapi masalah ganda yaitu menghadapi struktur pasar oligopoli pada pasar input (DOC, pakan, serta vitamin dan obat-obatan) dan struktur pasar oligopsonistik dipasar output. Implikasinya adalah peternak akan membayar harga input produksi yang lebih tinggi dari yang seharusnya dan menerima harga jual broiler lebih rendah dari yang seharusnya.

Kondisi ini menyebabkan peternak mandiri di Jawa Timur memiliki posisi tawar yang relatif rendah. Beberapa faktor penjelas sulitnya peternak rakyat adalah: (1) Integrasi vertikal yang dijalankan perusahaan peternakan skala besar adalah integrasi vertikal yang semu, sehingga menciptakan masalah margin ganda; (2) Struktur perusahaan peternakan yang melakukan integrasi vertikal adalah perusahaan yang oligopolistik di pasar input produksi (DOC dan pakan ternak) dalam bentuk oligopoli terpimpin, jika perusahaan pemimpin melakukan kebijakan harga akan diikuti perusahaan-perusahaan lainnya; dan (3) Secara empiris di lapangan, struktur oligopolistik pada pasar output ditunjukkan adanya kesepakatan harga melalui penentuan harga posko yang ditentukan melalui kelembagaan PINSAR sebagai harga acuan dalam penentuan harga broiler oleh pedagang ke peternak yang menjadi anggota mitra perusahaan peternakan skala besar dan pemodal besar.

Perusahaan peternakan skala besar baik secara nasional maupun di lokasi penelitian Jawa Timur di samping melakukan integrasi vertikal juga melakukan integrasi horisontal,

yaitu penggabungan penguasaan perusahaan yang menghasilkan barang atau produk sejenis yang saling bersaing di pasar. Dalam batas-batas tertentu integrasi horisontal dapat dilakukan tanpa penggabungan penguasaan perusahaan yang sejenis, namun secara empiris di lapangan hanya dalam bentuk asosiasi-asosiasi dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan bisnis broiler.

Peternak ayam broiler di wilayah Jawa Barat yang dalam hal ini direpresentasikan wilayah Bogor terdiri dari peternak kemitraan, yaitu baik kemitraan internal maupun eksternal. Pemilihan Bogor sebagai daerah survei karena Bogor merupakan sentra produksi utama di provinsi Jawa Barat. Untuk wilayah Bogor, meski peternak mandiri masih ada, namun saat ini jumlahnya sangat sedikit dan hanya yang beroperasi pada skala besar dan menengah. Keuntungan usaha ternak dengan kemitraan adalah harga jual terjamin melalui kontrak dan peternak tidak dipusingkan dengan harga pakan. Namun demikian, salah satu kelemahan dari usaha ternak melalui kemitraan yaitu peternak yang memelihara ayam tidak mengetahui kemana ayam itu dijual sehingga

menyebabkan terbatasnya saluran untuk penjualan. Selain itu juga peternak hanya sebagai *price taker* karena menjual ayam broiler ke perusahaan dengan harga sesuai kontrak.

Peternak memiliki akses terbatas terkait informasi pasar dan harga jual karena selama ini peternak mitra hanya mengetahui jumlah ayam broiler yang dipelihara. Peternak mitra sangat berupaya untuk menjaga ayam peliharaannya sehat, FCR rendah, dan tingkat mortalitas rendah (Risnajati, 2012).

Mekanisme penjualan ayam broiler dari peternak kemitraan pabrikan yaitu pedagang besar/pengumpul/pengepul/broker membeli ke perusahaan dalam bentuk *delivery order* (DO). Kemudian DO akan dibawa ke peternak untuk mengambil ayam broiler yang sudah siap dipanen, dengan jumlah sesuai dengan pemesanan (DO). Berdasarkan wawancara dengan peternak, mereka umumnya tidak mengetahui berapa harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan ke pedagang besar yang akan membeli ayam broiler dari kandangnya.

Berdasarkan informasi dari peternak, sistem penjualan ayam broiler kemitraan eksternal dengan

kemitraan internal berbeda. Pada kemitraan internal harga jual sesuai kontrak, sedangkan kemitraan eksternal harga jual tidak sesuai harga kontrak dan mengikuti harga pasar. Secara relatif peternak lebih banyak memilih usaha dengan sistem kemitraan internal.

Jalur distribusi ayam broiler secara umum di wilayah Bogor adalah dari peternak dijual dalam per kilogram berat hidup atau per ekor. Untuk peternak kemitraan, mereka menjual ayam broiler yang sudah dipanen dalam bentuk per kg berat hidup atau ekor ke perusahaan mitra dengan harga sesuai yang tertuang dalam perjanjian/kontrak. Harga minimal dalam perjanjian ditetapkan sebesar Rp 16.000/kg berat hidup. Kemudian pedagang pengumpul/pedagang besar/pengepul/broker atau RPA dapat membeli langsung ke perusahaan melalui DO. Kemudian pedagang pengumpul/pengepul/broker/pengumpul akan mendistribusikan ayam hidup ke RPA, selanjutnya ke pedagang grosir dan pedagang pengecer di pasar tradisional.

Rumah potong ayam (RPA) di Bogor berperan sebagai jasa pemotong dan juga jual beli ayam

hidup. RPA membeli ayam hidup dari pedagang pengumpul. Rata-rata ada 4-5 pedagang pengumpul yang memasok ayam broiler hidup ke setiap RPA. Pedagang pengumpul lebih dari satu ini untuk mengantisipasi stabilitas dan kontinuitas pasokan ayam hidup sebagai alternatif pilihan pemasok. Pasokan ayam hidup berasal dari Kabupaten Bogor (Pamijahan, Leuwiliang, Jonggol, Cibinong, Pondok Rajeg dan Jasinga) serta di luar Bogor (Sukabumi dan Cianjur). Kemudian RPA dapat menjual ayam hidup atau menjual dalam bentuk karkas (tanpa bulu dan jeroan) ke pasar. Selain itu, RPA juga menjual ke pedagang grosir dan atau pengecer dan pedagang keliling namun jumlahnya relatif sedikit. Meskipun RPA menyalurkan ayam potongnya ke pedagang grosir dan atau pedagang pengecer atau pedagang, ada juga RPA mendistribusikan ayamnya ke *outlet-outlet* retail modern seperti Lotte Mart, Macro, dan Superindo. Ukuran ayam yang didistribusikan ke ritel modern yaitu 0,9 – 1,2 kg/ekor (karkas) atau dalam bentuk hidup 1,4 – 1,6 kg/ekor.

Berdasarkan hasil diskusi dengan peternak, diinformasikan bahwa mereka mengeluhkan pola kemitraan yang pada implementasinya

membatasi jumlah pasokan terutama pada saat hari raya lebaran. Dalam hal ini perusahaan inti membatasi pasokan DOC sehingga jumlah ayam broiler di pasaran terbatas. Hal inilah yang ditengarai memicu kenaikan harga pada saat hari raya.

Analisis Pergerakan Harga dan Margin di Peternak dan Pengecer

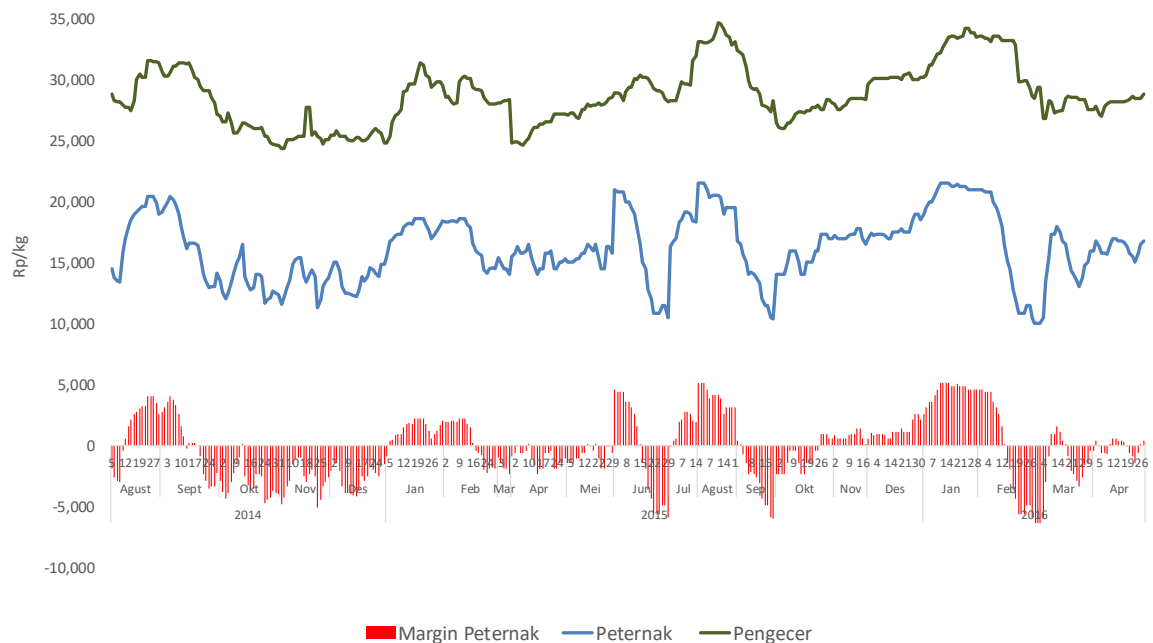
Tingkat integrasi harga dapat juga dilihat dari pola dan pergerakan harga ayam broiler di tingkat peternak dan pengecer. Pada Gambar 2 dan 3, dapat dilihat pola pergerakan harga peternak dan pengecer untuk wilayah Surabaya dan Bandung. Karena ketersediaan data harian hanya untuk kota besar, maka harga ayam broiler di wilayah Surabaya dan Bandung mewakili harga di masing-masing propinsi yakni Jawa Timur dan Jawa Barat.

Selain itu Gambar 2 dan 3 juga memberikan informasi mengenai tingkat margin di tingkat peternak. Tingkat margin diperoleh dari selisih harga di tingkat peternak dan biaya produksi. Biaya produksi diperoleh dari hasil wawancara dengan peternak di masing-masing wilayah.

Jika dilihat pola pergerakan harga, terlihat bahwa pergerakan

harga di tingkat peternak dan pengecer tidak sepenuhnya simetris. Hal ini mengindikasikan bahwa harga di

tingkat peternak dan pengecer tidak terintegrasi yang menunjukkan transmisi harga yang tidak sempurna.

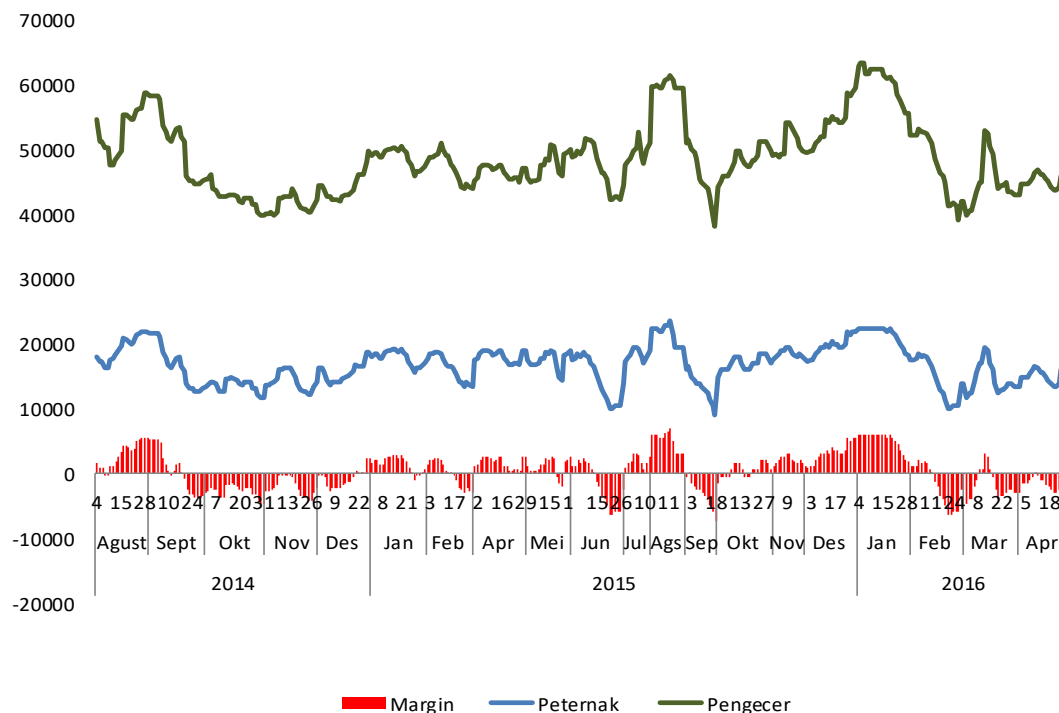


Gambar 2. Perkembangan Harga Peternak Vs Pengecer di Surabaya

Sumber: Kemendag (2016) dan PINSAR (2016)

Propinsi Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan sentra utama produksi ayam broiler. Dengan karakteristik yang hampir sama, maka tingkat margin peternak juga hampir sama. Hal ini dapat terlihat dari pola sebaran margin yang hampir mirip di kedua wilayah tersebut. Namun demikian, terlihat bahwa margin peternak di

Surabaya lebih banyak yang bernilai negatif selama rentang waktu tersebut yang artinya peternak di Jawa Timur lebih sering mengalami kerugian. Hal ini sejalan dengan uraian sebelumnya bahwa posisi peternak sangat lemah dan tidak bisa menentukan harga (Sarwanto, 2004).



Gambar 3. Perkembangan Harga Peternak Vs Pengecer di Bandung

Sumber: Kemendag (2016) dan PINSAR (2016)

Integrasi Pasar di Provinsi Jawa Timur

Analisis integrasi pasar dilakukan pada dua tingkatan pasar, yaitu: (a) pasar tingkat peternak ke pedagang besar (grosir), (b) pasar tingkat pedagang besar (grosir) ke pedagang pengecer (*ritel*). Berdasarkan hasil analisis integrasi pasar untuk komoditas daging broiler dari tingkat petani (peternak) ke pedagang besar (grosir) di Provinsi Jawa Timur diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

$$P_t = 1028,919^* + 0,974 P_{t-1}^{***} + 0,308^* (P_d - P_{d-1}) - 0,016 P_{d-1}$$

$$R^2 = 0,946$$

$$IMC = -59,667 \text{ (tidak terintegrasi)}$$

dimana :

P_t = harga di tingkat peternak saat ini

P_{t-1} = harga di tingkat peternak periode sebelumnya

P_d = harga di tingkat pedagang besar

P_{d-1} = harga di tingkat pedagang besar periode sebelumnya

*) = signifikan 10%

**) = signifikan 5 %

***) = signifikan 1%

Koefisien b_2 pada hasil estimasi menunjukkan seberapa jauh harga ditingkat pedagang besar (grosir) di

Kota Surabaya ditransmisikan ke tingkat peternak. Apabila nilai parameter b_2 bernilai 1, maka perubahan harga sebesar 1% pada tingkat pedagang besar (grosir) di Kota Surabaya akan menyebabkan perubahan harga sebesar 1% juga di tingkat peternak broiler di Jawa Timur. Nilai parameter b_2 yang diperoleh pada estimasi diatas diperoleh nilai sebesar 0,308 atau lebih kecil dari 1 (satu). Hasil estimasi tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka pendek perubahan harga broiler di tingkat pedagang besar (grosir) di Kota Surabaya tidak ditransmisikan secara sempurna ke tingkat peternak. Dimana kenaikan harga daging broiler 1% ditingkat pedagang besar (grosir) hanya menyebabkan kenaikan harga 0,308% ditingkat peternak.

Dari hasil estimasi juga diperoleh hasil bahwa kontribusi harga pada periode sebelumnya terhadap harga broiler peternak yang berlaku saat ini kurang dari satu baik untuk variabel peternak periode sebelumnya maupun untuk variabel harga pedagang besar (grosir) periode sebelumnya. Pengaruh harga pada tingkat peternak pada periode sebelumnya terhadap harga tingkat peternak saat ini bertanda positif dan kurang dari satu

yaitu sebesar 0,974. Berbeda halnya dengan pengaruh harga pedagang besar (grosir) broiler periode sebelumnya yang bertanda negatif dan kontribusinya jauh dibawah satu yaitu sebesar -0,016 sehingga dapat dikatakan tidak signifikan. Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga ditingkat pedagang besar (grosir) di Kota Surabaya periode sebelumnya lebih kecil dibandingkan dengan harga ditingkat peternak broiler periode sebelumnya terhadap tingkat harga saat ini ditingkat peternak. Harga broiler ditingkat pedagang besar (grosir) periode sebelumnya bukanlah penentu pembentukan utama harga broiler ditingkat peternak.

Perbandingan antara koefisien pengaruh harga ditingkat peternak periode sebelumnya dengan pengaruh harga pedagang besar (grosir) periode sebelumnya terhadap pembentukan harga ditingkat peternak saat ini, menunjukkan tinggi rendahnya keterpaduan antara kedua pasar yang bersangkutan yang disebut indeks hubungan pasar atau IMC. Apabila nilai IMC semakin mendekati nol dikatakan adanya keterpaduan pasar jangka panjang antara pasar di tingkat peternak dengan pasar ditingkat

pedagang besar (grosir) di Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai IMC sebesar -59,667 atau jauh dari 0. Hal ini mengandung arti bahwa keterpaduan pasar broiler di Kota Surabaya antara harga broiler di tingkat peternak dan harga broiler di tingkat grosir tidak terintegrasi dengan baik. Tidak terjadinya integrasi pasar broiler tersebut disebabkan harga broiler saat ini cenderung mengikuti harga posko yang ditentukan PINSAR yang merupakan wadah perusahaan-perusahaan besar peternakan dalam penentuan strategi bersama, diantaranya dalam penentuan harga posko yang merupakan harga patokan pedagang dalam menebus broiler peternak yang menjadi anggota mitra perusahaan tersebut. Sementara itu, penentuan harga posko lebih ditentukan oleh faktor biaya pokok produksi daging broiler, dimana besaran biaya pokok produksi broiler sangat ditentukan harga pakan ternak.

Nilai R^2 pada analisis diatas diperoleh sebesar 0,946. Hal ini mengandung arti bahwa 95% variasi harga di tingkat peternak broiler dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya (*independent variabel*), sedangkan selebihnya sebesar 5%

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model. Artinya model yang dibangun dapat menjelaskan fenomena yang dikaji dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis integrasi pasar untuk komoditas broiler dari tingkat pedagang besar (grosir) ke pedagang pengecer (*ritel*) di Provinsi Jawa Timur diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

$$P_d = 559,823^{***} + 0,245 P_{d-1}^{**} + 0,908 (P_c - P_{c-1})^{***} + 0,678 P_{c-1}^{***}$$

$$R^2 = 0,999$$

$$IMC = 0,361 \text{ (terintegrasi)}$$

dimana :

P_d = harga di tingkat pedagang besar

P_{d-1} = harga di tingkat pedagang besar periode sebelumnya

P_c = harga di tingkat pengecer

P_{c-1} = harga di tingkat pengecer pada periode sebelumnya

*) = signifikan 10%

**) = signifikan 5%

***) = signifikan 1%

Koefisien b_2 pada hasil estimasi menunjukkan seberapa jauh harga ditingkat pedagang pengecer (*ritel*) di Kota Surabaya ditransmisikan ke tingkat pedagang besar (grosir) daging broiler di Kota Surabaya. Apabila nilai parameter b_2 bernilai 1, maka

perubahan harga sebesar 1% pada tingkat pedagang pengecer (*ritel*) akan menyebabkan perubahan harga sebesar 1% juga di tingkat pedagang besar (grosir) daging broiler. Nilai b_2 pada estimasi diatas diperoleh nilai sebesar 0,908 atau mendekati angka 1. Hasil estimasi ini berarti bahwa dalam jangka pendek perubahan harga broiler di tingkat pedagang pengecer (*ritel*) di Kota Surabaya ditransmisikan dengan cukup baik ke tingkat pedagang besar daging broiler. Dimana kenaikan harga daging broiler 1% ditingkat pedagang pengecer menyebabkan kenaikan harga 0,908% ditingkat pedagang besar (grosir).

Dari hasil estimasi juga diperoleh hasil bahwa kontribusi harga pada periode sebelumnya terhadap harga broiler pedagang besar (grosir) yang berlaku saat ini kurang dari satu, baik pada tingkat pedagang besar (grosir) daging broiler maupun pada pedagang pengecer (*ritel*). Pengaruh harga pada tingkat pedagang besar periode sebelumnya (pasar lokal) terhadap harga tingkat pedagang besar (pasar lokal) saat ini bertanda positif dibawah satu yaitu sebesar 0,245. Dengan besaran yang lebih besar juga diperoleh pada pengaruh harga pedagang pengecer (*ritel*)

broiler sebelumnya yang kontribusinya kurang dari satu yaitu sebesar 0,678. Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga ditingkat pedagang pengecer (*ritel*) di Kota Surabaya periode sebelumnya lebih besar dibandingkan dengan harga ditingkat pedagang besar daging broiler periode sebelumnya terhadap tingkat harga saat ini ditingkat pedagang besar (grosir) daging broiler. Harga broiler ditingkat pengecer (*ritel*) periode sebelumnya menjadi salah satu penentu pembentukan harga ditingkat pedagang besar (grosir) daging broiler saat ini.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai IMC sebesar 0,361. Hal ini menunjukkan tingkat keterpaduan pasar broiler di Kota Surabaya antara harga broiler di tingkat pedagang besar (grosir) dan harga pengecer (*ritel*) adalah terintegrasi dengan baik. Secara relatif dari besaran IMC jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya keterpaduan pasar di Surabaya dari pedagang besar ke pedagang pengecer adalah yang terbaik. Lebih terintegrasinya pasar broiler dari pedagang besar ke pedagang pengecer disebabkan oleh beberapa faktor: (a) Jawa Timur merupakan daerah sentra produksi

broiler sekaligus daerah sentra produksi pakan dan bahan baku pakan; (b) Penetapan harga Posko oleh PINSAR tidak selalu diikuti oleh pelaku pasar, karena jumlah pelaku yang banyak dan memiliki jaringan masing-masing; (c) Informasi yang secara relatif lebih terbuka terutama informasi harga.

Nilai R^2 pada analisis diatas diperoleh sebesar 0,999. Ini artinya bahwa 99,9% variasi harga di tingkat pedagang besar (grosir) daging broiler dapat di Kota Surabaya dapat dijelaskan variabel-variabel bebasnya (*independent variabel*), sedangkan selebihnya sebesar 0,01% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Artinya model yang dibangun dapat menjelaskan fenomena yang dikaji dengan sangat baik.

Integrasi Pasar di Provinsi Jawa Barat

Analisis integrasi pasar di Jawa Barat juga dilakukan pada dua tingkatan, yaitu: (a) tingkat peternak ke pedagang besar (grosir), (b) tingkat pedagang besar (grosir) ke pedagang pengecer (*ritel*). Berdasarkan hasil analisis integrasi pasar untuk komoditas daging broiler dari tingkat petani (peternak) ke pedagang besar

(grosir) di Provinsi Jawa Barat diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

$$P_t = 1265,167^* + 1,024 P_{t-1}^{**} + 0,046 (P_d - P_{d-1}) - 0,068 P_{d-1}^{**}$$

$$R^2 = 0,957$$

$$IMC = -15,057 \text{ (tidak terintegrasi)}$$

dimana :

P_t = harga di tingkat peternak saat ini

P_{t-1} = harga di tingkat peternak periode sebelumnya

P_d = harga di tingkat pedagang besar

P_{d-1} = harga di tingkat pedagang besar periode sebelumnya

*) = signifikan 10%

**) = signifikan 5%

***) = signifikan 1%

Nilai b_2 yang diperoleh dari hasil estimasi diatas adalah sebesar 0,046 atau jauh lebih kecil dari angka 1 (satu). Hasil estimasi ini berarti bahwa dalam jangka pendek perubahan harga broiler di tingkat pedagang besar (grosir) di Kota Bandung tidak ditransmisikan secara baik ke tingkat peternak broiler. Dimana kenaikan harga daging broiler 1% ditingkat pedagang besar (grosir) hanya menyebabkan kenaikan harga 0,046% ditingkat peternak broiler.

Dari hasil estimasi juga diperoleh hasil bahwa kontribusi harga pada

periode sebelumnya terhadap harga broiler peternak yang berlaku saat ini lebih dari satu untuk variabel peternak periode sebelumnya dan kurang dari satu untuk variabel harga pedagang besar (grosir) periode sebelumnya. Pengaruh harga pada tingkat peternak periode sebelumnya (pasar lokal) terhadap harga tingkat peternak (pasar lokal) saat ini bertanda positif dan diatas satu yaitu sebesar 1,024. Berbeda halnya dengan pengaruh harga pedagang besar (grosir) broiler periode sebelumnya yang bertanda negatif dan kontribusinya kurang dari satu yaitu sebesar -0,068. Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga ditingkat pedagang besar (grosir) di Kota Bandung periode sebelumnya lebih kecil dibandingkan dengan harga ditingkat peternak broiler periode sebelumnya terhadap tingkat harga ditingkat peternak saat ini. Harga broiler ditingkat pedagang besar (grosir) periode sebelumnya bukanlah penentu pembentukan utama harga ditingkat peternak, namun lebih ditentukan harga peternak periode sebelumnya.

Perbandingan antara koefisien pengaruh harga ditingkat peternak periode sebelumnya dengan pengaruh harga pedagang besar (grosir) periode

sebelumnya terhadap pembentukan harga ditingkat peternak saat ini, menunjukkan tinggi rendahnya keterpaduan antara kedua pasar yang bersangkutan yang disebut indeks hubungan pasar atau IMC. Apabila nilai IMC semakin mendekati nol dikatakan adanya keterpaduan pasar jangka panjang antara pasar di tingkat peternak broiler dengan pasar ditingkat pedagang besar (grosir) di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai IMC sebesar 15,057. Hal ini berarti bahwa keterpaduan pasar broiler di Kota Bandung antara harga broiler di tingkat peternak dan harga grosir tidak terintegrasi dengan baik. Tidak terjadinya keterpaduan pasar broiler tersebut disebabkan harga broiler di Jawa Barat saat ini cenderung mengikuti harga posko yang ditentukan PINSAR yang merupakan wadah perusahaan-perusahaan besar peternakan. Dimana para pedagang membeli broiler ke peternak dengan berpatokan pada harga posko sebagai harga acuan. Sementara itu, penentuan harga posko lebih ditentukan oleh biaya pokok produksi daging broiler, dimana besaran biaya pokok produksi broiler sangat ditentukan harga pakan

ternak. Disamping itu, harga broiler di Kota Bandung juga banyak ditentukan oleh pasokan yang ada di daerah-daerah sentra produksi di Jawa Barat (Tasikmalaya, Ciamis, Bogor) dan daerah pusat pasar utama DKI Jakarta, karena lokasinya yang secara spasial berdekatan.

Nilai R^2 pada analisis diatas diperoleh sebesar 0,957. Ini artinya adalah 96% variasi harga di tingkat peternak broiler dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya (*independent variabel*), sedangkan selebihnya sebesar 4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

Berdasarkan hasil analisis integrasi pasar untuk komoditas broiler dari tingkat pedagang besar (grosir) ke pedagang pengecer (*ritel*) di Provinsi Jawa Barat diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

$$P_d = -32.506 + 1,274 P_{d-1}^{***} + 0,932 (P_c - P_{c-1})^{***} + 0,322 P_{c-1}^{**}$$

$$R^2 = 0,999$$

$$IMC = -3,953 \text{ (tidak terintegrasi)}$$

Keterangan :

P_d = harga di tingkat pedagang besar

P_{d-1} = harga di tingkat pedagang besar periode sebelumnya

P_c = harga di tingkat pengecer

P_{c-1} = harga di tingkat pengecer periode sebelumnya

*) = signifikan 10%

**) = signifikan 5 %

***) = signifikan 1%

Nilai b_2 yang diperoleh pada estimasi diatas menunjukkan sebesar 0,932 atau mendekati angka 1. Hasil estimasi ini berarti bahwa dalam jangka pendek perubahan harga broiler di tingkat pedagang pengecer (*ritel*) di Kota Bandung ditransmisikan dengan cukup baik ke tingkat pedagang besar daging broiler. Dimana kenaikan harga daging broiler 1% ditingkat pedagang pengecer menyebabkan kenaikan harga 0,932% ditingkat pedagang besar (grosir).

Dari hasil estimasi juga diperoleh hasil bahwa kontribusi harga pada periode sebelumnya terhadap harga broiler pedagang besar (grosir) yang berlaku saat ini lebih besar dari satu, sedangkan pada pedagang pengecer (*ritel*) periode sebelumnya lebih kecil dari satu. Pengaruh harga pada tingkat pedagang besar periode sebelumnya (pasar lokal) terhadap harga tingkat pedagang besar (pasar lokal) saat ini bertanda positif lebih besar dari satu yaitu sebesar 1,274. Dengan besaran yang lebih kecil dari satu namun dengan tanda yang juga positif juga

diperoleh pada pengaruh harga pedagang pengecer (*ritel*) broiler sebelumnya yang kontribusinya kurang dari satu yaitu sebesar 0,322. Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga ditingkat pedagang pengecer (*ritel*) di Kota Bandung periode sebelumnya lebih kecil dibandingkan dengan harga ditingkat pedagang besar daging broiler periode sebelumnya terhadap tingkat pedagang besar (grosir) daging broiler saat ini. Harga broiler ditingkat pengecer (*ritel*) periode sebelumnya bukanlah penentu utama pembentukan harga ditingkat pedagang besar (grosir) daging broiler saat ini.

Perbandingan antara koefisien pengaruh harga ditingkat pedagang besar (grosir) periode sebelumnya dengan pengaruh harga pedagang pengecer (*ritel*) periode sebelumnya terhadap pembentukan harga ditingkat pedagang besar (grosir) saat ini, menunjukkan tinggi rendahnya keterpaduan antara kedua pasar yang bersangkutan yang disebut indeks hubungan pasar atau IMC. Apabila nilai IMC semakin mendekati nol, itu berarti adanya keterpaduan pasar jangka panjang antara pasar di tingkat pedagang besar (grosir) daging broiler

dengan pasar ditingkat pedagang pengecer (*ritel*) di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai IMC sebesar -3,953. Hal ini menunjukkan tingkat keterpaduan pasar broiler di Kota Bandung antara harga broiler di tingkat pedagang besar (grosir) dan harga pengecer (*ritel*) adalah tidak terintegrasi dengan baik. Kurang adanya keterpaduan pasar tersebut, karena harga broiler pedagang besar (grosir) saat ini cenderung mengikuti harga posko yang ditentukan PINSAR yang merupakan wadah perusahaan-perusahaan besar peternakan dalam melakukan kesepakatan harga posko bersama. Sementara itu harga posko sangat ditentukan biaya pokok produksi usaha ternak dan biaya pokok produksi sangat ditentukan harga pakan ternak. Disamping itu, harga broiler di Kota Bandung juga banyak dipengaruhi oleh pasokan dari daerah sentra produksi (Tasikmalaya, Ciamis, Bogor) dan harga di tujuan pasar utama DKI Jakarta, karena lokasinya yang secara spasial berdekatan.

Nilai R^2 pada analisis diatas diperoleh sebesar 0,999. Ini artinya bahwa 99,9% variasi harga di tingkat pedagang besar (grosir) daging broiler

dapat di Kota Bandung dapat dijelaskan variabel-variabel bebasnya (independent variabel), sedangkan selebihnya sebesar 0,01% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Artinya model yang dibangun dapat menjelaskan fenomena yang dikaji dengan sangat baik.

Index of Market Connection (IMC) yang dihitung dari hasil regresi regresi model Ravallion di Jawa Timur dan Jawa Barat dapat dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Index of Market Connection (IMC)

Propinsi	Peternak-Pedagang Besar		Pedagang Besar-Pengecer	
Jawa Timur	IMC = - 59,667	Tidak Terintegrasi	IMC = 0,361	Terintegrasi
Jawa Barat	IMC = - 15,057	Tidak Terintegrasi	IMC = - 3,953	Tidak Terintegrasi

Nilai IMC di masing-masing level menunjukkan bahwa tidak terjadi integrasi pasar di tingkat peternak-pedagang besar baik di Jawa Timur maupun Jawa Barat begitu pula di tingkat pedagang besar-pengecer di Jawa Barat. Namun demikian untuk Jawa Timur, terjadi integrasi pasar di tingkat pedagang besar-pengecer. Dengan tidak terintegrasinya pasar secara vertikal, maka ada kecenderungan bahwa margin

keuntungan tidak terdistribusi dengan baik di tiap pelaku dalam rantai distribusi.

Berdasarkan hasil analisis, dapat diindikasikan bahwa untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai sentra utama produksi, pasar broiler tidak terintegrasi yang tercermin dari nilai *index market of connection*. Hal ini juga menunjukkan bahwa harga di pengecer dan pedagang besar periode sebelumnya tidak mempengaruhi harga di tingkat eceran. Begitu pula dengan harga di peternak dan pedagang besar periode sebelumnya tidak mempengaruhi harga di tingkat pedagang besar. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang besar merupakan *leading market* yang menentukan harga broiler di pasar.

Varela, Carrol, & Lacovone (2013), Hernandez, Ibarra & Trupkin (2014), dan Esposito & Listorti (2014) menyatakan bahwa perbedaan integrasi harga antara lain dapat disebabkan perbedaan infrastruktur transportasi dan produktivitas, namun berbeda untuk kasus ayam broiler di Jawa Barat dan Jawa Timur. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat integrasi harga broiler, perlu upaya peningkatan transmisi yang lebih baik melalui peningkatan akses informasi

pasar secara transparan. Hal ini perlu didukung oleh tersedianya infrastruktur dan sarana informasi yang dapat diakses secara online. Terintegrasinya pasar broiler akan memberikan dampak pada distribusi margin pelaku usaha perunggasan sehingga lebih berkeadilan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum pasar ayam broiler tidak terintegrasi. Harga di pengecer dan pedagang besar periode sebelumnya tidak mempengaruhi harga di tingkat eceran. Begitu pula dengan harga di peternak dan pedagang besar periode sebelumnya tidak mempengaruhi harga di tingkat pedagang besar.

Keterpaduan pasar yang paling baik ditemukan di Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah sentra produksi broiler dan sekaligus daerah sentra produksi bahan baku pakan. Lebih terintegrasinya pasar daging broiler dari pedagang besar ke pedagang pengecer di Kota Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (a) Jawa Timur merupakan daerah sentra produksi broiler

sekaligus daerah sentra produksi pakan dan bahan baku pakan; (b) Penetapan harga Posko oleh asosiasi tidak selalu diikuti oleh semua pelaku pasar; dan (c) Informasi relatif lebih terbuka terutama informasi mengenai harga. Sementara itu di Jawa Barat pasar daging ayam tidak terintegrasi dengan baik.

Agar pasar broiler lebih terintegrasi, maka perlu adanya transmisi harga yang lebih baik melalui peningkatan akses informasi pasar secara transparan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur informasi harga secara online. Terintegrasinya harga akan berimplikasi pada distribusi margin keuntungan yang lebih berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, Bapak Saptana selaku peneliti pada Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, dan perwakilan PINSAR, serta semua pihak yang telah membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, C & J. Wyeth. (1994). Cointegration and Market Integration: An Application to the Indonesian Rice Market. *The Journal of Development Studies*, Vol 30, No. 2, January 1994 pp. 303-328
- Asmarantaka, R. W. (2009). Pemasaran Produk-Produk Pertanian dalam Bunga Rampai Agribisnis Seri Pemasaran. Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2011*.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2013*.
- Bahri, D.I, Z. Fanani, dan B.A. Nugroho. (2012). Analisis Struktur Biaya dan Perbedaan Pendapatan Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging pada Pola dan Skala Usaha Ternak yang Berbeda di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ternak Tropika* Vo.13, No. 1:35-46
- Bathla, S dan Srinivasulu. (2011). Price Transmission and Asymmetry: An Empirical Analysis of Indian Groundnut Seed and Oil Markets. *India Journal of Agriculture and Economy*, Vol.66 No.4, October-December 2011
- Djulin, A & AH. Malian. (2003). *Struktur dan Integrasi Pasar Ekspor Lada Hitam dan Lada Putih di Daerah Produksi Utama*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Ditjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN). (2016). *Perkembangan Harga Eceran Daging Ayam di Indonesia*.
- Ditjen PKH, (2013). *Statistik Peternakan 2013*. Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, Departemen Pertanian.
- Esposito, R., dan G. Listorti. (2013). Agricultural Price Transmission Across Space and Commodities During Price Bubbles. *The Journal of the International Association of Agricultural Economists Volume 44, Issue 1, January 2013, Pages 125-139*.
- Firdaus, M and I. Gunawan. (2012). Integration Among Regional Vegetable Markets in Indonesia. *Journal of International Society for Southeast Asian Agricultural Science* Vol. 8, No. 2 (2012), pp. 96-106
- Hernandez, M. A., R. Ibarra, dan D.R. Trupkin. (2014). How Far Do Shocks Move Across Borders? Examining Volatility Transmission in Major Agricultural Future Markets. *Eur Rev Agric Econ* (2014) 41 (2): 301-325.
- Kementerian Perdagangan. (2016). *Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2015*.
- Kompas.com. (2017, 1 Maret). *Mengorek Persoalan Disparitas Harga Telur dan Daging Ayam*. Diunduh Tanggal 27 Juli 2017 dari <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/01/190000026/mengorek.persoalan.disparitas.harga.telur.dan.daging.ayam?page=all>
- PINSAR. (2016). *Perkembangan Harga Peternak Ayam Broiler*.
- Ravallion, M. (1986). *Testing Market Integration American Agricultural Economics Association*.
- Sarwanto, C. (2004). Kemitraan Produksi dan Pendapatan Peternak Ayam Ras Pedaging (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Saptana dan A. Daryanto. (2013). *Dinamika Kemitraan Usaha Agribisnis Berdayasaing dan Berkelanjutan*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian.

Saptana dan H. P. Saliem. (2015).
Tinjauan Konseptual Makro-Mikro
Pemasaran dan Implikasinya Bagi
Pembangunan Pertanian. *Forum
Agro Ekonomi*, Volume 38 No. 2,
Desember 2015, hal: 1-18.

Risnajati, D. (2012). Perbandingan Bobot
Akhir, Bobot Karkas dan Persentase
Karkas Berbagai Strain Broiler.
Sains Peternakan Vol. 10 (1), Maret
2012: 11-14.

Tahir, Z.(1997). *Integration of Agricultural
Commodity Markets in the South*

Punjab, Pakistan. National Program,
International Irrigation Management
Institute Lahore.

Timmer, C. P. (1987). Corn Marketing:
Chapter 8 in *The Corn Economy of
Indonesia*. Cornell University Press,
Ithaca, New York, USA..

Varela, G., E.A. Carrol, dan L. Lacovone.
(2013). Determinants of Market
Integration and Price Transmission
in Indonesia. *Journal of Southeast
Asian Economies Vol. 30, No. 1*
(2013), pp. 19-44.

ULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 11 NO.1 & 2, JULI-DESEMBER 2017

ISSN: 1979-9187

Accredited No.818/E/2015 Tanggal 15 Juli 2015

The abstract sheet may reproduced/copied without permission or charge

INDEKS SUBYEK

A

Aktor, 11 (1): 103, 104, 113, 114, 116, 118, 119
Anti-Circumvention, 11 (2): 143, 145, 146, 161, 162, 163, 164, 166, 167

C

Competition, 11 (2): 227, 229, 230, 234, 236, 241, 242, 243, 244

D

Data panel, 11 (1): 43, 46, 48, 49, 51, 53, 58
Dynamic, 11 (2): 227, 230, 231, 232, 233, 234, 240, 246

E

Economic Activity, 11 (2): 216, 223
Ekspor Kakao, 11 (1): 70, 71, 83, 89
Expert Judgement, 11 (2): 174

F

Faktor, 11 (1): 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 118, 119
FGD, 11 (2): 187, 192, 193, 194, 195
Fluktuasi Harga, 11 (2): 247, 249

H

Harga Privat, 11 (1): 76, 77, 80, 85, 86, 88, 90, 91
Harga Garam, 11 (1): 43, 49, 50, 58, 61, 62, 64

I

Impor Garam, 11 (1): 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64
Incidence, 11 (2): 173, 175, 176
Income Distribution, 11 (2): 207, 216, 220
International Market, 11 (2): 187, 193

K

Kebijakan Pemerintah, 11 (1): 113, 114
Kesejahteraan, 11 (2): 123, 130, 131, 132, 140
Kinerja Ekspor Indonesia, 11 (1): 10, 17
Kode pos tarif, 11 (1): 51, 61, 65, 66

M

Market Position, 11 (2): 227, 230, 232, 244

P

Pedagang Besar, 11 (2): 247, 250, 251, 252, 253, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
Pengecer, 11 (2): 247, 250, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268
Pengembangan Ekspor, 11 (1): 4, 16, 18
Perekonomian, 11 (1): 97, 98
Pertumbuhan, 11 (2): 123, 130, 132, 133, 134, 136, 140, 141
Pertumbuhan Ekonomi, 11 (1): 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
Price Forming, 11 (2): 223, 224
Prioritas, 11 (1): 97, 101, 102, 103, 104,

113, 116, 117, 118

Priority, 11 (2): 187, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202,
203

Proxy, 11 (2): 173

S

Slightly Modification Circumvention, 11
(2): 148, 155, 156

T

Tradable, 11 (1): 76, 77, 78, 80, 85, 87,
88, 90, 91

INDEKS PENGARANG

A

Abel-Koch, 11 (2): 171, 185
Agur, 11 (1): 29, 30, 31, 32, 40
Alexander & Wyeth, 11 (2): 250, 269
Alham, 11 (1): 45, 62, 63
Aliyatillah & Kusnadi, 11 (1): 72, 85, 87, 93

B

Baldwin, 11 (1): 30, 40
Bathla & Srinivasulu, 11 (2): 250, 269
Bernard et al, 11 (2): 171, 172, 185

D

Damayanti, 11 (1): 89
David, 11 (1): 101, 109, 121

E

Edwards & Schoer, 11 (2): 231, 232, 245

F

Feenstra et al, 11 (2): 172, 173, 183, 185

G

Gittinger, 11 (1): 79
Gorener, 11 (2): 191, 204

H

Haryono, 11 (1): 85
Hosoe et al, 11 (2): 212, 213, 225
Hubeis, 11 (1): 99, 106, 122

I

Itakura, 11 (2): 124, 141

J

Juanda (2012): 46, 47, 48, 55

K

Kadarusman & Nadvi, 11 (2): 189, 204
Kustiari, 11 (2): 228, 229, 245

M

Manurung, 11 (2): 125, 141
Marimin. N Maghfiroh, 11 (1): 101, 102, 122

N

Nachrowi, 11 (1): 55

P

Pearson, 11 (1): 76

R

Rangkuti, 11 (1): 101, 122
Ravallion, 11 (2): 251, 269
Romer, 11 (1): 2, 19

S

Solow, 11 (1): 2, 19
Sugiyono, 11 (1): 100, 122
Sukarjiman & Sapong, 11 (2): 190, 205

V

Vanhnalat et al, 11 (2): 125, 142
Vermulst, 11 (2): 162, 168

W

Widodo, 11 (2): 231, 246

Willems & Natens, 11 (2): 163, 168

Y

Yu, 11 (2): 144, 161, 168

INDEKS KATA KUNCI

A

Anti-Dumping, 11 (2): 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168

Autoregressive Distributed Lag, 11 (1): 21, 33

Ayam Broiler, 11 (2): 247, 248, 249, 252, 253, 256, 257, 269

B

Berdaya saing, 11 (1): 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122

Biji Kakao, 11 (1): 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 93, 94, 95, 96

C

Circumvention, 11 (2): 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168

D

Daya Saing, 11 (1): 69, 72, 73, 76, 83, 84, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96

E

ECM, 11 (1): 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Ekspor, 11 (1): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41; 11 (2): 187, 204

Ekspor Kopi, 11 (2): 227, 245

Entrepot Trade, 11 (2): 169

H

Harga CPO Dunia, 11 (2): 207

Histerisis: 21, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 41

I

Indirect Export, 11 (2): 169, 170, 71, 173, 185, 186

Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), 11 (2): 123

Integrasi Pasar, 11 (2): 247, 250, 251, 259, 261, 265

Intermediary Country, 11 (2): 169

K

Kebijakan Impor Garam Indonesia: 43, 59

Keunggulan Komparatif, 11 (2): 227

Kopi, 11 (2): 227, 245, 246

L

Liberalisasi, 11 (2): 123, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140

M

Metode ANP, 11 (2): 187

Model CGE, 11 (2): 207

P

Pangan, 11 (1): 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122

Pangsa pasar, 11 (2): 227

Penentu harga, 11 (2): 207

Pengembangan UMKM, 11 (1): 97, 100,

103, 104, 105, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 122

Perdagangan Barang, 11 (2): 123, 125, 127

Permintaan Impor Indonesia, 11 (1): 43

Pertumbuhan Ekonomi, 11 (1): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Policy Analysis Matrix, 11 (1): 69, 70, 76, 80, 95

Produk Baja, 11 (2): 143, 150, 158, 165, 166

Produksi Garam, 11 (1): 43, 44, 45, 46, 49, 52, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 67

R

Ravallion, 11 (2): 247, 250, 251, 252, 267, 269

Re-export, 11 (2): 169, 172, 173, 183, 185

S

Strategi, 11 (1): 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 109, 110, 111, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122

Structural Break, 11 (1): 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33

Sunk Cost Entry, 11 (1): 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 37, 38

T

Trading House, 11 (2): 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 202, 203

Transmisi Harga, 11 (2): 247, 258, 268

U

UKM, 11 (2): 187, 204

KEYWORD INDEKS

A

ANP Methods, 11 (2): 187
Anti-Dumping, 11 (2): 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 153, 159, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168
Autoregressive Distributed Lag, 11(1): 21,
22, 33

C

CGE models, 11 (2): 207
Chicken Broiler, 11 (2): 247
Circumvention, 11 (2): 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168
Cocoa, 11 (1): 69, 70, 94, 95
Coffee, 11 (2): 227, 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246
Comparative Advantage, 11 (2): 227, 228,
229, 230, 231, 237
Competitive, 11 (1): 97, 98, 99, 121, 122
Competitiveness, 11 (1): 69, 70, 95
CPO world price, 11 (2): 207

E

ECM, 11(1): 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Economic Growth, 11 (1): 1, 2, 17, 18, 19
Entrepot Trade, 11 (2): 169
Export, 11 (1): 1, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 24,
25, 27, 31, 39, 41; 11 (2): 187, 188, 189,
190, 191, 193, 194, 197, 198, 200, 201,
202, 203, 204

Export of Coffee, 11 (2): 228, 237

F

Food, 11 (1): 97, 121

H

Hysteresis, 11 (1): 22, 27, 40

I

Indirect Export, 11 (2): 169, 170, 71, 173,
185, 186
Indonesia-European Union
Comprehensive Economic Partnership
Agreement (I-EU CEPA), 11 (2): 123
Indonesia Import Demand, 11 (1): 43
Intermediary Country, 11 (2): 169

L

Liberalization, 11 (2): 123, 124, 141

M

Market Integration, 11 (2): 247, 250, 269,
270
Market Share, 11 (2): 228, 232, 236, 237,
241, 242, 243, 244

P

Policy Analysis Matrix, 11 (1): 69, 70, 76,
80, 95
Price influencer, 11 (2): 207, 210, 222,
223
Price taker, 11 (2): 207, 223

Price Transmission, 11 (2): 247, 269

R

Ravallion, 11 (2): 247, 250, 251, 252, 267, 269

Re-export, 11 (2): 169, 172, 173, 183, 185

S

Salt Import Policy of Indonesia, 11 (1): 43

Salt Production, 11 (1): 43

SMEs, 11 (2): , 188, 189, 190, 191, 194, 204, 205

SMEs Development, 11 (1): 97

Steel Product, 11 (2): 143, 144

Strategy, 11 (1): 97, 121, 122

Structural Break, 11 (1): 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33

Sunk Cost, 11 (1): 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 39, 40

T

Trade in Goods, 11 (2): 124

Trading House, 11 (2): 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 202, 203

JUDUL NASKAH BAHASA INDONESIA SPESIFIK, JELAS, MENGANDUNG UNSUR KATA KUNCI, MAKSIMAL 15 KATA

Title in English, Specific, Clear, Contains Key Words , Maximum 15 Words

A. Firstauthor^{1*}, B.C. Secondauthor², D. Thirdauthor^{1,2}

¹First affiliation, Address, City and Postcode, Country, email address

²Second affiliation, Address, City and Postcode, Country, email Address

Abstrak

Abstrak berisi gambaran singkat keseluruhan artikel mengenai permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan rekomendasi kebijakan. Jumlah kata dalam abstrak 150-200 kata dan harus dalam satu paragraf.

Kata Kunci: 3-5 kata kunci

Abstract

Abstract contains research problem, aims of the study, research method, results, and policy recommendation. The length of abstract should be between 150-200 words and must be in one paragraph.

Keywords: 3-5 keywords

JEL Classification: F12, F13, F15 (minimal 3)

PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang (signifikansi penelitian), perumusan masalah/ pertanyaan penelitian, teori dan penelitian terkait, hipotesa (optional), dan tujuan. Pendahuluan ditulis dengan tanpa sub judul.

METODE

Berisi waktu dan tempat penelitian (optional), jenis data, bahan/cara pengumpulan data, dan metode analisis.

Cara penulisan rumus untuk persamaan-persamaan yang digunakan disusun pada baris terpisah dan diberi nomor secara berurutan dalam

parentheses (justify), sejajar dengan baris tersebut, dan rata kanan.

$$(x + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k} \dots\dots\dots(1)$$

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right) \dots\dots(2)$$

Dimana X : Nilai ekspor

A : Nilai impor

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil dan pembahasan menyajikan dan menganalisis temuan penelitian. Uraikan pada bagian ini hasil yang diperoleh secara jelas. Penulisan hasil dapat ditambahkan dengan menyajikannya dalam bentuk tabel atau gambar.

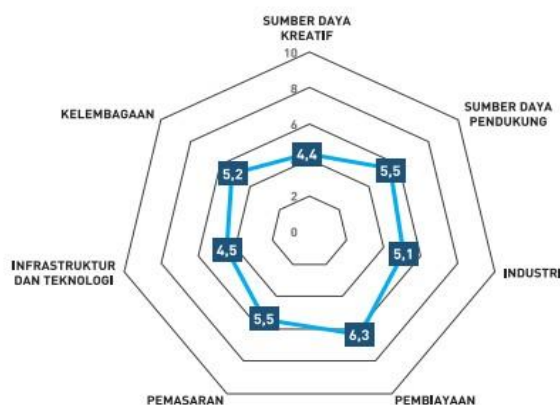
Tabel 1. Hasil Yang Diperoleh

No	Produsen	Luas Wilayah (ha)
1.	Pemerintah	512.369
2.	Swasta	41.300

Sumber: PT. Timah (2015), diolah

Keterangan:

Hindari pembahasan literatur yang berulang kecuali diperlukan untuk mengkonfirmasi hasil penelitian.



Gambar 1. Pemetaan Daya Saing Industri

Sumber: BPS (2015), diolah

Keterangan: Berdasarkan Survei Juni 2015

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kesimpulan harus menjawab pertanyaan/permasalahan penelitian. Rekomendasi kebijakan berisi rumusan kebijakan atas temuan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada pihak yang telah mendukung penyusunan naskah ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka menggunakan *reference management software* seperti Mendeley atau EndNote dengan APA style.

Firdausy, C. M. (2005). *Menapak Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Obor.

Masyhuri. (2015a). *Landasan Filosofis Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Yayasan Lentera.

Masyhuri. (2015b). *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Lentera

Whitten, J.L., Bentley, L.D., S.K., Steven, Dittman, K.C. (2004). *Systems Analysis and Design Methods*. Indianapolis: McGraw-Hill Education.

Asra, A. (2012). Trade Pattern and Welfare Impacts. *Journal of ABC*, Vol. 2 (1), pp. 35 – 29.

Muhri, K., T. Widayanti, dan A. Adang. (2012). Indonesia Competitiveness Among ASEAN Countries. *Journal of XYZ*, Vol. 3 (5), pp.200-225.

Sabdul, K. (2012). Harga Daging Sapi Menanjak Terus Menjelang Bulan Puasa. *Bisnis Indonesia*, 5 Juni.

Kompas. (2012, 4 Juni). Harga Gula Makin Meroket.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 2014. Jakarta.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2011). *Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah*. Jakarta: LIPI Press.

Ismail, A. (2007). Perancangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Jurusan Teknik Industri. Skripsi. Padang: Program Sarjana Universitas Andalas.

Krisnamurthi, B. (2014). Opportunities and Challenges: Regional & Global of CPO within the Context of Aviation Biofuel Implementation and ISPO Standard. Makalah: Disajikan pada Workshop Indonesia Initiatives on Energy Farming & Sustainable Abiation Biofuel and the ISPO/RSPO

Standard pada tanggal 26 Agustus 2014 di Kementerian Perhubungan Jakarta.

Online. (2012). Sumber dari Internet Tentang Perdagangan. Diunduh tanggal 23 April 2012 dari

<http://online.com/home/data/trade.php>

Kompas. (2011, Januari 24). Hadapi Perdagangan Internasional dengan SNI. Diunduh tanggal 30 November 2012 dari <http://www.kompas.com>

PETUNJUK PENULISAN NASKAH BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian, tidak sedang dikirimkan/telah diterbitkan pada jurnal/terbitan lain.
2. Naskah berisi tentang topik perdagangan maupun yang terkait.
3. Naskah ditulis dengan kaidah tata Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baku dan benar..
4. Penulis membuat surat pernyataan bahwa naskah yang dikirim adalah asli dan memenuhi persyaratan klirens etik dan etika publikasi ilmiah (bebas dari plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi) berdasarkan Peraturan Kepala LIPI No. 8 Tahun 2013 dan No.5 Tahun 2014.
5. Apabila naskah ditulis dari hasil penelitian kelompok dan akan diterbitkan sendiri, diharuskan menyertakan surat pernyataan persetujuan tertulis dari anggota kelompok yang lain.
6. Sistematika Penulisan: Judul, Keterangan Penulis, Abstrak, Kata Kunci, *JEL classification*, Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan, Ucapan Terima kasih, Daftar Pustaka.
7. Teknik Penulisan:
 - a. Naskah diketik pada kertas ukuran A4, 1,5 spasi, dan jenis huruf Arial 12 dengan margin kiri 3 cm, margin atas, kanan dan bawah 2,5 cm serta jumlah halaman 20-25 halaman.
 - b. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maksimal 15 kata menggambarkan isi naskah secara keseluruhan.
 - c. Judul Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kapital, *bold*, *center*, sedangkan judul Bahasa Inggris ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, *italic*, *bold* dan *center*.
 - d. Nama penulis tanpa gelar akademik diletakkan di tengah (*center*). Nama instansi, alamat instansi, dan email penulis diletakkan dalam satu baris dan di tengah (*center*).
 - e. Abstrak ditulis dalam satu paragraf menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Abstrak diketik dengan 1 spasi, jenis huruf Arial 11, jumlah kata 150-200 kata. Abstrak Bahasa Inggris diketik dengan menggunakan format *italic*.
 - f. Kata kunci dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris terletak di bawah abstrak sebanyak 3-5 kata kunci.
 - g. Mencantumkan *JEL Classification* yang dapat diakses melalui [http://www.aeaweb.org/jel/jel class system.php](http://www.aeaweb.org/jel/jel%20class%20system.php).
 - h. Tabel dan gambar diletakkan segera setelah disebutkan didalam naskah pada posisi paling atas atau paling bawah dari setiap halaman dan tidak diapit oleh kalimat.
 - i. Penulisan tabel:
 - Judul tabel menggunakan huruf arial 12, *bold*, diletakkan di atas tabel dan rata kiri.
 - Judul tabel diberi penomoran angka Arab (1, 2, 3,...)
 - Sumber tabel diketik sejajar dengan teks dibawah tabel.
 - Isi tabel diketik dengan jarak satu spasi
 - Garis tabel hanya pada bagian atas (*header*) dan garis bagian bawah (*footer*) tabel, garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan, dan dapat diedit.

- j. Penulisan gambar:
- Judul gambar ditulis dengan huruf Arial 12, *bold*, diletakkan dibawah gambar dan rata kiri.
 - Judul gambar diberi penomoran angka Arab (1, 2, 3,...)
 - Keterangan gambar diletakkan di bawah judul gambar.
 - Penulisan keterangan gambar menggunakan huruf Arial 10, dan diletakkan dibawah sumber.
 - Ukuran resolusi gambar paling sedikit 300 dpi, dan dapat diedit.

- k. Cara penulisan rumus untuk persamaan–persamaan yang digunakan disusun pada baris terpisah dan diberi nomor secara berurutan dalam *parentheses (justify)*, sejajar dengan baris tersebut, dan rata kanan. Contoh :

$$(x + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k} \dots\dots\dots(1)$$

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right) \dots\dots\dots(2)$$

- l. Keterangan rumus ditulis dalam satu paragraf tanpa menggunakan simbol sama dengan (=), masing-masing keterangan notasi rumus ditulis di bawahnya.

Contoh: x : nilai ekspor

a : nilai impor dsb.

- m. Sumber acuan di dalam teks (*body text*) ditulis dengan mencantumkan nama akhir penulis dan tahun, sedangkan untuk karya terjemahan dilakukan dengan cara menyebutkan nama pengarang aslinya.

Contoh:

- Bossche (2012) dalam papernya....
- Fasilitas-fasilitas suatu pelabuhan.....(Suyono, 2005)

8. **ABSTRAK**, berisi gambaran singkat keseluruhan artikel mengenai permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan rekomendasi kebijakan.

9. **PENDAHULUAN**, menguraikan latar belakang (signifikansi penelitian), perumusan masalah/pertanyaan penelitian, teori dan penelitian terkait, hipotesa (optional), dan tujuan .

10. **METODE** berisi waktu dan tempat penelitian (optional), bahan/cara pengumpulan data, metode analisis. .

11. **HASIL DAN PEMBAHASAN**, menyajikan dan menganalisis temuan penelitian.

12. **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**, kesimpulan harus menjawab pertanyaan/permasalahan penelitian. Rekomendasi kebijakan berisi rumusan kebijakan atas temuan penelitian.

13. UCAPAN TERIMA KASIH

14. **DAFTAR PUSTAKA**, disusun menurut abjad berdasarkan APA style. Jumlah sumber acuan dalam satu naskah paling sedikit 10 dan 80% diantaranya merupakan sumber acuan primer dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber acuan primer adalah sumber acuan yang langsung merujuk pada bidang ilmiah tertentu, sesuai topik penelitian dapat

15. berupa tulisan dalam makalah ilmiah dalam jurnal internasional maupun nasional terakreditasi, hasil penelitian di dalam disertasi, tesis maupun skripsi.

16. Tata Cara Penulisan Pustaka Acuan

Penulisan Pustaka Acuan menggunakan **APA Style** yang dapat diakses melalui <http://www.apasyle.org>

- **Rujukan dari buku:**

Contoh:

Firdausy, C. M. (2005). *Menapak Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Obor.

Jika ada beberapa buku yang dijadikan sumber ditulis oleh orang yang sama dan diterbitkan dalam tahun yang sama, data tahun penerbitan diikuti oleh lambang a, b, c, dan seterusnya yang urutannya ditentukan secara kronologis atau berdasarkan abjad judul buku-bukunya.

Contoh:

Masyhuri. (2006a). *Landasan Filosofis Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Yayasan Lentera.

Masyhuri. (2006b). *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Lentera

- **Rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel (ada editor). Ditambah dengan ed jika satu editor, eds jika editornya lebih dari satu.**

Contoh:

Masyhuri. (2006). Landasan Filosofis Ekonomi Islam. Dalam Masyhuri (Ed.). *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Lentera.

- **Rujukan dari buku yang ditulis lebih dari satu penulis, dapat ditulis dengan menambahkan nama penulis pertama dengan dkk (dan kawan-kawan) atau et.al (dan lainnya). Penulisan dalam Pustaka Acuan harus ditulis lengkap nama penulis lainnya.**

Contoh:

Whitten, et.al ditulis lengkapnya Whitten, J.L., Bentley, L.D., S.K., Steven, Dittman, K.C. (2004). *Systems Analysis and Design Methods*. Indianapolis: McGraw-Hill Education.

- **Rujukan dari artikel dalam jurnal**

Contoh:

Asra, A. (2012). Trade Pattern and Welfare Impacts. *Journal of ABC*, Vol. 2 (1), pp. 35 – 29.

Muhri, K., T. Widayanti, dan A. Adang. (2012). Indonesia Competitiveness Among ASEAN Countries. *Journal of XYZ*, Vol. 3 (5), pp.200-225.

- **Rujukan dari artikel dalam majalah atau koran**

Contoh:

Sabdul, K. (2012). Harga Daging Sapi Menanjak Terus Menjelang Bulan Puasa. *Bisnis Indonesia*, 5 Juni.

- **Rujukan dari Koran tanpa penulis**

Contoh:

Kompas. (2012, 4 Juni). Harga Gula Makin Meroket.

- **Rujukan dari dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa pengarang dan tanpa lembaga**

Contoh:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 2014. Jakarta.

- **Rujukan dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut**

Contoh:

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2011). *Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah*. Jakarta: LIPI Press.

- **Rujukan berupa skripsi, tesis, atau disertasi**

Contoh:

Ismail, A. (2007). Perancangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Jurusan Teknik Industri. Skripsi. Padang: Program Sarjana Universitas Andalas.

- **Rujukan berupa makalah yang disajikan dalam seminar, penataran, atau lokakarya**

Contoh:

Krisnamurthi, B. (2014). Opportunities and Challenges: Regional & Global of CPO within the Context of Aviation Biofuel Implementation and ISPO Standard. Makalah: Disajikan pada Workshop Indonesia Initiatives on Energy Farming & Sustainable Abiation Biofuel and the ISPO/RSPO Standard pada tanggal 26 Agustus 2014 di Kementerian Perhubungan Jakarta.

- **Rujukan dari internet**

Contoh:

Online. (2012). Sumber dari Internet Tentang Perdagangan. Diunduh tanggal 23 April 2012 dari <http://online.com/home/data/trade.php>.

- **Rujukan dari koran/majalah online**

Contoh:

Kompas. (2011, Januari 24). Hadapi Perdagangan Internasional dengan SNI. Diunduh tanggal 30 November 2012 dari <http://www.kompas.com>.

17. Semua naskah yang masuk harus mengikuti format template naskah yang telah tersedia dalam website.

Gedung Utama, Lt. 3 dan 4
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5
Jakarta Pusat
Telp. (021) 235 28681, 235 28680
Fax. (021) 235 28691

ISSN 1979-9187



9 771979 918009